

# TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes

Koordinator LAKIP : Rini Asri, S.Si., Apt.

Anggota : 1. Diah Suryaningtyas, S.Si., Apt., MM.  
2. Betty Cahyani Kusumastuti., S.F., Apt.  
3. Evi Citraprianti, S.Si., Apt.  
4. Astrada Dyna Ersya, S.Si, M. Biotech  
5. Theresia Widiastuti, S.Farm., Apt.  
6. Arfie Chandra Mustika, S.Farm., Apt.  
7. Nisaa Fatayah Ulhaq, S.Farm., Apt



# KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**



Syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia sehingga BBPOM di Jakarta dapat menjalankan target Kinerja di tahun 2017 dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2017. Laporan Kinerja ini dibuat sebagai upaya perwujudan perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Laporan Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja sekalipun masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja.

Sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kinerja dan keuangan.

Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan gambaran akurat kinerja BBPOM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta dan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja di masa mendatang

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Jakarta, Januari 2018

Kepala Balai Besar POM di Jakarta

Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes  
NIP.19620209 198703 2 001



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas produk obat dan makanan untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM. Hasil kinerja BBPOM di Jakarta telah dituangkan dalam Laporan Kinerja BBPOM di Jakarta tahun 2017. BBPOM di Jakarta telah mencapai target 3 (tiga) sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Realisasi 2 (dua) sasaran strategis mendapat kriteria memuaskan dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria cukup.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai Besar POM di Jakarta untuk Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 telah mencapai target dengan rentang capaian antara 100% (Kriteria Baik) sampai dengan 120.52% (Kriteria Memuaskan). Capaian sasaran strategis 3 dengan indikator kinerja nilai SAKIP dari Badan POM adalah 87.63% (Kriteria Cukup). Capaian ini perlu ditingkatkan karena belum mencapai target dengan kriteria Baik/Memuaskan.

Capaian Sasaran Kinerja BBPOM di Jakarta tahun 2017 secara umum telah mencapai nilai dengan kriteria Baik (100%) dan Memuaskan (100.30% s.d 120.05%). Namun terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang masih harus ditingkatkan karena capaiannya belum 100% (Kriteria Baik) yaitu Pemenuhan Target Sampling Produk Obat Di Sector Public (IFK) dengan capaian 92.25% dan Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan Makanan dengan capaian 89.78 %.

Penyerapan DIPA Balai Besar POM di Jakarta tahun anggaran 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar: Rp. 37.054.220.398 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 95,30 % penyerapan dari total pagu anggaran.

Dari perhitungan efisiensi anggaran, semua kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta Efisien kecuali untuk indikator kinerja cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.

## **Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis adalah**

1. Perubahan kebijakan Pemda DKI Jakarta bahwa Puskesmas bisa mengadakan sendiri keperluan obat dan tidak mendapat *supply* dari Instalasi Farmasi Kesehatan Provinsi sehingga agak sulit mencapai jumlah sampel obat yang beredar di sektor publik karena keterbatasan pengadaan di Puskesmas, dipersulit lagi dengan metode sampling acak / random yang pada kenyataannya obat yang diperoleh adalah obat yang banyak beredar dan dengan jenis, merk, nomor bets yang selalu sama serta menyerap tenaga dan waktu yang lebih panjang dari sampling purposive.
2. Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat importasi dan distribusi produk obat dan makanan terbesar di Indonesia, sehingga sarana yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan sarana importir dan distributor besar dengan waktu pemeriksaan yang dibutuhkan lebih lama jika dibandingkan dengan sarana distribusi biasa.
3. Persentase produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan yang memenuhi syarat tergantung dari produk yang beredar di pasaran. Produk yang disampling tiap tahun belum bisa dipastikan mutunya (Memenuhi Syarat / Tidak Memenuhi Syarat).
4. Bertambahnya jumlah sarana dan produk yang beredar tidak sebanding dengan penambahan jumlah SDM di Balai Besar POM di Jakarta.
5. Belum tercapainya pemenuhan sampling obat di sector public disebabkan karena pengadaan obat pada pelayanan public itu satu pintu sehingga no kode produksi yang ada hampir di semua sarana pelayanan public sama untuk jenis obat yang sama

Di samping kendala - kendala tersebut keberhasilan di bidang pengawasan yang lain Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat untuk dikonsumsi masyarakat

## **Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala adalah :**

1. Melakukan perhitungan jumlah sarana yang ada dan menghitung kemampuan SDM baik dari segi jumlah dan kualitas dalam melakukan pemeriksaan
2. Koordinasi dengan SKPD wilayah DKI Jakarta untuk mendapatkan data jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta sehingga mendapat data yang valid untuk perhitungan jumlah target sarana yang diperiksa

3. Lebih Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal pemenuhan sampling di sector public karena sudah 2 tahun terkendala dalam pemenuhan target sehingga lebih intensif lagi koordinasi sebelum pelaksanaan sampling

**Langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi yaitu :**

1. Melakukan perbaikan kinerja dan evaluasi target yang disesuaikan dengan perubahan output yang akan ada.
2. Melengkapi sarana dan prasarana serta meningkatkan kapasitas, kualitas dan kemampuan SDM.
3. Melakukan koordinasi lintas sektor di awal tahun 2018 untuk mmemberikan gambaran dalam isu strategis di propinsi DKI Jakarta sehingga penetapan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan kondisi dan isu strategis di Propinsi DKI Jakarta
4. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan public dan meningkatkan kompetensi petugas.
5. Melakukan mapping kebutuhan ruangan kerja dan kebutuhan peralatan laboratorium disesuaikan dengan standar yang ada serta ketersediaan lahan kantor untuk pengembangan
6. Menerapkan zona integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di BBPOM di Jakarta.
7. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor yang menindaklanjuti setiap MoU dan perjanjian kerja sama yang telah ada, melakukan evaluasi MoU dan atau perjanjian kerja sama secara berkala dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan atau instansi vertikal lainnya.
8. Meningkatkan kerjasama dengan Universitas atau sekolah dalam hilirisasi hasil penelitian yang tepat guna dan peningkatan survey dengan bantuan dari civitas akademika dalam mendukung kinerja BBPOM di Jakarta
9. Membuat perencanaan dan usulan anggaran agar system pelaporan dan pengukuran kinerja terintegrasi dengan system SIPT dan system pelaporan lainnya secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya

# Highlight Kinerja BBPOM Jakarta

Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan telah melakukan beberapa terobosan yang dapat dilihat pada kegiatan dibawah ini :

## 1. Pangan Aman di Jakarta Melalui Kerjasama dengan Kwartir Daerah Pramuka



Sejalan dengan upaya meningkatkan potensi gerakan Pramuka dalam mewujudkan keamanan pangan di DKI Jakarta dan sebagai bentuk komitmen, kesatuan tindak dalam meningkatkan keamanan pangan, pada tanggal 31 Juli 2017 bertempat di acara Workshop Nasional Pramuka Sadar Pangan (SAPA),

Taman Wiladatika Cibubur, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Kwartir Daerah (Kwarda) DKI Jakarta tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan pramuka dalam Peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H. M.Si dan Kepala BBPOM di Jakarta, Dra.Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes disaksikan oleh Kwarda dari seluruh provinsi dan jajaran Badan POM. Ruang lingkup kerjasama antara lain melaksanakan promosi dan sosialisasi keamanan pangan serta KIE keamanan pangan melalui Aplikasi Pramuka SAPA.

## 2. ToT Fasilitator Keamanan Pangan dan Sosialisasi Pramuka Sadar Pangan (Pramuka Sapa)

Dengan semangat kerjasama dan komitmen, implementasi awal dari Perjanjian Kerjasama Balai Besar POM di



Jakarta dengan Kwartir Daerah DKI Jakarta tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi DKI Jakarta, diwujudkan dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 2 hari berturut-turut bertempat di gedung Kwarda DKI Jakarta, yaitu Training of Trainer (TOT) Fasilitator Keamanan Pangan, tanggal 2 Agustus 2017 dan Sosialisasi Pramuka SAPA, tanggal 3 Agustus 2017. Acara dihadiri oleh Pembina Gugus Depan (Gudep) dari Kwartir Cabang 5 (lima) wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan peserta didik Pramuka. Pada kesempatan tersebut, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta, Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni, S.H. M.Si menyatakan kesiapan Pramuka untuk mengawal keamanan pangan di DKI Jakarta mengingat masih ditemukan masalah keamanan pangan di masyarakat. Sebagai *agent of change* Pramuka siap menjadi Pramuka Sadar Pangan Aman (Pramuka SAPA).

### 3. Kerjasama BBPOM di Jakarta dengan Perguruan Tinggi

Penandatanganan Komitmen Bersama antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) tentang Praktik Kerja Profesi Apoteker, tanggal 13 November 2017 dan Universitas Indonesia (UI) tentang Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, tanggal 14 November 2017 dilaksanakan di BBPOM di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes dengan Dekan Sekolah Farmasi ITB Dekan Sekolah Farmasi ITB, Prof. Dr. Daryono Hadi Tjahyono, M.Sc., Apt. dan Dekan Fakultas Farmasi UI Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt, disaksikan oleh perwakilan dari Badan POM dan segenap jajaran Balai Besar POM di Jakarta. Ruang lingkup Komitmen Bersama ini mencakup penyelenggaraan Praktik Kerja Profesi Apoteker dan pemanfaatan sumber daya untuk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.



#### 4. Kerjasama BBPOM di Jakarta dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta



Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan pada hari Senin, 30 Oktober 2017, bertempat di ruang pertemuan Balai Besar POM di Jakarta dan disaksikan oleh perwakilan dari Dinas Kominfotik, Dinas Kesehatan, Berita Jakarta, dan jajaran pejabat struktural dan fungsional Balai Besar

POM di Jakarta. Kesepakatan Bersama ini ditekankan pada Pengawasan Isi Siaran terhadap Iklan, Publikasi dan Promosi Obat dan Makanan pada Lembaga Penyiaran di DKI Jakarta. Dengan penandatanganan kesepakatan bersama ini kerjasama pengawasan dan tindak lanjut terhadap iklan, promosi dan publikasi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditingkatkan.

#### 5. Kerjasama BBPOM di Jakarta dengan Kanwil Bea Cukai Jakarta



Hasil pengawasan BBPOM di Jakarta selama 3 (tiga) tahun terakhir juga menunjukkan bahwa temuan produk impor tanpa ijin edar ditemukan sebanyak 48,31% pada tahun 2014; 63,96% pada tahun 2015; 67,52% pada tahun 2016. Ini memperlihatkan potensi pelanggaran dan juga potensi terjadinya

pidana memasukan obat dan makanan illegal masih terjadi dan menjadi salah satu modus operandi tindak pidana obat dan makanan terutama melalui wilayah kepabeanan di Propinsi DKI Jakarta yaitu Kantor Pos Besar Pasar Baru & Bandara Halim Perdana. Sebagai wujud komitmen bersama pada tanggal 10 Oktober 2017 Balai Besar POM di Jakarta bersama-sama dengan Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok serta perwakilan dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi masing- masing Kedeputan, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan serta Biro Hukmas melakukan koordinasi untuk meningkatkan efektifitas hasil pengawasan obat dan makanan illegal melalui kerjasama *Border Inspection*.

## 6. Kerjasama BBPOM di Jakarta dengan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI)



Balai Besar POM di Jakarta melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PD IAI Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Dukungan Profesi Apoteker yang dilaksanakan di kantor Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi DKI Jakarta tanggal

25 April 2017. Dihadiri 30 orang yang terdiri dari KaBBPOM di Jakarta beserta tim dan pengurus serta anggota PD IAI DKI Jakarta. Acara dibuka oleh Ketua PD IAI Khusus Ibukota Jakarta Dra. Azizahwati, MS, Apt. dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M. Kes.

## 7. Kerjasama BBPOM di Jakarta tentang tindak lanjut implementasi Inpres No 3 Th 2017 dengan SKPD



Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan draft Instruksi Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan maka Balai Besar POM di Jakarta mengadakan acara pertemuan

implementasi Inpres no. 3 th 2017 tanggal 8 Desember 2017. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Balai Besar POM di Jakarta dan lintas sektor terkait dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

## 8. Perkuatan Mobil Laboratorium Keliling Dengan PCR Portabel Dan Tes Kit Mikroba Patogen



Badan POM senantiasa mengikuti perkembangan teknologi pengujian obat dan makanan. Pengujian sampel dan makanan di mobil laboratorium keliling BBPOM di Jakarta pada tahun 2017 diperkuat dengan parameter uji DNA babi dan mikroba pathogen menggunakan PCR portabel dan test kit. Diharapkan

penambahan parameter uji pada mobil laboratorium keliling dapat mendukung pengawasan obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta secara lebih komprehensif.

**Keberhasilan Balai Besar POM di Jakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan pada tahun 2017 dapat dilihat pada kegiatan berikut ini:**

### **1. Balai Besar POM di Jakarta Musnahkan Rp. 26 M Kosmetik, Makanan dan Obat Tradisional Ilegal**



Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017 kembali melakukan pemusnahan terhadap sejumlah produk ilegal yang didominasi produk pangan dan kosmetika hasil pengawasan selama tahun 2015 – 2016. Jumlah total produk yang dimusnahkan adalah sebanyak 450 item (392.223 kemasan) senilai lebih dari 24 miliar

rupiah yang berasal dari enam sarana produksi dan distribusi di wilayah Jakarta. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut telah mendapatkan Ketetapan Pemusnahan dari Pengadilan Negeri setempat. Selain itu dilakukan juga pemusnahan terhadap hasil temuan BBPOM di Jakarta dalam rangka pengawasan rutin berupa Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat, Suplemen Kesehatan Ilegal, Kosmetika Ilegal serta pangan ilegal dengan nilai keekonomian lebih dari 2 Milyar rupiah sehingga total produk ilegal yang dimusnahkan adalah lebih dari 26 Milyar rupiah.

### **2. Balai Besar POM di Jakarta Musnahkan 1,1 M Pangan Kedaluwarsa**

Intensifikasi pengawasan produk pangan yang dilakukan Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta selama bulan Ramadhan dan jelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H menghasilkan temuan pangan kedaluwarsa, pangan rusak, dan pangan tanpa izin edar yang diedarkan oleh seorang pelaku usaha di 3 lokasi di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Modus yang dilakukan adalah mengubah tanggal kedaluwarsa atau repacking kemasan pangan yang telah kedaluwarsa dan mencampur produk yang baru dengan produk yang telah kedaluwarsa. Pemusnahan dilakukan tanggal 30 Agustus 2017 di PT. Mitra Tata Lingkungan Baru, Desa Wanaherang, Kec. Gn. Putri, Bogor dengan disaksikan oleh Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Pemusnahan dihadiri oleh Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP, Kepala

BBPOM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, serta Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dan Pejabat Eselon II terkait lainnya. Total produk yang dimusnahkan sebanyak 123 item ( $\pm 1500$  karton) dengan nilai keekonomian mencapai 1,1 miliar rupiah.



### 3. Surveilans Audit ISO 9001:2015 di Balai Besar POM di Jakarta



Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi pelayan publik selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu bentuk penjaminan sistem mutu di BBPOM di Jakarta adalah audit surveilans ISO 9001:2015 yang telah

diluncurkan oleh Badan POM pada awal Agustus 2017. Audit Surveilans di Balai Besar POM di Jakarta dilakukan selama 2 (dua) hari pada tanggal 8-9 November 2017 oleh Auditor Tuv Sud, Sjamsul Irwin yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta sebagai Ketua Tim Penjaminan Mutu, Dra. Dewi Prawitasari, Apt. M. Kes. Tujuan audit adalah untuk memastikan kesesuaian sistem manajemen dengan persyaratan ISO 9001:2015, memastikan kemampuan sistem manajemen dalam pemenuhan persyaratan perundangan yang berlaku dan persyaratan pelanggan, memastikan efektifitas sistem manajemen dalam pencapaian sasaran mutu dan mengidentifikasi peluang untuk peningkatan sistem manajemen. Oleh karena itu akan dipastikan dalam audit ini keempat hal tersebut telah dipenuhi dengan baik oleh organisasi. Pada *closing meeting* disampaikan tidak ditemukan adanya *finding* yang

berkategori ketidaksesuaian/NC (Non Conformity) sehingga Balai Besar POM di Jakarta dinyatakan dapat direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2015.

#### 4. Penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS)

Penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) merupakan salah satu strategi Badan POM untuk mewujudkan pangan aman di seluruh sekolah menuju generasi sehat dan berkualitas. Penyerahan PBKPKS untuk tahun 2017 dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu pada tanggal 28 April 2017 dan 12 Desember 2017, yang keduanya bertempat di Balai Agung, kantor Gubernur DKI Jakarta.

Penghargaan PBKPKS tahap 1 diberikan untuk 13 (tiga belas) sekolah yang terdiri dari SD, MI, SMP dan SMA. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Badan POM. Setelah penyerahan penghargaan PBKPKS, dilaksanakan Pencanangan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA) dengan penandatanganan komitmen Peduli Obat dan Pangan Aman oleh perwakilan instansi pemerintah di Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha dan elemen masyarakat. Penghargaan PBKPKS tahap 2 bertujuan untuk meningkatkan capaian sekolah di DKI Jakarta yang memperoleh penghargaan PBKPKS. Piagam diberikan untuk 10 (sepuluh) sekolah yang terdiri dari SD, SMP dan SMA. Penghargaan diserahkan langsung oleh Asisten Biro Kesra Prov. DKI Jakarta, Direktur SPKP dan Kepala BBPOM di Jakarta.



#### 5. Pelatihan Uji Deteksi Obat Palsu dengan kit MiniLab untuk Obat TB, HIV, Infeksi Oportunis

Balai Besar POM di Jakarta kembali bekerja sama dengan Promoting the Quality of Medicines-U.S. Pharmacopoeia (USP-PQM) Indonesia dan United States Agency for International Development (USAID) menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Laboratorium Pengujian Obat dan Napza. Pelatihan yang diselenggarakan pada tanggal 5 – 8 Desember 2017 ini bertajuk Data Collection (Sampling and Testing) with MiniLab for Testing TB, HIV, and Opportunistic Infection Medicines.

Penggunaan MiniLab dalam menguji sediaan-sediaan obat memungkinkan pemeriksaan kualitas obat di tempat sampling dan dengan waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, peningkatan keterampilan para penguji dalam menggunakan MiniLab ke depannya diharapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kinerja dalam pengawasan sediaan-sediaan obat di lapangan.



## 6. Capacity Building on Analytical Technique on Gas Chromatography

Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Laboratorium Pengujian Obat dan Napza bertajuk *Capacity Building on Analytical Technique on Gas Chromatography*, bekerja sama dengan *Promoting the Quality of Medicines-U.S. Pharmacopoeia (USP-PQM)* Indonesia dan didukung oleh *United States Agency for International Development (USAID)*. Mr. Sanford Bradby III (*Scientist V*) dan Ms. Yenny Fransisca (*Senior QA/QC Specialist*) dari USP-PQM menjadi instruktur/fasilitator dalam pelatihan yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2017 sampai 4 Desember 2017 ini. Pelatihan ini diikuti penguji Laboratorium Obat dan Napza BBPOM di Jakarta, staf Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) dan staf BBPOM di Jayapura. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Kromatografi Gas baik secara teori ataupun praktek, pemecahan permasalahannya (*troubleshooting*), serta dapat mengaplikasikannya sesuai dengan Farmakope dan prinsip-prinsip *Good Laboratory Practices (GLP)*.



## 7. Bimbingan Teknis Laboratorium

### Penetapan Kadar Logam Berat Dalam Sediaan Obat Tradisional

Dengan semakin berkembangnya metoda analisis yang baru dalam pengujian obat tradisional, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi personel penguji dengan diadakannya Pelatihan Internal pada tanggal 13-17 Maret 2017 yang diikuti oleh peserta dari Laboratorium Kosmetik dan Obat Tradisional Balai Besar POM di Jakarta dengan instruktur Ibu Aan Risma Uli, Apt, M.Si dari PPOMN. Pelatihan dibuka di hari pertama oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta pelatihan dapat menerapkan dalam pengujian rutin dan meningkatkan kinerja pengujian khususnya penetapan kadar logam berat dalam sediaan obat tradisional



### Bimbingan Teknis Penetapan Kadar Asam Folat Dalam Tepung Terigu

Kegiatan berlangsung dari tanggal 07-13 April 2017 diikuti oleh 15 orang peserta. Peserta berasal dari Bidang Pengujian Pangan BBPOM di Jakarta dan satu peserta dari staf Pengujian Pangan Balai POM di Serang. Selain dilakukan penetapan kadar juga dilakukan verifikasi Metode Analisis. Diharapkan

dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan personil Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya sehingga memenuhi standar pemenuhan parameter uji kritis pada tepung terigu. Selain itu juga dapat meningkatkan pemenuhan standar Ruang Lingkup Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Balai Besar POM di Jakarta



## Bimbingan Teknis Uji Dan Verifikasi Endotoksin Bakteri Pada Sediaan Injeksi Antibiotik Dengan Metode Jendal Gel



Dalam rangka peningkatan kompetensi personel pengujian laboratorium mikrobiologi melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengujian bertema endotoksin bakteri pada tanggal 15 – 19 Mei 2017 . Tema endotoksin bakteri diangkat karena parameter uji produk injeksi pada prioritas sampling produk injeksi termasuk uji endotoksin bakteri. PPOMN memfasilitasi penugasan

instruktur untuk membimbing teknis pengujian.

## Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengujian Napza secara GCMS

Dengan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan Napza dan peredaran obat palsu di masyarakat, maka Balai Besar POM di Jakarta perlu meningkatkan kompetensi personil pengujian dalam pengujian secara GCMS terhadap Napza maupun obat-obat lain pada umumnya. Untuk itu diadakan Pelatihan Internal selama 5 hari sejak tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 yang diikuti oleh peserta dari Laboratorium Obat dan Napza dengan Instruktur Ibu Nurul Hidayati S.Si dari PPOMN. Dalam pelatihan ini juga dibahas berbagai permasalahan dalam pengujian lainnya dan diharapkan peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu dan keterampilannya dalam pengujian rutin dan meningkatkan kinerja pengujian khususnya pengujian Napza secara GCMS.



### **Bimbingan Teknis Identifikasi dan Angka *Listeria monocytogenes***



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta terus menerus meningkatkan kinerja pengujian laboratorium melalui pelatihan eksternal maupun internal. Pada tanggal 4-8 September 2017 BBPOM di Jakarta kembali menyelenggarakan pelatihan internal laboratorium mikrobiologi diikuti oleh semua

penguji di laboratorium mikrobiologi dengan bimbingan Narasumber dari Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), Kemala S. Nagur, S.Si., M.Si. Fokus pelatihan internal ini adalah meningkatkan kompetensi penguji untuk salah satu parameter uji baru sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan yaitu Identifikasi dan Angka *Listeria monocytogenes*.

### **Bimbingan Teknis Penetapan Kadar Dioksan dalam Kosmetik secara GC MS**



Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi Laboratorium Pengujian Kosmetik pada tanggal 4 – 8 Desember 2017 yang berfokus pada pengujian dioksan pada sediaan kosmetik secara GC-MS dengan instruktur adalah Sri Purwaningsih dari Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN). Dalam pelatihan ini juga dibahas

berbagai permasalahan dalam pengujian lainnya dan diharapkan peserta pelatihan dapat menerapkan ilmu dan keterampilannya dalam pengujian rutin dan meningkatkan kinerja pengujian khususnya pengujian kosmetik secara GCMS.

### **8. Wujudkan Keamanan Pangan di Komunitas Madrasah Provinsi DKI Jakarta**



Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menggandeng Balai Besar POM di Jakarta untuk menyelenggarakan Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

pada tanggal 19 Januari 2017 bertempat di Aula Jayakarta Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang diikuti 250 orang peserta, terdiri dari Kepala Madrasah dan Guru Penanggung jawab UKS serta Guru Penanggung jawab Kesiswaan untuk tingkat Ibtidayah (MIN), Tsanawiyah (MTs-N), dan Aliyah (MAN) di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama antara Balai Besar POM di Jakarta, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan LPPOM MUI Provinsi DKI Jakarta.

## 9. Penyuluhan Keamanan Pangan untuk Industri Rumah Tangga di Wilayah DKI Jakarta



Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memegang peranan penting dalam sektor pertumbuhan ekonomi mikro dan menengah, produk IRTP dikonsumsi secara luas di masyarakat dan memiliki pangsa pasar dengan segmentasi yang tidak terbatas. Oleh karenanya, keamanan

pangan IRTP sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut kesehatan masyarakat luas. Untuk mengawal keamanan pangan IRTP, BBPOM di Jakarta bekerjasama dengan berbagai instansi di Kota Administrasi DKI Jakarta diantaranya Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur pada 27 Februari 2017 dan Kelurahan Tebet Barat tanggal 18 Januari 2017. Kegiatan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaku industri untuk memproduksi pangan olahan rumah tangga yang bermutu serta aman dari bahaya fisik, kimia dan biologis. Langkah kerjasama ini merupakan wujud komitmen BBPOM di Jakarta untuk mewujudkan visi Badan POM yaitu obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

## 10. BPOM sapa pemudik dengan KLIK



Menyambut Idul Fitri 1438 H, Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan di lokasi-lokasi pemberangkatan pemudik yaitu Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2017 yang di hadiri oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Dr.Ir. Penny K Lukito.MCP , Terminal Pulo

Gebang Jakarta Timur dan Stasiun Gambir Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2017, dan Pantai Karnaval Ancol pada tanggal 22 Juni 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan tips memilih pangan yang aman bagi para pemudik. Di lokasi titik pemberangkatan mudik tersebut, BBPOM di Jakarta menyediakan mobil laboratorium keliling untuk memastikan pangan jajanan yang di perjual belikan di ke empat lokasi tersebut terbebas dari bahan – bahan berbahaya, dibagikan pula leaflet berisi tips bermanfaat tentang “CEK KLIK” yang berisi info praktis memilih pangan yang aman serta gimmick yang menarik perhatian pemudik. Selain itu disediakan pula booth yang berisi contoh-contoh makanan yang mengandung bahan berbahaya.

#### **11. Semarak Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman ( Germas SAPA) di Car Free Day Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) / *Car Free Day* Kota Administrasi Jakarta Selatan yang rutin dilakukan setiap bulan sejak bulan Agustus 2017 merupakan salah satu wadah untuk mensosialisasikan Germas Sapa. HBKB tanggal 15 Oktober, 19 November dan 17 Desember 2017 merupakan kesempatan BBPOM Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bank DKI.

Acara dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Selatan, Ibu Sri Yuliani, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan. Pada HBKB tanggal 17 Desember 2017, BBPOM Jakarta memberikan apresiasi terhadap siswa dan sekolah pemenang Lomba Tari Budaya Keamanan Pangan yang diselenggarakan Jumat, 15 Desember 2017. Piagam dan trofi diserahkan secara langsung kepada SD Pesanggrahan 10, SD Cipulir 09, SD Pondok Labu 07, SMP 12, SMP 19, SMP 161, SMA 34, SMA 63, dan SMK 28. Acara semakin meriah dengan adanya KIE Keamanan Pangan oleh Kepala BBPOM Jakarta dan pembagian doorprize kepada pengunjung. BBPOM Jakarta juga membuka stand mobil laboratorium keliling di lokasi yang sama.



## 12. Bersama Jakarta Fair, Indonesia Bersatu Indonesia Bahagia



Dengan mengusung tema “Jakarta Fair 2017 Membangkitkan kesadaran memperluas lapangan kerja bagi rakyat banyak” dengan sub tema “Marilah bekerja keras demi kemajuan bangsa dan negara, menuju berakhirnya kesenjangan, rakyat makmur sentosa”, ajang pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara kembali hadir. Bertempat di Arena Jakarta International Expo (JIExpo)

Kemayoran Jakarta Pusat, event Jakarta Fair telah dibuka untuk umum sejak 6 Juni 2017 dan peresmian dilakukan pada 14 Juni 2017 dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI dan Plt. Gubernur DKI Jakarta. Tahun 2017 ini merupakan tepat 50 tahun diselenggarakannya event Jakarta Fair Kemayoran dan sekaligus digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kota Jakarta ke-490. Penyelenggaraan diikuti oleh 2700 perusahaan peserta yang tergabung dalam 1500 stand pameran. Balai Besar POM di Jakarta, sebagai bagian dari pelayanan publik Pemerintah DKI Jakarta turut hadir pada ajang Jakarta Fair Kemayoran 2017, dengan menampilkan beragam informasi antara lain Cek BPOM, Cek KLIK, Cek BTP, GNPOPA, pangan mengandung bahan berbahaya serta layanan sertifikasi.

## 13. Talkshow dan Kunjungan Dirjen OTDA ke stand BBPOM di Jakarta pada Pekan Raya Jakarta Kemayoran (Jakarta Fair) 2017

Sebagai bentuk peran serta dalam Layanan Publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta, BBPOM di Jakarta turut aktif berpartisipasi di dalam Anjungan Provinsi DKI Jakarta, Hall C1, Pekan Raya Jakarta Kemayoran yang telah berlangsung sejak 8 Juni 2017 dan akan berakhir pada 16 Juli 2017. Pada tanggal 17 Juni dan 8 Juli 2017, Kepala BBPOM di Jakarta Dra. Dewi Prawitasari, Apt, M. Kes menyampaikan talkshow di panggung Anjungan Provinsi DKI Jakarta. Pada talkshow ini, beliau menyampaikan materi tentang Keamanan Pangan, berdiskusi langsung dengan para pengunjung terkait materi yang disampaikan, dan memberikan bingkisan menarik bagi pengunjung yang aktif bertanya. Pasca talkshow tersebut, stand BBPOM di Jakarta memperoleh kesempatan untuk dikunjungi oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan sekaligus mantan Plt Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Soni Sumarsono, M.DM Beliau

mengapresiasi peran aktif BBPOM di Jakarta dan mendorong peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi DKI Jakarta.



#### **14. Menyapa Masyarakat Luas Dengan Talkshow Di RRI**

Untuk memperluas cakupan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta melakukan talkshow dan interaktif melalui Radio Republik Indonesia ( RRI ) yang memiliki jaringan pendengar di seluruh Indonesia. Pada bulan Ramadhan, pada hari Kamis dan Senin tanggal 8, 12 dan 16 Juni 2017 pada pukul 9.00 – 10.00 WIB Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari, Apt. M. Kes memberikan informasi tentang keamanan pangan, meliputi Makanan yang aman dan ciri-ciri makanan yang mengandung bahan berbahaya, dan penggunaan kemasan pangan. Beliau menyampaikan untuk selalu ingat Cek KLIK : cek Kemasan, cek Label, cek Izin Edar dan cek Tanggal Kadaluausa. Sebagai penutup, beliau menghimbau agar masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih Makanan yang akan dikonsumsi dan dalam mengkonsumsi Pangan Siap Saji serta membeli dan menyiapkan parcel makanan.



## 15. Penyebaran Informasi ke Sekolah di wilayah DKI Jakarta

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan komunitas sekolah terkait penyediaan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi, Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Jajanan Sekolah Tahun 2017 yang diadakan di Aula Pertemuan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 September 2017. Acara dihadiri oleh komunitas sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Penjaja Kantin) dari 13 sekolah terpilih tingkat SD, SMP, SMA dan Madrasah dan peserta dari perwakilan SKPD di lingkungan provinsi DKI Jakarta terkait yaitu Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Suku Dinas Pendidikan wilayah I dan II di 6 (enam) kota/kabupaten administrasi.



### Sekolah Al Izhar Pondok Labu



Balai besar POM di Jakarta memberikan Informasi dan Edukasi di Sekolah Al Izhar pada hari Rabu, 13 September 2017 di ruang Teater Kecil Al Izhar Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan. Peserta yang hadir sebanyak 78 orang terdiri dari siswa kelas SD, SMP dan SMA, guru dan manajemen dari Sekolah Al Izhar. Acara dimulai

dengan pembukaan oleh Wakil Direktur Administrasi dan Umum Yayasan Al Izhar, Ibu Nuryani Yahya, dilanjutkan pemaparan materi Keamanan Pangan oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari Apt. M.Kes. lalu diteruskan demo *Rapid Test Kit* 4 bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B, Methanyl Yellow)

## 16. Safari Ramadhan Bersama Indofood



Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang Pendidikan Gizi dan Kesehatan, PT Indofood Sukses makmur Tbk. melakukan Program Safari Ramadhan Indofood 2017 pada tanggal 4 Juni 2017 di Pondok Pesantren Putri As-Syafiiyah Jl. Raya Jati Jakarta Timur dengan tema "Peran Asupan Nutrisi Pada Anak dan Remaja Untuk Ciptakan Generasi Sehat dan Berkualitas", diikuti oleh 210 peserta terdiri 200 orang siswa dan 10 guru pendamping yang berasal dari 5 (lima) Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang terdapat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu SDN Kebon Jeruk 11, SDN Setiabudi 01 pagi, SDN Jatiwaringin III, SDN Menteng 03 Pagi dan SDN Tebet Barat 08. Acara dibuka oleh Bapak Deni Puspahadi selaku Senior Manager Corporate Social Responsibility Department, dan dilanjutkan pemaparan materi tentang Keamanan Pangan oleh Ibu Dewi Prawitasari selaku Kepala Balai Besar POM di Jakarta.

## 17. Cerdaskan Masyarakat dengan KIE



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan bersama Komisi IX. Tahun 2017 dilaksanakan di Aula SMK Negeri 27 Jakarta Pusat pada 11 April 2017 dan bertempat di Aula Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 4 Mei 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat khususnya Ibu rumah tangga akan pentingnya keamanan pangan dan bagaimana cara memilih obat, obat tradisional, dan kosmetik yang aman. Kegiatan ini dihadiri oleh 500 orang yang merupakan perwakilan dari berbagai kelurahan di Kecamatan sesuai lokasi penyelenggaraan.

## 18. Menyapa Masyarakat di Mall Artha Gading Melalui Pameran Gelar Produk Khas Daerah (GPKD)

Balai Besar POM di Jakarta memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat melalui pameran Gelar Produk Khas Daerah (GPKD) yang diselenggarakan mulai tanggal 10 - 13 Agustus 2017 di Mall Artha Gading. Balai Besar POM di Jakarta hadir untuk memberikan informasi serta mengedukasi



masyarakat pengunjung stand Balai Besar POM di Jakarta. Pameran GPKD 2017 diikuti oleh 30 peserta dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari berbagai propinsi di Indonesia.

## 19. Kelurahan Pulau Untung Jawa Siapkan Pasar Destinasi Wisata



Kelurahan Pulau Untung Jawa merupakan salah satu kelurahan yang telah dipilih sebagai *Pilot Project* oleh Balai Besar POM Jakarta sebagai Pasar Destinasi Wisata pada tahun 2017. Minggu, 26 Maret 2017 dilakukan peninjauan lapangan ke Pulau Untung Jawa oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Ibu Dewi Prawitasari dan Tim, Lurah P. Untung Jawa, Bapak Ade Slamet dan Petugas dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Kunjungan bertujuan untuk melihat secara langsung situasi pantai, kunjungan wisatawan, serta kesibukan kuliner di daerah tersebut. Tim BBPOM di Jakarta melakukan KIE kepada para pedagang makanan siap saji baik yang diolah langsung maupun pangan siap saji yang berasal dari pangan olahan terkemas. Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel makanan yang dijual di Taman Arung Samodra (Arsa) untuk diuji menggunakan rapid test kit identifikasi 4 bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanil Yellow). Dari tiga puluh enam (36) sampel yang diuji masih ditemukan tiga (3) sampel mengandung formalin dan boraks. Pedagang yang menjual pangan yang mengandung Bahan Berbahaya langsung diberikan pembinaan oleh Lurah dan pihak Puskesmas. Kunjungan dilanjutkan ke Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Amiterdam yang telah diresmikan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2015. Dalam kunjungan tersebut diberikan arahan ke petugas RPTRA untuk meningkatkan pemberian informasi terkait keamanan pangan mengingat lokasi RPTRA Amiterdam yang sangat strategis.

## 20. BBPOM Di Jakarta Laksanakan Penutupan Apotek Rakyat



Permenkes No. 53 tahun 2016 tentang pencabutan Permenkes No.284/Menkes/per/III/2007 tentang apotek rakyat maka izin apotek rakyat dinyatakan tidak berlaku. BBPOM di Jakarta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas kesehatan di lima Wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sosialisasi dan Pembinaan terhadap

apotek rakyat terkait Permenkes No. 53 tahun 2016 tersebut di atas. Tanggal 17 Mei 2017 merupakan batas akhir penyesuaian izin. BBPOM di Jakarta bersama tim Dinkes dan Sudinkes melakukan Pemeriksaan pada 4 apotek rakyat yang belum menyesuaikan izin di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pada saat pemeriksaan didapati bahwa ybs memang belum mengurus izin baru, sehingga komoditi Obat keras, bebas dan terbatas. Produk diamankan di tempat dan dititipkan pada pemilik sarana dengan disegel lembar “Dalam pengawasan BBPOM di Jakarta”

## 21. Pengawasan Pangan dan Kosmetik Terpadu



Menjelang Natal dan Tahun Baru 2018, Balai Besar POM di Jakarta bersama Sudinkes Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Selatan turun bersama dalam rangka intensifikasi pengawasan peredaran produk pangan di swalayan Carrefour Mall Kota Kasablanka pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2017. Hasil

pelaksanaan pengawasan di Carrefour Mall Kota Kasablanka masih ditemukan pangan Tanpa Izin Edar (TIE). Untuk temuan produk pangan dan kosmetika TIE dilakukan pengamanan produk dan untuk produk pangan rusak serta kedaluwarsa dilakukan pemusnahan ditempat dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar POM di Jakarta.

## 22. Operasi Terpadu Penindakan Pelaku Usaha Obat-Obat Ilegal



Balai Besar POM Jakarta dan lintas sektor seperti Kepolisian, Bea Cukai, Pomdam Jaya, berkomitmen untuk secara terpadu melakukan pemberantasan penyalahgunaan Obat. Sebagaimana yang disampaikan dalam Press Release Hasil Operasi Obat dan Bahan Berbahaya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, bertempat di Ditreskrim Narkoba Polda Metro Jaya. Ditresnarkoba Polda Metro Jaya beserta Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan operasi terhadap Apotek, Toko Obat dan Warung untuk mencegah jatuhnya korban akibat penyalahgunaan obat-obatan secara ilegal dalam kurun waktu 13 – 18 September 2017; dan menemukan barang bukti puluhan ribu butir Tramadol serta Hexymer; serta ratusan butir psikotropika. Disamping menyita beberapa obat keras juga dilakukan penyitaan terhadap beberapa jenis obat yang sudah kadaluwarsa, seperti Clobazam, Kemoren, Amoxilin, Besylate, Piroxicam, Cefadroxil, Faxiden, Glibencamide, Amlodipine, Cetirizine HCl, Erphaflam, Eltazon Prednisone, Katidic, Metamizole Sodium, Gratheos. Dalam operasi tersebut Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Petugas Balai besar POM di Jakarta juga melakukan penahanan terhadap tersangka di masing – masing Polres yang sesuai dengan TKP yang menggunakan modus operandi menjual bebas di apotek dan toko obat tanpa izin edar dan resep dokter; dan akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

## 23. Sinergitas Lintas Sektor tingkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan



Dalam upaya meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta dan sebagai Tindak Lanjut dari Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 27 Maret 2017 bertempat di gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, diselenggarakan *Forum Group Discussion (FGD)* Pemantapan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan diikuti oleh jajaran SKPD Pemerintah Provinsi dan Kota Administrasi di DKI Jakarta, antara lain Biro

Kesejahteraan Sosial, Biro Perekonomian, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKMP, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan PD Pasar Jaya

## 24. GLP Assesment



Dalam rangka mengkonfirmasi pemenuhan terhadap standar kompetensi personil, ruang lingkup dan peralatan yang ditetapkan oleh PPOMN, pada tanggal 16 dan 18 Oktober 2017, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta menerima Tim PPOMN yang terdiri dari Ibu Aty

Setiawati, M.Si, Apt dan Ibu Nur Aini, S.Si, MSc. Dalam opening meeting, Kepala BBPOM di Jakarta Ibu Dra. Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes. menyatakan bahwa BBPOM di Jakarta telah siap untuk diaudit. Evaluasi selama 2 (dua) hari oleh Tim PPOMN mencakup aspek pemenuhan laboratorium terhadap standar ruang lingkup pengujian, standar peralatan, dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh PPOMN. Total persentase rata-rata pemenuhan Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Jakarta untuk ketiga aspek tersebut adalah 80.4%. Angka ini telah melampaui standar minimal persentase pemenuhan standar yang ditetapkan yaitu 75%.

**Untuk menciptakan Balai Besar POM yang bersih akuntabel transparan dan berkomitmen mengawal reformasi birokrasi maka selama tahun 2017 dilakukan kegiatan berikut :**

### **1. Penandatanganan Pakta Integritas Asosiasi, Ikatan Profesi, Pelaku Usaha Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di DKI Jakarta**



Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bertempat di Balai Besar POM di Jakarta, tanggal 17 Januari 2017, diselenggarakan Penandatanganan Pakta Integritas dengan Asosiasi antara lain Perkosmi DKI Jaya, GP Jamu DKI Jakarta, Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing (Gapota), GAPMMI DKI Jakarta, Ikatan Profesi antara lain Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) serta pelaku usaha sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya



Balai Besar POM di Jakarta mengadakan apel pagi di halaman kantor pada tanggal 17 Februari 2017. Dalam kesempatan apel pagi tersebut, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menyematkan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI

yang diberikan kepada pegawai yang telah mengabdikan dan bekerja dengan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30, 20, dan 10 tahun.

## 3. Kami BBPOM di Jakarta, Kami Pancasila



Dalam rangka Pekan Pancasila dilaksanakan Sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila dan motivasi terhadap karyawan dalam kebhinekaan demi peningkatan kinerja. Kegiatan ini dilakukan di ruang rapat Balai Besar POM di Jakarta yang diikuti oleh 50 orang peserta terdiri dari pejabat struktural

dan perwakilan semua bidang. Narasumber kegiatan ini adalah Kepala Balai Besar POM di Jakarta Ibu Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes dan Bapak Nyoman Indra Permana. Diharapkan dengan acara sosialisasi ini mengingatkan kembali tentang penerapan Pancasila dan perbedaan yang ada tidak menimbulkan perpecahan tetapi mampu menghasilkan kinerja baik dalam melindungi masyarakat

#### 4. Peningkatan Kompetensi Pegawai Di Lingkungan BBPOM Jakarta



Demi mewujudkan salah satu perwujudan misi Badan POM yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, maka Balai Besar POM di Jakarta mengadakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam Rangka Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Oktober 2017 di

Kinasih Resort and Convention Centre. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta dan mentor dari Quantum Awareness Healing. Dalam kesempatan ini peserta diberikan keterampilan untuk mengelola stress dan emosi sehingga tidak berpengaruh pada kinerja di kantor maupun kesehatan masing – masing pegawai. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kinerja dari pegawai karena terkelolanya stress dan emosi dengan baik. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Balai Besar POM di Jakarta akan senantiasa diakomodir dengan peningkatan kompetensi pegawai guna memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.

#### 5. Mentality Management dalam Membangun Etos Kerja



Revolusi Mental merupakan hal yang harus dilaksanakan pada semua institusi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Revolusi Mental Perlu dilakukan termasuk dalam membangun etos kerja. Untuk mewujudkan hal tersebut di Balai Besar POM di Jakarta

diadakan Pelatihan sehari *Mentality Management* bekerjasama dengan Talenta Group dengan motivator Syamsul Bahri, S.Sos, MBA, MM pada tanggal 20 Desember 2017.

*Mentality Management* ini diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM dalam membentuk personel yang bernilai dan selalu berbagi, bekerja dengan hati,

membangun keyakinan diri dan selalu bersikap positif untuk mencapai tujuan organisasi.

## 6. Pemeriksaan Urine Bebas Narkoba

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah abdi masyarakat yang berperilaku baik dan tidak menggunakan narkoba. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.50 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan



Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) pegawai, yang terdiri dari : ASN, PPPK dan Sekuriti mengikuti tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta. Tes ini sebagai

langkah antisipasi dini penyalahgunaan narkoba dikalangan pegawai BBPOM di Jakarta. Pemeriksaan Urine dilakukan secara mendadak pada Jumat, 8 Desember 2017 pukul 14.00 WIB – 17.00 WIB oleh 11 (sebelas) petugas dari BNNP Provinsi DKI Jakarta dengan peralatan uji dari BNNP Provinsi DKI Jakarta. Adapun sebelum mengambil sampel urine, petugas BNN memberi pengarahannya tentang pemeriksaan urine tersebut dan dilakukan konsultasi antara petugas dan pegawai. Hasil yang didapat seluruh sampel urine pegawai yang diuji dinyatakan Negatif Narkoba.

## 7. The Art of Communication Training



Cara berkomunikasi yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan manajemen organisasi. Kepala BBPOM di Jakarta Dra. Dewi Prawitasari., Apt., M. Kes memahami bahwa penguasaan komunikasi

merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh pegawai BBPOM di Jakarta. Oleh karenanya diselenggarakan pelatihan *'The Art of Communication Training'* dengan narasumber dari John Robert Powers pada tanggal 5 Desember 2017 yang diikuti oleh pegawai dari masing masing bidang dan *frontliner* yang berhubungan

langsung dengan pelanggan. Diharapkan pelatihan ini dapat meningkatkan *communication skill* agar informasi yang disampaikan dapat diterima sesuai maksud dan tujuan yang diinginkan.

**Inovasi yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam manajemen kerja adalah :**

**1. Penangkalan di Tapal Batas**

Untuk peningkatan efektivitas pengawasan dilakukan inovasi Penangkalan di Tapal Batas yang merupakan Kerjasama *Border Inspection* antara BBPOM di Jakarta dengan Kanwil Bea dan Cukai Jakarta. Tujuannya adalah Untuk menangkal dan mengurangi masuknya Produk-produk obat dan makanan impor ilegal ke Post Border

**2. Peningkatan Efektifitas Layanan Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan melalui Pedoman untuk Petugas dalam Mengevaluasi Kelengkapan Permohonan Sertifikasi**

Inovasi ini untuk meningkatkan pemahaman petugas pelayanan tentang validitas dokumen permohonan sertifikasi, terselenggaranya pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan sesuai ketentuan.

**3. Menekan Angka Penggunaan Bahan Berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B, Methanil Yellow) dengan Cara Meningkatkan Kompetensi Petugas Pasar dalam Jangka Waktu Satu Tahun (2018) di Pasar Aman (Pasar Cibubur, Mayestik, Tebet, Johar Baru, Koja Baru dan Pasar Grogol)**

Tujuan dari inovasi ini adalah Menurunkan angka penggunaan bahan berbahaya Formalin, Boraks, Rhodamin B, Methanil Yellow dan terciptanya pasar aman demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar

**4. Percepatan Penyelesaian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) Temuan Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Napza di Wilayah Provinsi DKI Jakarta**

Inovasi ini dilakukan dalam mempercepat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian CAPA

**5. Meningkatkan Jumlah Pelaporan Hasil Pengujian melalui SIPT**

Tujuan inovasi adalah untuk memperoleh solusi untuk meningkatkan jumlah pelaporan hasil pengujian melalui SIPT dalam pengawasan produk yang beredar di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

BADAN POM

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI / BENDA SITAAN HASIL PENGAWASAN  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA  
TAHUN 2017



2 Mei 2

# DAFTAR ISI

v	IKHTISAR EKSEKUTIF	ix	HIGHLIGHT KINERJA BBPOM JAKARTA
xxxv	DAFTAR ISI		
		xxxvi	DAFTAR TABEL
		xxxvi i	DAFTAR GAMBAR
		xlii	DAFTAR LAMPIRAN
1	<b>BAB I</b> PENDAHULUAN		
1	1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI		
3	1.2 STRUKTUR ORGANISASI		
6	1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI		
15	1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS		
26	1.5 ISU STRATEGIS		
37	<b>BAB II</b> PERENCANAAN KINERJA		
37	2.1 RENCANA STRATEGIS		
50	2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN		
52	2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR		
55	<b>BAB III</b> AKUNTABILITAS KINERJA		
55	3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI		
122	3.2 REALISASI ANGGARAN		
129	<b>BAB IV</b> PENUTUP		
			LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1.** Rangkuman Analisis SWOT
- Tabel 1.2.** Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
- Tabel 1.3.** Persentase penduduk di atas 10 tahun menurut status pendidikan
- Tabel 1.4.** Laju Pendapatan Regional DKI Jakarta
- Tabel 1.5.** Sasaran Pengawasan Tahun 2017
- Tabel 2.1.** Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM
- Tabel 2.2.** Rencana Kinerja (Performance Plan) 2015-2019
- Tabel 2.3.** Rencana Alokasi Anggaran 2015-2019
- Tabel 2.4.** Revisi Renstra
- Tabel 2.5.** Review Renstra
- Tabel 2.6.** Rencana Kinerja Tahunan
- Tabel 2.7.** Perjanjian Kinerja tahun 2017
- Tabel 2.8.** Kriteria Capaian
- Tabel 3.1.** Realisasi Sasaran Strategis tahun 2017
- Tabel 3.2.** Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2017
- Tabel 3.3.** Sasaran Strategis I tahun 2017
- Tabel 3.4.** Capaian Kegiatan Untuk Mewujudkan Sasaran Strategis I
- Tabel 3.5.** Sasaran Strategis II tahun 2017
- Tabel 3.6.** Capaian kegiatan untuk mewujudkan sasaran Strategis II
- Tabel 3.7.** Sasaran Strategis III tahun 2017
- Tabel 3.8.** Capaian Kegiatan Untuk Mewujudkan Sasaran Strategis III
- Tabel 3.9.** Analisa Persentase Standar Sarana dan Prasarana Kantor yang Dapat Terpenuhi
- Tabel 3.10.** DIPA Balai Besar POM di Jakarta tahun 2017
- Tabel 3.11.** Realisasi Anggaran Balai Besar POM Di Jakarta Per Sasaran Strategis
- Tabel 3.12.** Efisiensi kegiatan Balai Besar POM di Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1.** Struktur Organisasi
- Gambar 1.2.** Profil Jumlah Penduduk DKI Jakarta tahun 2000, 2010-2017
- Gambar 1.3.** Profil Jumlah Pegawai BBPOM di Jakarta
- Gambar 1.4.** Profil Jumlah SDM Menurut Unit Kerja
- Gambar 1.5.** Pendidikan Pegawai BBPOM di Jakarta
- Gambar 1.6.** Jumlah PFM Pegawai BBPOM di Jakarta
- Gambar 1.7.** Luas Wilayah DKI Jakarta
- Gambar 1.8.** Piramida Penduduk DKI Jakarta Tahun 2017
- Gambar 1.9.** Peta Wilayah Sasaran Pengawasan
- Gambar 1.10.** Peta Lokasi Balai Besar POM di Jakarta
- Gambar 2.1** Tujuan yang akan Dicapai dalam Kurun Waktu 2015-2019, dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Pengawasan Obat dan Makanan
- Gambar 3.1.** Perbandingan Sasaran Strategis I dengan Target Tahun 2019
- Gambar 3.2.** Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017 (Obat)
- Gambar 3.3.** Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (Obat)
- Gambar 3.4.** Perbandingan realisasi tahun 2017 dengan target tahun 2019 (Obat)
- Gambar 3.5.** Perbandingan capaian BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang (Obat)
- Gambar 3.6.** Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 (OT)
- Gambar 3.7.** Perbandingan target dan realisasi 2017 dengan target tahun 2015 dan 2016 (OT)
- Gambar 3.8.** Perbandingan realisasi 2017 dengan target 2019 (OT)
- Gambar 3.9.** Perbandingan capaian BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang (OT)

- Gambar 3.10.** Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 (Kosmetik)
- Gambar 3.11.** Perbandingan target dan realisasi 2017 dengan target tahun 2015 dan 2016 (Kosmetik)
- Gambar 3.12.** Perbandingan realisasi 2017 dengan target 2019 (Kosmetik)
- Gambar 3.13.** Perbandingan capaian BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang (Kosmetik)
- Gambar 3.14.** Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 (Suplemen Kesehatan)
- Gambar 3.15.** Perbandingan target dan realisasi 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (Suplemen Kesehatan)
- Gambar 3.16.** Perbandingan realisasi 2017 dengan target 2019 (Suplemen Kesehatan)
- Gambar 3.17.** Perbandingan capaian BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang (Suplemen Kesehatan)
- Gambar 3.18.** Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 (Makanan)
- Gambar 3.19.** Perbandingan target dan realisasi 2017 dengan target tahun 2015 dan 2016 (Makanan)
- Gambar 3.20.** Perbandingan realisasi 2017 dengan target 2019 (Makanan)
- Gambar 3.21.** Perbandingan capaian BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.22.** Capaian Kegiatan Dalam Sasaran Strategis I
- Gambar 3.23.** Perbandingan Capaian Kegiatan dalam Sasaran Strategis I Tahun 2015-2017
- Gambar 3.24.** Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis
- Gambar 3.25.** Perbandingan Realisasi Jumlah Sampel Yang Diuji Menggunakan Parameter Uji Kritis Tahun 2017 Dengan Target 2019
- Gambar 3.26.** Perbandingan Jumlah Sampel yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.27.** Perbandingan pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016

- Gambar 3.28.** Perbandingan pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik target dan realisasi tahun 2017 dengan target tahun 2019
- Gambar 3.29.** Perbandingan Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik (IFK) BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.30.** Sebaran Sarana Sektor Publik di Provinsi DKI Jakarta
- Gambar 3.31.** Sebaran Sarana Produksi di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
- Gambar 3.32.** Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2017 dengan Tahun 2015 dan 2016
- Gambar 3.33.** Perbandingan Realisasi Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan Tahun 2017 dengan Target Tahun 2019
- Gambar 3.34.** Perbandingan persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.35.** Sebaran sarana distribusi di wilayah Provinsi DKI Jakarta
- Gambar 3.36.** Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016
- Gambar 3.37.** Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan tahun 2017 dengan Target tahun 2019
- Gambar 3.38.** Perbandingan capaian cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.39.** Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan
- Gambar 3.40.** Perbandingan target dan realisasi jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016
- Gambar 3.41.** Perbandingan target dan realisasi jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017 dengan target tahun 2019
- Gambar 3.42** Perbandingan capaian jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017 BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.43.** Capaian perkara dari Operasi Khusus Tahun 2017

- Gambar 3.44.** Perbandingan realisasi tahun 2017 dengan target tahun 2019 (Tingkat Kepuasan Masyarakat)
- Gambar 3.45.** Perbandingan capaian tingkat kepuasan masyarakat BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.46.** Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 dengan target dan realisasi tahun 2015 dan 2016 (Tingkat kepuasan masyarakat)
- Gambar 3.47.** Perbandingan realisasi tahun 2017 dengan target tahun 2019 (Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan)
- Gambar 3.48.** Perbandingan target dan realisasi 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan)
- Gambar 3.49** Perbandingan capaian jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.50.** Perbandingan realisasi tahun 2017 dengan target tahun 2019 (Jumlah layanan publik)
- Gambar 3.51.** Perbandingan capaian jumlah layanan publik BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.52.** Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 dengan target dan realisasi tahun 2015 dan 2016 (Jumlah layanan publik)
- Gambar 3.53.** Perbandingan realisasi tahun 2017 dengan target tahun 2019 (Jumlah komunitas yang diberdayakan)
- Gambar 3.54.** Perbandingan capaian jumlah komunitas yang diberdayakan BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.55.** Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 dengan target dan realisasi tahun 2015 dan 2016 (Jumlah Komunitas yang diberdayakan)
- Gambar 3.56.** Perbandingan Target dan Capaian Hasil Penilaian Laporan SAKIP Tahun 2017 Balai Besar POM di Jakarta

- Gambar 3.57.** Perbandingan capaian Hasil Penilaian laporan SAKIP tahun 2017 Balai Besar POM di Jakarta dengan target tahun 2019
- Gambar 3.58.** Perbandingan capaian hasil penilaian SAKIP 2017 BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.59.** Perbandingan capaian tahun Hasil Penilaian laporan SAKIP tahun 2017 Balai Besar POM di Jakarta dengan target tahun 2015 dan 2016
- Gambar 3.60.** Perbandingan Persentase target dan realisasi tahun 2017 dengan target dan realisasi tahun 2015 dan 2016 (pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar)
- Gambar 3.61.** Perbandingan Persentase capaian tahun 2017 dengan target renstra (pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar)
- Gambar 3.62.** Perbandingan capaian pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang
- Gambar 3.63.** Perbandingan target dan capaian 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (dokumen tepat waktu)
- Gambar 3.64.** Perbandingan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Jakarta
- Lampiran 2.** Rencana Kerja Tahunan Balai Besar POM di Jakarta
- Lampiran 3.** Perjanjian Kerja Balai Besar POM di Jakarta
- Lampiran 4.** Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan
- Lampiran 5.** Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BBPOM di Jakarta
- Lampiran 6.** Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan
- Lampiran 7.** Pengukuran Efisiensi Kegiatan
- Lampiran 8.** Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat
- Lampiran 9.** Jenis Permohonan Sertifikasi
- Lampiran 10.** Sarnan yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan /  
Pertanyaan
- Lampiran 11.** Tindak Lanjut Kasus Pro-Justitia di Bidang Obat dan Makanan
- Lampiran 12.** Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan  
menurut Kabupaten / Kota Tahun 2017
- Lampiran 13.** Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan menurut  
Kabupaten / Kota Tahun 2017
- Lampiran 14.** Hasil Sampling Dan Pengujian Produk Sediaan Farmasi Dan Makanan Tahun  
2017

# BAB I

# PENDAHULUAN





BADAN POM

## Balai Besar POM di Jakarta





# PENDAHULUAN

## 1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan institusi pengawas di bidang Obat dan Makanan di wilayah propinsi DKI Jakarta mempunyai kegiatan sebagai berikut :

“Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya”

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

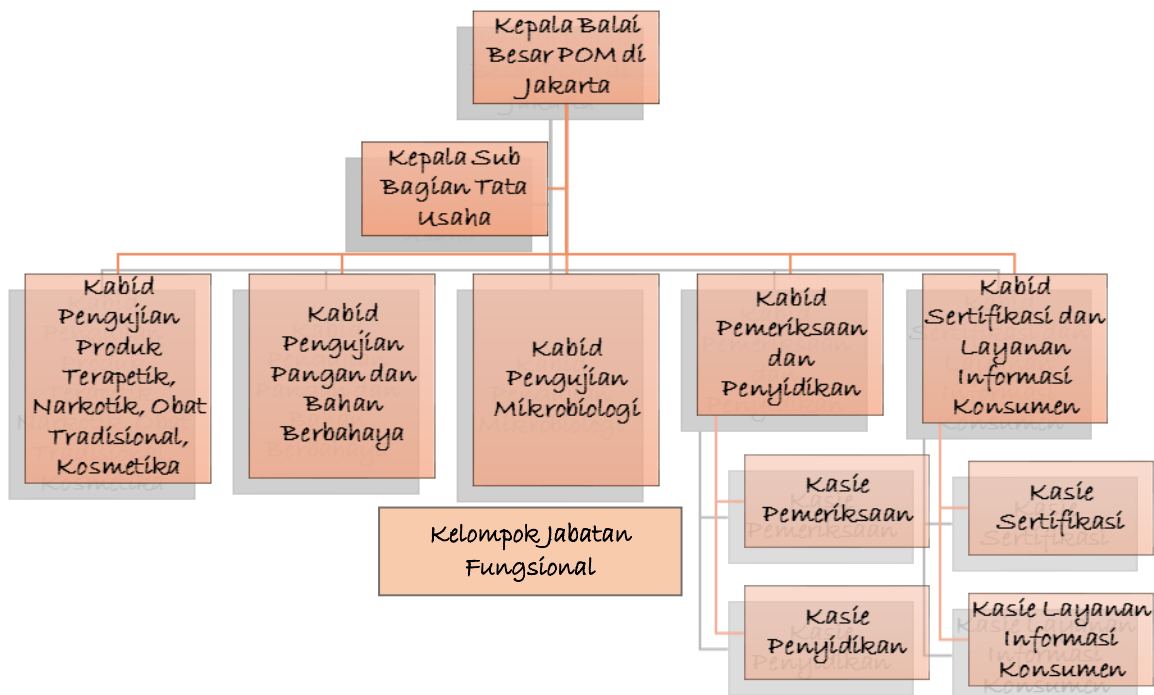
1. Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM
7. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi konsumen
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian Obat dan Makanan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kegiatan utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta pada tahun 2017 sesuai Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, napza, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya

2. Audit Sarana dalam Rangka Sertifikasi, Labelisasi halal, Surveilan
3. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan
4. Peningkatan Kompetensi Petugas Inspektur
5. Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan
6. Peningkatan Kemampuan Fungsi/Kapasitas/Teknis Laboratorium
7. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja di Bidang Pengujian Laboratorium
8. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Pengujian Laboratorium
9. Penyidikan dan Penyelidikan
10. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja di Bidang Penyidikan
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan
12. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja di Bidang Manajerial
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi
14. Perencanaan/ Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan & Penyusunan Kebijakan Teknis Kepegawaian
15. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Manajerial
16. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja di Bidang Layanan Informasi dan Pengaduan
17. Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ Penyuluhan
18. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Layanan Informasi dan Pengaduan
19. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
20. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

## 1.2. Struktur Organisasi



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

**Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen.

**Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan, dan bahan berbahaya.

**Bidang Pengujian Mikrobiologi** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

**Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat

adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

**Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan** menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya;
- d. Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan

(1) **Seksi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

(2) **Seksi Penyidikan** mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.

**Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, dan layanan informasi konsumen.

**Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen** menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen;
- b. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu;
- c. Pelaksanaan layanan informasi konsumen; dan

d. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

(1) **Seksi Sertifikasi** mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.

(2) **Seksi Layanan Informasi Konsumen** mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.

**Sub bagian Tata Usaha** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar.

### **1.3. Aspek Strategis Organisasi**

Aspek strategis di Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, serta aspek strategis dalam mendukung tugas dan fungsi instansi terkait atau peran terhadap perlindungan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1.3.1. Hilirisasi hasil penelitian dan kebijakan pemerintah kepada pelaku UKM obat dan makanan dalam peningkatan daya saing**

Indonesia sangat kaya dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti di Indonesia. Baik itu peneliti yang ada di masing-masing instansi maupun peneliti di perguruan tinggi. Hasil-hasil penelitian ini sebenarnya banyak yang bisa digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan daya saing produk yang di hasilkan. Sayangnya belum banyak dari hasil penelitian ini yang termanfaatkan.

Hal ini menjadi salah satu aspek strategis karena dengan pemanfaatan hasil-hasil penelitian ini untuk masyarakat melalui peran Instansi Pemerintah seperti BBPOM di Jakarta akan meningkatkan daya saing produk UMKM kita.

Hasil Penelitian yang tepat guna misalnya tentang penggunaan bahan tambahan pangan yang bias berfungsi seperti boraks dan tidak berbahaya jika dimanfaatkan pada industry kecil dan para penjaja makanan siap saji akan menghilangkan penggunaan bahan berbahaya boraks pada makanan.

Hilirisasi kebijakan pemerintah juga akan meningkatkan daya saing dalam negeri sehingga masyarakat banyak menikmati hasil dari kinerja pemerintah dengan lebih tepat guna.

#### **1.3.2. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional**

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia yang merupakan pusat perdagangan nasional mempunyai banyak tantangan dalam pengawasan obat dan makanan. Kompleksnya permasalahan di ibukota termasuk dalam distribusi obat dan makanan.

Masuknya produk perdagangan bebas merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang

belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Tanggung jawab yang besar pada pelaku usaha terhadap mutu dan keamanan produknya inilah yang membuat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab sehingga semakin banyak beredar produk kosmetik ilegal dan mengandung Bahan Berbahaya. Selain itu masa peralihan sistem pendaftaran produk dengan sistem notifikasi serta pembaharuan izin produksi kosmetik banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Balai Besar POM di Jakarta memberikan perhatian besar untuk hal ini dengan telah melakukan operasi gabungan terhadap distribusi kosmetik di wilayah Asemka, Pasar Pagi Mangga Dua, Jatinegara dan beberapa wilayah lainnya yang merupakan pusat distribusi kosmetik yang peredarannya ke seluruh Indonesia.

Banyaknya permintaan masyarakat terhadap item obat dan makanan tertentu yang harganya mahal dan sangat laku dipasaran menarik perhatian para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga ditemukan obat dan makanan ilegal di sarana resmi seperti apotek. Hal ini membuat Balai Besar POM di Jakarta harus lebih intensif lagi melakukan pengawasan di peredaran seperti apotek, toko obat ataupun PBF.

Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mencari benang merah pelaku pemalsuan tersebut sehingga produk palsu tidak ada lagi dan tidak beredar baik di sarana resmi maupun lainnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa membuat sistem peredaran obat dan makanan semakin beraneka ragam. Diantaranya adalah peredaran obat dan makanan lewat internet. Alamat distributor dan penjual yang sulit ditelusuri karena sistem penjualan on line. Kesulitan untuk penelusuran mengharuskan Balai POM di Jakarta harus memperketat sistem pengawasan yang dilakukan. Investigasi yang terus menerus dan memperkaya teknik investigasi harus semakin sering dilakukan. Selain itu penelusuran lewat jasa pengiriman harus lebih intensif.

### **1.3.3. Program OK OCE (One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship)**

Apa itu program OK OCE? OK OCE adalah Singkatan One Kecamatan One Centre Entrepreneurship. Salah satu Program mencetak wirausaha baru di DKI Jakarta agar dapat menjadi benchmark di daerah lain. Program OK OCE ini ditujukan untuk mengubah dan memihak kepada pengusaha UMKM dan pengusaha baru.

Adapun fokus program tersebut menysasar pada 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Pemberian modal dan pendampingan usaha
2. Pembangunan SDM melalui mentoring oleh pengusaha sukses
3. Garansi inovasi bekerjasama dengan swasta
4. Lulusan SMK dapat langsung kerja
5. Kredit Khusus untuk ibu-ibu

Dengan adanya program OKEOCE ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing. Disinilah peran Balai Besar POM di Jakarta untuk secara konsisten melakukan pembinaan cara produksi dan distribusi yang baik bagi pelaku usaha obat dan makanan. Balai Besar POM di Jakarta harus memastikan untuk usaha yang dibuat melalui program OK OCE tidak menggunakan bahan berbahaya. Pembinaan kepada PKK dan pemberdayaan ibu-ibu sebagai tulang punggung Pendidikan anak untuk masa depan harus semakin ditingkatkan apalagi ibu-ibu sudah diberi fasilitas kredit khusus melalui program OK OCE.

### **1.3.4. Mall Pelayanan Publik**

Mall Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Di wilayah DKI Jakarta telah diresmikan Mall Pelayanan Publik oleh Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat pada tanggal 12 Oktober 2017 yang melayani 328 jenis pelayanan. Adanya Mall Pelayanan Publik merupakan aspek strategis bagi BBPOM di Jakarta karena sudah waktunya pelayanan publik yang diberikan BBPOM di Jakarta terintegrasi dengan Mall Pelayanan Publik.

### **1.3.5. Posisi strategis pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam meningkatkan daya saing**

Jakarta sebagai ibukota negara memiliki posisi strategis dalam pengawasan obat dan makanan. Tidak hanya sebagai ibukota negara tetapi juga sebagai pusat perdagangan nasional.

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama pemasukan barang di Indonesia menjadi tempat pemasukan utama terhadap impor produk obat dan makanan. Meskipun pengawasan pemasukan barang di pelabuhan telah diperketat namun masih banyak produk obat dan makanan ilegal yang masuk ke wilayah Jakarta. Untuk itu pengawasan secara intensif lebih ditingkatkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya wilayah DKI Jakarta.

Posisi strategis Pengawasan Obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha mikro dan menengah. Semakin konsisten pengawasan dan dengan semangat terus memberikan solusi kepada pelaku usaha obat dan makanan dalam menjalankan usahanya memproduksi dan mendistribusikan obat dan makanan akan meningkatkan daya saing produk yang diproduksi.

### **1.3.6. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)**

Balai Besar POM di Jakarta merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh BPOM.

Beberapa upaya tersebut di atas, telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dan ke depan harus lebih ditingkatkan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara profesional, bertanggungjawab, independen, transparan dan berbasis bukti ilmiah, sesuai dengan amanat dalam SKN.

Yang terkait dengan Balai Besar POM di Jakarta yaitu pengawasan Obat mulai importasi hingga jalur produksi, distribusi hingga pelayanan kesehatan dasar terhadap mutu, keamanan dan khasiat.

### 1.3.7. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan social yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

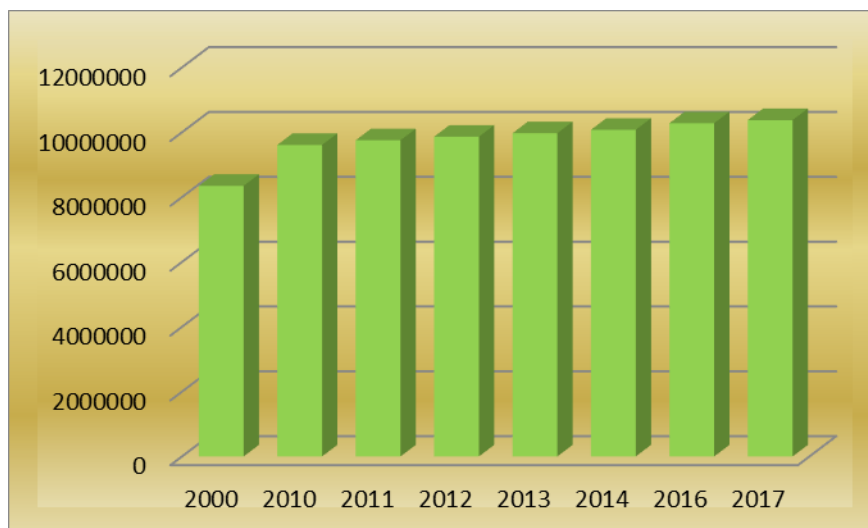
Dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya *demand* Obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan peningkatan kapasitas produksi. Untuk meningkatkan pengawasan post market obat, Balai Besar POM di Jakarta melakukan kerja sama dalam melakukan sampling dengan berbagai dinas terkait. Dari sisi penyediaan (*supply side*) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai Besar POM di Jakarta harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

### 1.3.8. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar 32,5 juta jiwa (sebesar 1,49% per tahun). Dengan laju pertumbuhan sebesar itu, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450 juta jiwa.

Tahun	Jumlah Penduduk
2000	8347100
2010	9607800
2011	9752100
2012	9862100
2013	9969900

2014	10075300
2016	10277628
2017	10374235



Gambar 1.2 Profil Jumlah Penduduk DKI Jakarta tahun 2000, 2010-2017

Dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, maka permintaan terhadap Obat dan Makanan juga akan semakin meningkat, sehingga penawaran dari Obat dan Makanan juga akan meningkat. Potensi pasar yang besar membuat para produsen Obat dan Makanan baik lokal maupun internasional semakin meningkatkan volume produksi maupun variasinya. Bertambahnya jumlah volume produksi dan variasi Obat dan Makanan ini tentunya menuntut semakin besarnya peran Balai Besar POM di Jakarta dalam proses penilaian dan pengawasannya. Kurangnya pemenuhan GMP oleh produsen dalam memproduksi Obat dan Makanan menjadi tantangan Balai Besar POM di Jakarta dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Di samping menyiapkan pemanfaatan Bonus Demografi, juga sudah harus mulai dipikirkan permasalahan-permasalahan yang timbul pasca berakhirnya masa Bonus Demografi, dimana jumlah lansia meningkat.

### 1.3.9. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Provinsi DKI Jakarta memiliki keunikan desentralisasi jika dibandingkan dengan provinsi yang lain dimana Gubernur memiliki kewenangan yang penuh dalam membuat kebijakan pemerintahan, sementara walikota hanya

bertugas sebagai pelaksana kebijakan Gubernur. Hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan bagi Balai Besar POM di Jakarta. Peluang positif dapat diperoleh oleh BBPOM di Jakarta apabila dapat bekerjasama dengan baik dengan pemerintah provinsi (Gubernur) sehingga kebijakan Gubernur akan mendukung pengawasan obat dan makanan. Dengan dukungan dari Gubernur tersebut maka perangkat pemerintah ditingkat bawah akan mengikuti kebijakan Gubernur sehingga akan lebih mudah bagi BBPOM di Jakarta untuk bekerjasama dalam program pengawasan obat dan makanan. Sebaliknya apabila Gubernur tidak mendukung pada program pengawasan obat dan makanan, maka akan sulit menjalin kerjasama ditingkat pemerintahan yang lebih rendah. Untuk itu, BBPOM di Jakarta harus mampu menjalin kerjasama yang baik dengan Gubernur DKI Jakarta untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan di provinsi DKI Jakarta.

#### **1.3.10. Perkembangan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

BBPOM di Jakarta telah melakukan pelayanan online untuk pengujian sampel pihak ketiga.

#### **1.3.11. Jejaring Kerja**

Balai Besar POM di Jakarta menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu Balai Besar POM di Jakarta mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Jaringan yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Jakarta maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki Balai Besar POM di Jakarta yaitu Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pengawasan Barang Beredar.

### 1.3.12. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

#### a. Penataan Tatalaksana

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen BPOM tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan *Quality Management Sistem ISO 9001:2015*; Akreditasi Laboratorium *IEC 17025:2005*;

#### b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan dengan hasil evaluasi KemenPAN-RB tahun 2014 memperoleh nilai B.

Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Namun, BPOM masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas BPOM selaku institusi pengawasan, BPOM telah menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap opini laporan keuangan BPOM dari BPK.

#### c. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang.

Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat,

implementasi *whistle-blowing sistem*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan pendayagunaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam perencanaan dan penganggaran.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah penguatan peran APIP dan unit pengawas fungsional (Inspektorat) sebagai *internal-consultant* yang melaksanakan fungsi pembinaan, penataan, pengawasan, dan pentaatan dengan dukungan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas serta berfokus pada pemeriksaan kinerja berbasis risiko untuk mencegah potensi kesalahan yang mengganggu efektivitas pencapaian sasaran organisasi dan dapat menimbulkan kerugian negara.

#### **d. Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, BPOM telah membentuk *agent of change* sebagai *role model* serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai BPOM secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut :

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kompetensi ASN BBPOM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas</li> <li>✓ Integritas Pelayanan Publik yang diakui secara nasional</li> <li>✓ Networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah</li> <li>✓ Pedoman Pengawasan yang jelas</li> <li>✓ Komitmen Pimpinan yang jelas</li> <li>✓ Sistem pengawasan yang komprehensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak strategis</li> <li>✓ Integrasi beberapa sistem mutu belum efisien</li> <li>✓ Pemenuhan Timeline Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengujian belum optimal</li> <li>✓ Payung hukum Pengawasan Obat dan Makanan belum memadai</li> <li>✓ ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu</li> <li>✓ Sarana prasarana belum optimal</li> <li>✓ Dukungan IT masih kurang</li> </ul>
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia</li> <li>✓ Adanya program Nasional (JKN dan SKN)</li> <li>✓ Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat cepat sebagai sarana KIE</li> <li>✓ Tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga meningkatkan kebutuhan obat dan makanan</li> <li>✓ Dukungan Pemda dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan</li> <li>✓ Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi</li> <li>✓ Menguatnya kewenangan pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan terbaru</li> <li>✓ Rasio SDM usia produktif lebih besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peredaran obat dan makanan ilegal</li> <li>✓ Semakin maraknya penjualan obat dan makanan online</li> <li>✓ Lemahnya penegakan hukum</li> <li>✓ Peningkatan penggunaan produk-produk <i>lifestyle</i></li> <li>✓ Perkembangan jumlah penduduk yang sangat pesat</li> <li>✓ Pasar Global dan perdagangan bebas</li> <li>✓ Peningkatan daya saing pelaku usaha</li> <li>✓ Peningkatan jumlah sarana Produksi dan distribusi obat dan makanan</li> <li>✓ Modus pelanggaran semakin kompleks</li> <li>✓ Tuntutan percepatan pelayanan public</li> <li>✓ Meningkatnya penyebaran informasi <i>hoax</i> terkait obat dan makanan</li> </ul>

Tabel 1.1. Rangkuman Analisis SWOT

#### 1.4. Analisis Lingkungan Strategis

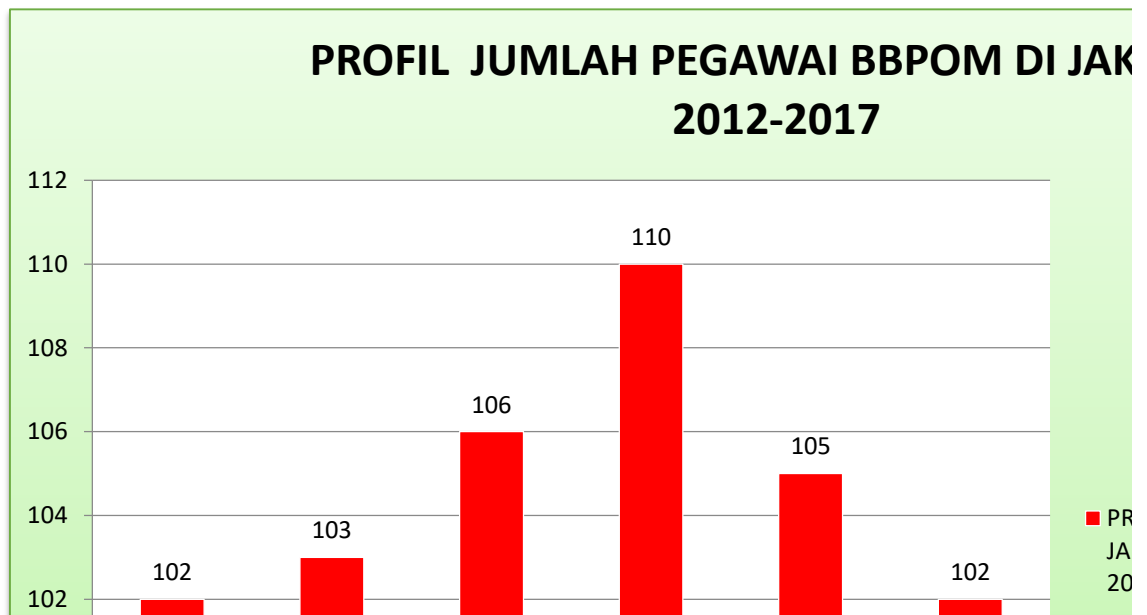
##### LINGKUNGAN INTERNAL

Sejak 1 Januari 2013, Balai Besar POM di Jakarta telah menempati gedung di Jl. Asyafiiyah No. 133 Cilangkap – Jakarta Timur.

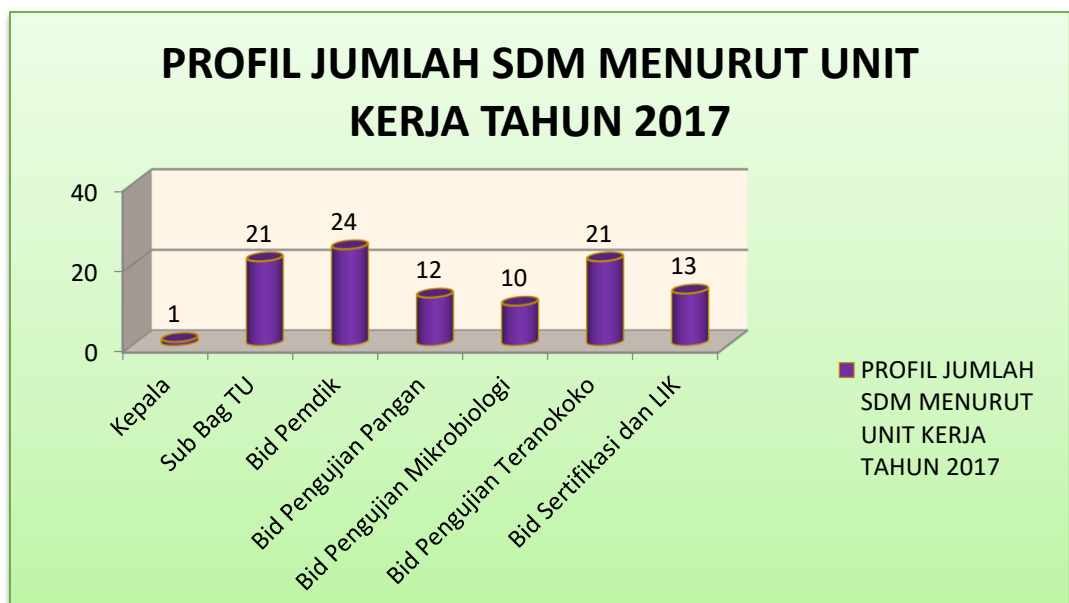
Saat ini Balai Besar POM di Jakarta yang bertipe A, memiliki sarana sebagai berikut :

- A. Luas Tanah : 2.750,00 m<sup>2</sup>
- B. Luas Bangunan : 2.404 m<sup>2</sup>

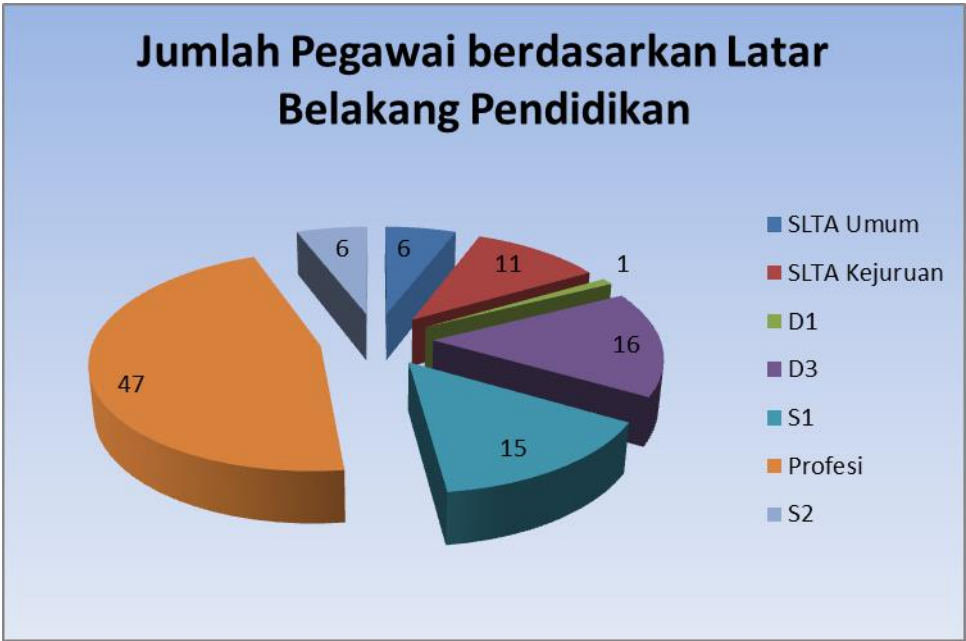
- C. Status Kepemilikan Tanah : Pemerintah RI cq Badan POM RI
- D. Rumah Dinas : Tidak ada
- E. Penerangan :
1. PLN : 515 KVA (220V)
  2. Generator : 635 KVA / 635 KW
- F. Sarana Komunikasi :
- Nomor Telepon : (021) 84304048 / 46
  - Nomor Faximil : (021) 84304047 / 49
  - Alamat e-mail : bpom\_jakarta@pom.go.id /  
bbpomjkt@gmail.com
  - Facebook : BBPOM Jakarta
  - Twitter : @BPOMJakarta
  - Instagram : @bpomjakarta
- G. Sumber air : Sumur Bor
- H. Kendaraan (Layak Pakai) : 4 kendaraan roda 2  
12 kendaraan operasional roda 4
- I. Sumber Daya Manusia (jumlah menurut usia, unit kerja, dan strata pendidikan) Sumber daya manusia atau jumlah pegawai yang ada di Balai Besar POM di Jakarta tahun anggaran 2017 adalah sebanyak total 102 pegawai dengan rincian dapat dilihat di tabel 9 dan 10. Perbandingan jumlah pegawai di Balai Besar POM di Jakarta sejak tahun 2012 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



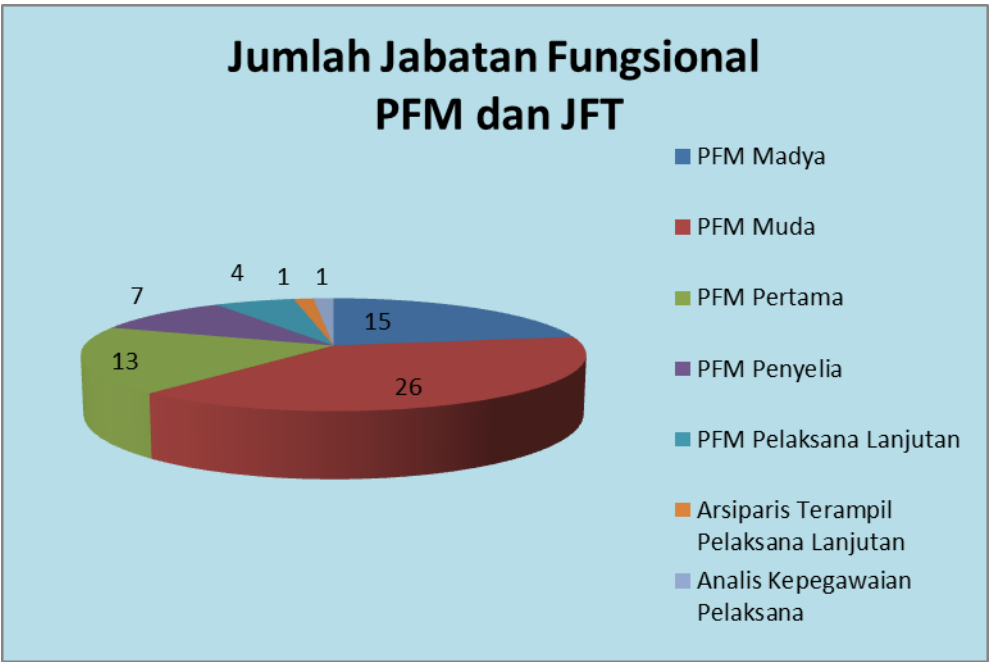
Gambar 1.3. Profil Jumlah Pegawai BBPOM di Jakarta



Gambar 1.4. Profil Jumlah SDM Menurut Unit Kerja



Gambar 1.5. Pendidikan Pegawai BBPOM di Jakarta



Gambar 1.6. Jumlah PFM Pegawai BBPOM di Jakarta

## LINGKUNGAN EKSTERNAL

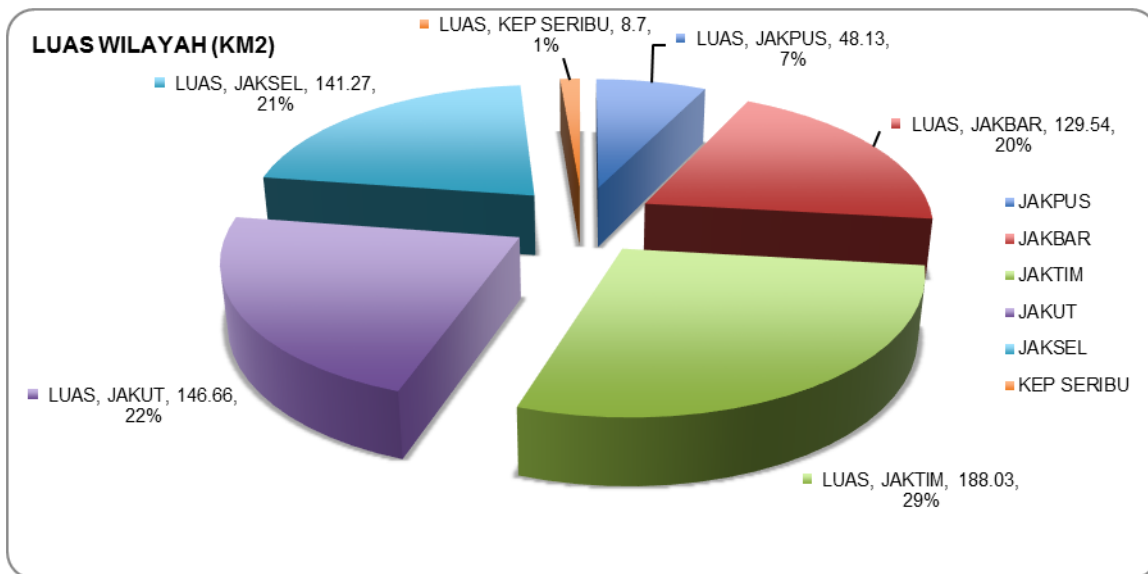
### I. Data Umum Wilayah Kerja

#### A. Luas wilayah kerja (km<sup>2</sup>)

Sesuai Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.00.05.21.3592 tahun 2007 Tanggal 9 Mei 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Kepala Badan POM No. OT.01.01.21.3724 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.3592 tanggal 9 Mei 2007 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM, maka cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut :

#### 1. Cakupan Wilayah DKI Jakarta tahun 2016<sup>(1)</sup>

a. Luas wilayah Jakarta Pusat	= 48,13 Km <sup>2</sup>
b. Luas wilayah Jakarta Barat	= 129,54 Km <sup>2</sup>
c. Luas wilayah Jakarta Timur	= 188,03 Km <sup>2</sup>
d. Luas wilayah Jakarta Utara	= 146,66 Km <sup>2</sup>
e. Luas wilayah Jakarta Selatan	= 141,27 Km <sup>2</sup>
f. Luas wilayah Adm. Kab. Kepulauan Seribu	= 8,70 Km <sup>2</sup>
Total luas wilayah DKI Jakarta	= 662,33 Km <sup>2</sup>



Gambar 1.7. Luas Wilayah DKI Jakarta

## B. Jumlah Kabupaten / kota

Cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta terdiri dari wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

## C. Pola transportasi BBPOM di Jakarta ke wilayah kerja

Umumnya transpor yang digunakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta adalah melalui darat menggunakan kendaraan dinas, kendaraan umum atau kendaraan pribadi.

Pola transportasi Balai Besar POM di Jakarta kewilayah kerja dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Melalui darat : 99,00 %
- b. Melalui laut : 1,00 %

## D. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia memberikan dampak yang pesat terhadap pertumbuhan ekonomi di bidang jasa dan perdagangan yang menyebabkan banyaknya jumlah penduduk pendatang sehingga jumlah kendaraan yang ada juga relatif lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya prasarana jalan yang ada, hal ini sering terjadi kemacetan lalu lintas pada saat hari kerja.

Lama waktu perjalanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dapat dirinci sebagai berikut :

Rata – rata : 1,5 jam

Paling lama : 4,0 jam

Paling singkat : 0,5 jam

#### **E. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja**

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan di satu wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dapat dirinci sebagai berikut:

Rata – rata : 8,0 jam

Paling lama : 3,0 hari

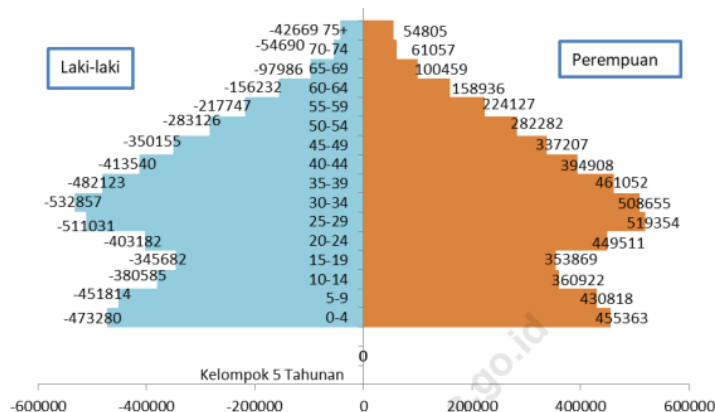
Paling singkat : 0,5 jam

## **II. Data Demografi**

### **A. Jumlah dan persentase penduduk perempuan menurut kabupaten/kota**

Jumlah penduduk yang terdapat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2017 adalah sebagai berikut :<sup>(1)</sup>

a. Kabupaten Adm Kepulauan Seribu	= 23.826 jiwa
b. Kota Administrasi Jakarta Selatan	= 2.221.795 jiwa
c. Kota Administrasi Jakarta Timur	= 2.886.804 jiwa
d. Kota Administrasi Jakarta Pusat	= 920.448 jiwa
e. Kota Administrasi Jakarta Barat	= 2.520.019 jiwa
f. Kota Administrasi Jakarta Utara	= 1.777.131 jiwa
Total jumlah penduduk perempuan DKI Jakarta	= 10.350.023 jiwa



Gambar 1.8. Piramida Penduduk DKI Jakarta Tahun 2017

Secara umum berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak yang berumur antara 25 sampai dengan 29, sedangkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak berumur 30 sampai dengan 35.

#### B. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kabupaten/kota

Laju pertumbuhan penduduk per tahun menurut kabupaten/kota menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa di setiap kab/kotamadya mengalami peningkatan jumlah penduduk.

Kabupaten/kota	Penduduk		Laju Pertumbuhan		Kepadatan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Kepulauan Seribu	23.616	23.897	1,18	1,19	2.714	2.747
Jakarta Selatan	2.206.732	2.226.830	0,96	0,91	15.621	15.763
Jakarta Timur	2.868.910	2.892.783	0,88	0,83	15.258	15.385
Jakarta Pusat	917.754	921.344	0,39	0,39	19.068	19.143
Jakarta Barat	2.496.002	2.528.065	1,32	1,28	19.268	19.516
Jakarta Utara	1.764.614	1.781.316	0,99	0,95	12.032	12.146
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>10.277.628</b>	<b>10.374.235</b>	<b>0,98</b>	<b>0,94</b>	<b>15.517</b>	<b>15.663</b>

Tabel 1.2. Persentase laju pertumbuhan penduduk

### C. Status pendidikan penduduk DKI Jakarta di atas usia 10 tahun berdasarkan Kabupaten/kota

Data dari BPS menunjukkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status pendidikan dan Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta tahun 2017.

<b>Status Pendidikan</b>	<b>Kep. Seribu</b>	<b>Jakarta Selatan</b>	<b>Jakarta Timur</b>	<b>Jakarta Pusat</b>	<b>Jakarta Barat</b>	<b>Jakarta Utara</b>
<b>Tidak/belum pernah sekolah</b>	1,53	0,43	1,01	0,59	1,04	0,97
<b>Masih Sekolah</b>	22,40	17,26	18,17	15,47	17,35	16,02
<b>SD Sederajat</b>	7,65	5,24	6,00	4,97	5,39	5,33
<b>SLTP Sederajat</b>	9,15	4,84	4,48	3,92	4,87	4,67
<b>SLTA Sederajat</b>	4,94	3,82	3,73	3,32	3,96	3,92
<b>D1-Universitas</b>	0,66	3,35	3,96	3,26	3,13	3,29
<b>Tidak bersekolah lagi</b>	76,08	82,31	80,76	83,94	81,61	83,01
<b>Jumlah</b>	100	100	100	100	100	100

Tabel 1.3. Persentase penduduk di atas 10 tahun menurut status pendidikan

### D. Laju pertumbuhan pendapatan regional kapita DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2013-2016 pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan tren melambat, namun tetap tumbuh positif di atas angka pertumbuhan nasional. Pada semester pertama 2017, terjadi sedikit percepatan dimana ekonomi Jakarta berhasil tumbuh 5,96%. Sektor informasi dan komunikasi menjadi sumber pertumbuhan terbesar ekonomi Jakarta, sekaligus menjadi sektor dengan laju pertumbuhan paling tinggi pada semester pertama 2017.

Tahun	Laju Pertumbuhan pendapatan regional
2013	6,07%
2014	5,91%
2015	5,89%
2016	5,85%
2017 semester I	5,96%

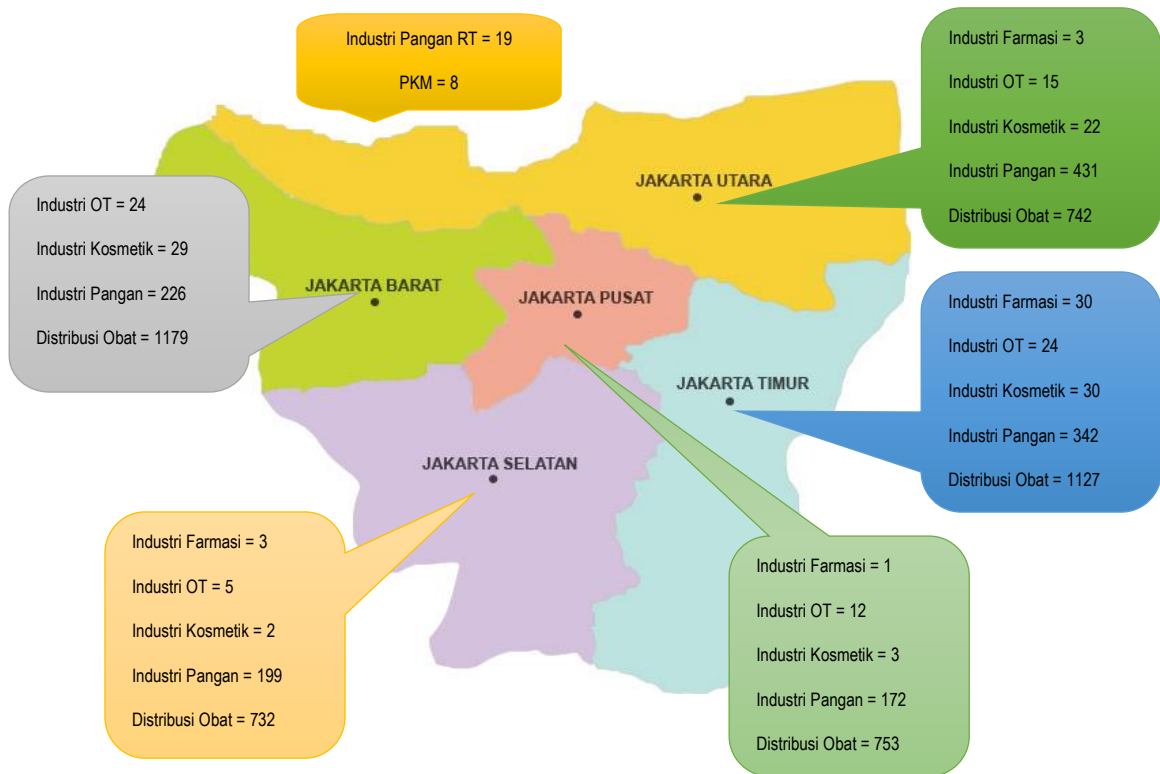
Tabel 1.4. Laju Pendapatan Regional DKI Jakarta

### III. Jumlah Sasaran Pengawasan

Jumlah sasaran pengawasan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2017 sebagai berikut :

NAMA SARANA	JUMLAH
IND.FARMASI	37
IND. OBAT TRADISIONAL	19
IND. KECIL OBAT TRADISIONAL	61
IND.KOSMETIK	86
IND. PANGAN	82
IND. RUMAH TANGGA PANGAN	1305
IND. MINUMAN BERALKOHOL	2
PBF OBAT JADI /PBF BAHAN OBAT	480
APOTEK	2723
TOKO OBAT	853
RS PEMERINTAH	31
RS SWASTA, dll	113
DIST. OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	226
DIST. KOSMETIK	462
DIST.PANGAN	3217
DIST BAHAN BERBAHAYA	29
INSTALASI FARMASI PENYIMPANAN KOTAMADYA/PROVINSI (GUDANG FARMASI)	6

Tabel 1.5. Sasaran Pengawasan tahun 2017



Gambar 1.9. Peta Wilayah Sasaran Pengawasan

### 1.5. Isu Strategis

Balai Besar POM di Jakarta mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang pengawasan obat dan makanan, baik pengawasan sebelum dan sesudah pemasaran. Obat dan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik dan benar serta disalahgunakan. Oleh karena itu, perlu disusun dan dilaksanakan aturan-aturan yang sejalan dengan *Good Regulatory Practices*, sehingga obat dan makanan tersebut mempunyai keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan di peredaran.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut, Balai Besar POM di Jakarta selalu menerapkan nilai budaya organisasi yang telah disepakati yaitu profesional, integritas, kredibilitas, cepat tanggap, kerja sama tim, serta inovatif dengan tetap memperhatikan aspek yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh perubahan dinamis lingkungan strategis yang berada disekitarnya baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Berbagai isu strategis yang mempengaruhi kinerja antara lain :

### **1. Peredaran Obat Obat Tertentu (OOT)**

Penyalahgunaan obat-obatan tertentu, diantaranya Tramadol, Trihexyphenidil, dan Carisoprodol di kalangan remaja dan pemuda, terutama di wilayah DKI Jakarta, akhir – akhir ini cukup marak ditemui. Hal ini dimungkinkan karena harganya yang murah dan dijual di tempat-tempat yang tidak resmi seperti toko obat tak berizin. Penyalahgunaan obat-obatan ini rawan menimbulkan penyakit-penyakit sosial yang meresahkan masyarakat, bahkan memakan korban jiwa seperti tawuran antar pelajar, kebut-kebutan di jalan raya, pengeroyokan oleh geng motor, dan lain-lain.

Balai Besar POM Jakarta perlu mengeratkan kerjasama dengan lintas sektor seperti Kepolisian, Bea Cukai, Pomdam Jaya, untuk secara terpadu melakukan pemberantasan penyalahgunaan Obat.

### **2. Peredaran Obat yang diduga palsu/substandar**

Banyaknya permintaan masyarakat terhadap *item* obat-obat tertentu yang harganya mahal dan sangat laku dipasaran menarik perhatian para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga ditemukan obat ilegal di sarana resmi seperti apotek. Hal ini membuat Balai Besar POM di Jakarta harus lebih intensif dalam melakukan pengawasan di peredaran seperti apotek, toko obat, ataupun PBF.

Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mencari benang merah pelaku pemalsuan tersebut sehingga produk palsu tidak ada lagi dan tidak beredar baik di sarana resmi maupun lainnya.

### **3. Peredaran Produk Obat dan Makanan Ilegal di Media Online**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa membuat sistem peredaran obat dan makanan semakin beraneka ragam, diantaranya adalah peredaran obat dan makanan melalui internet. Alamat distributor dan penjual sulit ditelusuri karena sistem penjualan *online*. Kesulitan dalam penelusuran mengharuskan Balai Besar POM di Jakarta memperketat sistem pengawasan yang dilakukan. Investigasi terus menerus dan memperkaya

teknik investigasi harus semakin sering dilakukan. Selain itu penelusuran melalui jasa pengiriman harus lebih intensif.

#### **4. Peredaran Produk Pangan Ilegal**

Peredaran produk pangan ilegal di wilayah DKI Jakarta masih ditemukan terutama saat menjelang hari raya dan akhir tahun. Beberapa sarana distribusi masih menjual produk tersebut. Produk ini masuk ke wilayah Jakarta melalui jasa ekspedisi dan barang tentengan perorangan. Pengawasan produk pangan ilegal ini harus dilakukan secara terus menerus agar tidak beredar lagi di wilayah DKI Jakarta.

#### **5. Peredaran Produk Pangan mengandung bahan berbahaya dan peredaran Bahan Berbahaya yang Sering Disalahgunakan pada Produk Pangan**

Keinginan pelaku usaha agar produk pangan yang diproduksi dan didistribusikannya bertahan lama, mempunyai penampilan menarik, dan harga murah membuat banyaknya penggunaan bahan berbahaya pada pangan. Bahan berbahayaseperti formalin, boraks, *Rhodamin B* dan *Methanyl Yellow*, sering digunakan pada pangan olahan.

Salah satu usaha Balai Besar POM di Jakarta adalah melakukan intensifikasi pengawasan dan penelusuran produk pangan mengandung bahan berbahaya dan bahan berbahaya pada jalur produksi dan distribusi. Selain itu juga sampling dan pengujian terus menerus terhadap produk pangan jajanan pasar dan pangan jajanan anak sekolah menggunakan *test kit* pada mobil laboratorium keliling.

#### **6. Beredarnya Produk Kosmetik Ilegal dan/atau mengandung Bahan Dilarang**

Sejak Indonesia mengikuti harmonisasi ASEAN tanggal 1 Januari 2011 maka sistem pendaftaran produk kosmetik telah beralih ke sistem notifikasi. Sistem ini memberikan tanggung jawab yang besar bagi produsen dan importir terhadap mutu keamanan dan khasiat produk yang diproduksi dan diedarkan. Untuk itu produsen atau importir harus menyusun Dokumen Informasi Produk (DIP) sebelum menotifikasikan produknya ke Badan POM.

## **7. Gerobak Obat dan Toko Obat Kuat**

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia yang merupakan pusat perdagangan nasional mempunyai banyak tantangan dalam pengawasan obat dan makanan. Distribusi obat termasuk dalam permasalahan yang kompleks di ibukota. Salah satunya adalah maraknya penjualan obat dan obat kuat dengan menggunakan gerobak maupun toko obat ilegal. Gerobak/toko obat ini banyak bermunculan, terutama pada malam hari. Para pedagang ini menjual obat keras termasuk obat kuat dan obat tradisional ilegal. Penjualan obat ini sudah diatur dalam perundangan-undangan, oleh karena itu Balai Besar POM di Jakarta harus meningkatkan intensitas pengawasan. Balai Besar POM di Jakarta harus meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor yang terkait.

## **8. Koordinasi Lintas Sektor**

Maraknya pelanggaran di bidang obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta dan tingginya potensi kerawanan yang terjadi membuat BBPOM di Jakarta sangat perlu untuk mempererat jalinan kerjasama dengan seluruh lintas sector terkait, baik dari lini pemerintah maupun dari sector swasta / masyarakat.

Balai Besar POM di Jakarta memberikan perhatian besar untuk hal ini dengan melakukan kerjasama dengan Bea Cukai, BIN Daerah, BNNP, Asperindo, ALFI, PPATK, BPS, APPBI, Pajak, serta Kepolisian dan Kejaksaan

## **9. Terbitnya Permenkes no 9 tahun 2017 tentang Apotek**

PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kefarmasian pada masyarakat. Dengan terbitnya PMK ini dapat mendukung kualitas pengawasan Petugas BBPOM di Jakarta pada sarana pelayanan kefarmasian, khususnya untuk menindaklanjuti juga pencabutan Permenkes No. 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat maupun pemenuhan persyaratan perizinan baru untuk apotek. Sehingga diharapkan peredaran obat dapat lebih terkendali pada sarana yang tepat dan mengurangi resiko diversi obat.

## **10. Terbitnya Inpres 3 tahun 2017**

Penguatan kelembagaan Badan POM yang telah diamini oleh banyak kalangan di masyarakat, legislator dan eksekutor telah mendorong terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2017. Hal ini juga berdampak pada dukungan lintas sektor di lingkungan Pemda DKI Jakarta dengan komitmen Gubernur Propinsi DKI Jakarta yang

menetapkan Ingub Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta. Ingub ini membagi peran strategis beberapa SKPD, yakni Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas UMKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, untuk bersama-sama BBPOM di Jakarta melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta.

#### **11. Penandatanganan MoU antara Bea Cukai dan Badan POM**

Tanggal 19 Mei 2017 menjadi awal komitmen kerjasama yang lebih efektif antara Badan POM dan Ditjen Bea dan Cukai, dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama tentang Pengawasan Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Obat dan Makanan. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama yaitu Penguatan Koordinasi Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengawasan; Koordinasi dalam Penyusunan Peraturan UU; Peningkatan Kegiatan KIE; Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pertukaran Data dan Informasi, menjadi pedoman BBPOM di Jakarta dalam mengimplementasikan kerjasama tersebut di wilayah Jakarta. Bentuk konkret implementasi tersebut BBPOM di Jakarta melakukan kegiatan pertemuan koordinasi, *join border inspection* serta tukar menukar informasi intelijen bersama Kanwil DJBC Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi pengawasan obat dan makanan. Pada tahun berikutnya akan dilanjutkan dengan kerjasama yang serupa maupun lebih berkembang khususnya dalam penanganan perkara dengan pendekatan *Multi-Door Sistem*

#### **12. Berkembangnya modus kejahatan di bidang obat dan makanan**

Pergeseran gaya hidup masyarakat dalam mengkonsumsi produk impor, yang juga dipengaruhi oleh makin tipisnya entry barrier perdagangan antar negara, membuat pemasukan dan peredaran obat dan makanan ilegal semakin diminati oleh pelaku kejahatan untuk mencari keuntungan materi. Modus kejahatan dibidang ini pun makin berkembang dan lebih sulit terdeteksi. Namun kualitas investigasi yang semakin meningkat pun tetap dapat mengungkap modus yang sebelumnya tidak terungkap. Pada tahun ini PPNS BBPOM di Jakarta dapat mengungkap pola jalur masuk pangan impor ilegal secara tentengan terorganisir serta penggantian label maupun tanggal kadaluwarsa,

yang selanjutnya pangan tersebut dijual langsung kepada masyarakat maupun melalui restoran siap saji di kota-kota besar.

### **13. Penerapan ISO 2001 : 2015**

Kewajiban penerapan ISO 2001 : 2015 sebelum bulan Agustus 2017 merupakan tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Jakarta, karena terdapat perubahan fundamental terkait peralihan dari penerapan ISO 2001 : 2008 menjadi ISO 2001 : 2015. Penyesuaian tersebut terkait dengan SOP Makro dan SOP Mikro yang akan mengatur bisnis proses di Balai Besar POM di Jakarta. Diperlukan komitmen tinggi dari semua personil Balai Besar POM di Jakarta agar peralihan tersebut dapat berjalan dengan baik.

### **14. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan BPK dan APIP bertujuan untuk meningkatkan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan Visi Badan POM yaitu “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”.

Saat ini telah dilakukan pemetaan SPIP Balai Besar POM di Jakarta, melaksanakan pemetaan resiko serta melakukan kajian terhadap resiko tersebut untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi.

### **15. Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah**

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) memiliki peran strategis dalam pemenuhan gizi dan pemeliharaan ketahanan belajar anak sekolah.

Masalah pada PJAS mencakup masalah keamanan pangan (sumber cemaran bakteri/mikroba, cemaran kimia/bahan berbahaya dan cemaran fisik) dan masalah mutu serta gizi (nilai gizi rendah, komposisi zat gizi tidak seimbang).

Komunitas sekolah diharapkan memiliki kemandirian untuk mengawasi pangan jajanan anak sekolah di lingkungannya.

Untuk itu diperlukan fasilitator keamanan pangan sekolah yang bertugas mendampingi, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat (keluarga dan komunitas sekolah) akan pentingnya praktek keamanan pangan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan *awareness* keamanan pangan sekolah dan ketersediaan Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah di provinsi DKI Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Bimbingan Teknis Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah berbasis web (*e-learning* Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah) untuk seluruh sekolah tingkat dasar dan menengah.

Diharapkan Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah dapat mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan penerapan keamanan pangan di sekolah.

#### **16. Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam peningkatan keamanan pangan**

Pramuka sebagai bagian dari unsur masyarakat merupakan segmen yang potensial untuk menjadi pionir dalam mengawal keamanan pangan. Melalui Pramuka Sadar Pangan Aman (SAPA), anggota Pramuka ditingkatkan motivasi dan kepeduliannya terhadap masalah keamanan pangan.

Dalam hal ini, Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta sebagai upaya memberdayakan anggota Pramuka dalam mengawal keamanan pangan.

Aplikasi Pramuka SAPA dapat digunakan sebagai media bagi anggota Pramuka dalam melakukan pengawasan terhadap pangan rusak dan kadaluwarsa yang dijual serta melaporkan ke Badan POM. Dalam hal ini, pemberian pembekalan / pelatihan perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan fasilitator atau kader keamanan pangan dari komunitas Pramuka. Disamping itu diharapkan keamanan pangan dapat masuk dalam kurikulum pendidikan/pelatihan di organisasi Pramuka dan sebagai salah satu Tanda Kecakapan Khusus Pramuka.

#### **17. Peran Akademisi / Perguruan Tinggi dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan**

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi memegang peranan penting dalam mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan.

Kegiatan yang dapat disinergikan dengan peran Perguruan Tinggi antara lain penyelenggaraan pelatihan/workshop/seminar bersama di bidang pengawasan obat dan makanan, penelitian dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan, pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan obat dan makanan, pemanfaatan sumber daya manusia untuk mendukung program pengawasan obat dan makanan serta pengembangan institusi pendidikan, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Sejalan dengan itu, Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kemitraan dengan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (UI) melalui Komitmen Bersama tentang Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

#### **18. Sarana dan prasarana kantor**

Saat ini Balai Besar POM di Jakarta menempati area dengan luas tanah 2.750,00 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 2.404 m<sup>2</sup>. Kondisi tersebut sangat tidak memadai mengingat kompleksitas pengawasan BBPOM di Jakarta sangat tinggi. Untuk memenuhi tantangan tersebut BBPOM di Jakarta harus mampu melaksanakan pengawasan secara komprehensif, yang saat ini terasa kurang optimal. BBPOM di Jakarta tidak dapat memenuhi Perka badan POM RI No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan BPOM yang dikeluarkan oleh Badan POM terkalit keterbatasan ruang untuk pengembangan.

#### **19. Lokasi Kantor**

Saat ini BBPOM berlokasi di Jl. As'Syafiiyah No. 133 Cilangkap, Jakarta Timur.



Gambar 1.10. Peta Lokasi Balai Besar POM di Jakarta

Lokasi tersebut sangat tidak strategis bagi pelaksanaan tupoksi pengawasan OM di wilayah DKI Jakarta mengingat kondisi jalan dan lalu lintas di ibukota Jakarta yang sangat padat.

Untuk melakukan pengawasan di wilayah Jakarta utara atau barat, petugas memerlukan waktu tempuh keberangkatan mulai dari minimal 2 jam hingga maksimal 3 jam; dan waktu kembali yang lebih lama mengingat lalu lintas lebih padat karena lokasi kantor yang searah dengan lokasi pemukiman warga yang bekerja di wilayah perkantoran di pusat kota. Hal ini tentu saja mengurangi efektifitas pengawasan yang dapat dilakukan oleh BBPOM di Jakarta.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN MANAJEMEN NEGARA  
PENINGKATAN KOMPETENS PETUGAS  
DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI  
Sehat, Mandiri dan Disiplin  
BERSAMA SAMA MENYERUAI PERUBAHAN



## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**



# PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2015-2019 telah disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan POM 2015-2019. Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta, mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala atau tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator serta cara pencapaian tujuan tersebut akan diuraikan dalam bab ini.



## TUJUAN YANG AKAN DICAPAI



Gambar 2.1 Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019, dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

### 1. **Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan Balai Besar POM di Jakarta tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Jakarta merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. **Pertama**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. **Kedua**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. **Ketiga**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada akhir 2019,
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 84% pada akhir 2019,
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 93% pada akhir 2019,
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 83% pada akhir 2019,
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada akhir 2019.

## **2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Balai Besar POM di Jakarta bertugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Kerjasama yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat Balai Besar POM di Jakarta. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis, dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi tingkat kepentingan setiap lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor swasta dan kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang menjadi mandat Balai Besar POM di Jakarta, dan menentukan indikator bersama atas keberhasilan program kerjasama. Kerjasama dan kemitraan dapat dilakukan dengan saling mendukung serta berbagi sumber daya (dana, program atau SDM) yang tersedia di masing-masing lembaga dengan terlebih dahulu menentukan tujuan dan kerangka kerjasamanya, atau dengan “mendelegasikan” program-program yang ada di Balai Besar POM di Jakarta kepada lembaga/ kelompok masyarakat yang memiliki program yang sejalan dengan Balai Besar POM di Jakarta dengan mendukung pembiayaan program lembaga tersebut. Untuk memastikan bahwa kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka harus disusun kesepakatan (MoU) yang mengikat kedua belah pihak dengan mengacu pada tujuan kerjasama yang telah disepakati termasuk mekanisme dan sistem monitoring dan evaluasi.

Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk itu, 5 (lima) tahun ke depan, Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan pertemuan koordinasi

dengan dinas terkait, setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini diutamakan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawasan obat dalam JKN.

Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan target dengan target 82,6 pada akhir 2019, dan
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, dengan target kumulatif sebanyak 6 Kabupaten/Kota pada akhir 2019.

### **3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikatornya adalah:

1. Nilai SAKIP BBPOM Jakarta , dengan target A pada tahun 2019.

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
<b>Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa</b>	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat*); 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat; *) 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; *) 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat; *) 5. Persentase makanan yang memenuhi *syarat*).
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat; *) 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM		Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Jakarta dari Badan POM.

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM

\*) Indikator Kinerja Utama

Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama BPOM adalah :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat;
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat;
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;
4. Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat:

5. Persentase makanan yang memenuhi syarat;
6. Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2015-2019

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Base line	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
<b>SS 1</b>	<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>							
1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi DKI Jakarta	92.00	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00
1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi DKI Jakarta	70.00	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00
1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi DKI Jakarta	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00
1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi DKI Jakarta	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00
1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi DKI Jakarta	87.60	88.10	88.60	89.10	89.60	90.10
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan</b>							
2.1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi DKI Jakarta	82.40	82,5	82,5	82,5	82,6	82,6
2.2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi DKI Jakarta	6	6	6	6	6	6
<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>							
3.1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	Provinsi DKI Jakarta	B	B	B	A	A	A

Tabel 2.2. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2015-2019

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Alokasi Anggaran (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	27,49312	30,29353	35,096446	42,265735	49,80855024

Tabel 2.3. Rencana Alokasi Anggaran 2015-2019

Pada tahun 2017 dilakukan revisi Renstra. Untuk Balai Besar POM di Jakarta melakukan penyesuaian target terhadap beberapa indikator yaitu jumlah layanan publik, nilai SAKIP, dapat dibaca pada table berikut ini :

Sasaran (Outcome)/Sasaran (Output)/Indikator	Program Kegiatan	Lokasi	Baseline	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
<b>Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia</b>								
S S 3	Jumlah layanan publik	Provinsi DKI Jakarta	715	720	725	2000	2050	2100
	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>							
	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	Provinsi DKI Jakarta	B	B	B	A	72 (BB)	73 (BB)

Tabel 2.4 Revisi Renstra

Terjadi peningkatan jumlah layanan public karena keberhasilan koordinasi dan advokasi Lintas Sektor sehingga pada tahun 2017 terjadi peningkatan layanan sampel pihak ke 3 yaitu untuk alat kesehatan dan Perlengkapan Kesehatan Rumah Tangga. Sampel berasal dari Kementerian Kesehatan. Seiring dengan penambahan jumlah sampel juga meningkat jumlah Penerimaan PNPB BBPOM di Jakarta. Peningkatan jumlah sampel secara signifikan ini mengharuskan BBPOM di Jakarta harus merevisi target untuk jumlah layanan publik.

Untuk indikator nilai SAKIP juga harus direvisi mengingat target A pada akhir RPJMN tahun 2019 tidak mungkin tercapai karena tidak adanya system pengukuran kinerja secara elektronik. Berdasarkan perencanaan kegiatan dan anggaran sampai tahun 2019 belum ada pengadaan pengukuran Kinerja secara Elektronik. Sehingga target sampai akhir RPJMN tahun 2019 dengan nilai 73 (BB)

Secara detail berikut table Review Renstra BBPOM di Jakarta

NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA										IDENTIFIKASI MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	INDIKATOR	USULAN PERUBAHAN					ASUMSI	RISIKO	
			TARGET					REALISASI			CAPAIAN (%)					TARGET							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	TW1 2017	2015	2016				TW1 2017	2015	2016	2017	2018			2019
SS 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat 1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat 1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat 1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat 1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00	99.28%	98.82%	97.67	107.91%	119.86%	105.02%	Tidak ada kendala dan tidak merubah target			92.00	92.50	93.00	93.50	94.00		
		80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	75.81%	80.20%	80.00	94.76%	100.00%	97.56%				80.00	81.00	82.00	83.00	84.00			
		89.00	90.00	91.00	92.00	93.00	96.57%	98.33%	100.00	108.51%	109.26%	109.89%				89.00	90.00	91.00	92.00	93.00			
		79.00	80.00	81.00	82.00	83.00	97.71%	100.00%	100.00	123.68%	125.00%	123.46%				79.00	80.00	81.00	82.00	83.00			
		88.10	88.60	89.10	89.60	90.10	88.38%	88.82%	87.72	100.32%	100.25%	98.45%				88.10	88.60	89.10	89.60	90.10			
SS 2	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat 2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	82,5	82,5	82,5	82,6	82,6	82.52%	82.51%		100.02%	100.01%		Tidak terjadi direvisi			82,5	82,5	82,5	82,6	82,6		
			6	6	6	6	6	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	Tidak direvisi			6	6	6	6	6		

NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA										IDENTIFIKASI MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	INDIKATOR	USULAN PERUBAHAN					ASUMSI	RISIKO	
			TARGET					REALISASI			CAPAIAN (%)					TARGET							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	TW1 2017	2015	2016				TW1 2017	2015	2016	2017	2018			2019
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)			(6)			(7)	(8)	(9)	(10)					(11)	(12)
SS 3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	B	B	A	A	A	B	B (Nilai 65)	BB	100.00%	B (Nilai 67.71)	87.64%	Capaian Nilai SAKIP A tidak akan tercapai selama sistem pelaporan internal di Badan POM belum tersedia			B	B	A	BB (72)	BB (73)		
SP 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	92.00	92.50	93.00	93.50	94.00	99.28%	98.82%	97.67	107.91%	106.83%	105.02%	Tidak ada masalah dalam pencapaian target			92.00	92.50	93.00	93.50	94.00		
		1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00	75.81%	80.20%	95.00	94.76%	99.01%	97.56%				80.00	81.00	82.00	83.00	84.00		
		1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00	96.57%	98.33%	100.00	108.51%	109.26%	109.89%				89.00	90.00	91.00	92.00	93.00		
		1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79.00	80.00	81.00	82.00	83.00	97.71%	100.00%	100.00	123.68%	125.00%	123.46%				79.00	80.00	81.00	82.00	83.00		
		1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	88.10	88.60	89.10	89.60	90.10	88.38%	88.82%	87.72	100.32%	100.25%	98.45%				88.10	88.60	89.10	89.60	90.10		

NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA										IDENTIFIKASI MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	USULAN PERUBAHAN								
			TARGET					REALISASI			CAPAIAN (%)				INDIKATOR	TARGET					ASUMSI	RISIKO	
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	TW1 2017	2015	2016				TW1 2017	2015	2016	2017	2018			2019
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)			(6)		(7)	(8)	(9)	(10)					(11)	(12)	
SP 2	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,5	<b>82,5</b>	82,5	82,6	82,6	82.52%	82.51%		100.02%	100.01%	#DIV/0!	Tidak ada masalah dalam pencapaian target			82,5	<b>82,5</b>	82,5	82,6	82,6		
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan					6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%					6	<b>6</b>	6	6	6		
SP 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	B	<b>B</b>	A	A	A	B	B (Nilai 65)	<b>BB</b>	100.00%	B (Nilai 67.71)	87.64%	Capaian Nilai SAKIP A tidak akan tercapai selama sistem pelaporan internal di Badan POM belum tersedia			B	<b>B</b>	A	72.00	73.00		

NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA										IDENTIFIKASI MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	INDIKATOR	USULAN PERUBAHAN					ASUMSI	RISIKO	
			TARGET					REALISASI			CAPAIAN (%)					TARGET							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	TW1 2017	2015	2016				TW1 2017	2015	2016	2017	2018			2019
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)			(6)		(7)	(8)	(9)	(10)					(11)	(12)	
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jakarta	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3,400	<b>3,400</b>	3,400	3,400	3,400	3500	3400	282	100.00%	100%	8.29%	Target tercapai sesuai dengan jumlah sumber daya laboratorium			3,400	<b>3,400</b>	3,400	3,400	3,400		
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) (dalam persen)	100	<b>100</b>	100	100	100	32.57%	67.65%	6.18	32.57%	67.65%	6.18%	Pengadaan obat di sarana pelayanan publik satu pintu sehingga obat yang beredar kode produksinya sama dan yang disampling menjadi lebih sedikit			100	<b>100</b>	100	100	100		
		Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22.55	<b>22.64</b>	22.64	22.73	22.73	26.40%	26.68%	5.84	117.07%	118.05%	25.90%	Target tercapat tidak direvisi			22.55	<b>22.64</b>	22.64	22.73	22.73		
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	22.33	<b>22.8</b>	23.28	23.75	24.23	21.92%	22.63%	2.92	98.16%	99.25%	13.08%	Target tidak tercapai, tetapi karena merupakan salah satu untuk capaian target nasional sehingga tidak bisa direvisi			22.33	<b>22.8</b>	23.28	23.75	24.23		
		Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	15	<b>15</b>	15	15	15	15	13	1	100.00%	87%	6.67%	Tidak ada masalah dalam pencapaian target			15	<b>15</b>	15	15	15		

NO	SASARAN	INDIKATOR	SEMULA										IDENTIFIKASI MASALAH DAN KENDALA PELAKSANAAN	SOLUSI	INDIKATOR	USULAN PERUBAHAN					ASUMSI	RISIKO	
			TARGET					REALISASI			CAPAIAN (%)					TARGET							
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	TW1 2017	2015	2016				TW1 2017	2015	2016	2017	2018			2019
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)			(6)		(7)	(8)	(9)	(10)					(11)	(12)	
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jakarta	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	Jumlah layanan publik BB/BPOM	720	725	730	735	740	863	878	707	119.86%	119.86%	35.35%	Terjadi penyesuaian target karena terdapat peningkatan jumlah sampel pihak ketiga			720	725	2000	2050	2100		
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	22	28	34	40	46	22	28	28	100.00%	100.00%	82.35%	Sesuai dengan target nasional. Jumlah target memberikan kontribusi ke target nasional			22	28	34	40	46		
		Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	80	85	90	95	95	79.26%	80.01%	96,00	99.08%	94.13%	106.67%	Telah terpenuhi pada tahun 2017, tetapi tidak bisa dilakukan revisi penambahan target karena sudah tidak bisa lagi pengembangan sarana prasarana gedung kantor BBPOM Jakarta karena keterbatasan lahan. Hanya bisa melakukan penggantian sarana prasarana yang rusak			80	85	90	95	95		
		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	9	10	9	10	10	9	3	100.00%	100%	30.00%	tidak ada perubahan target			10	9	10	9	10		

Keterangan Kolom:

- (1) Nomor Urut
- (2) Kolom Sasaran diisi dengan sasaran strategis dan kegiatan yang tercantum dalam Renja/RKA-KL
- (3) Kolom Indikator diisi dengan indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang tercantum pada Renja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018
- (4) Kolom Target diisi dengan target sesuai Renja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Untuk target tahun 2019 mengacu pada KPJM Renja 2018
- (5) Kolom Realisasi diisi dengan realisasi sesuai Laporan Kinerja 2015, 2016, dan monev 2017
- (6) Kolom Capaian diisi dengan rumus (Realisasi/Target)\*100%
- (7) Kolom identifikasi masalah dan kendala pelaksanaan diisi diantaranya dengan memperhatikan Definisi Operasional (DO), permasalahan atau kendala yang ditemukan
- (8) Kolom Solusi merupakan solusi dari masalah dan kendala pelaksanaan
- (9)/(10) Kolom indikator dan target diisi dengan usulan perubahan
  - a) Indikator *existing* dengan target tetap, namun ada perubahan DO
  - b) Indikator tetap, namun target berubah dan DO tetap/berubah
  - c) Indikator berubah serta target dan DO berubah
- (11) Kolom asumsi diisi dengan asumsi/prasyarat untuk pencapaian dari indikator dan target
- (12) Kolom risiko diisi dengan risiko apabila indikator dan target tidak tercapai

Tabel 2.5 Review Renstra

## 2.2. Perencanaan Kinerja Tahunan

### 2.2.1. Rencana Kinerja Tahunan

Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan untuk tahun 2017 yang memuat sasaran kinerja/hasil, indikator, target kinerja tahunan yang akan dicapai serta kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun usulan kegiatan dan anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2017. Rencana Kinerja Tahunan dibuat untuk kemudian dijabarkan juga dalam Penetapan Kinerja

### 2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahunan

Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang telah disepakati merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara panorama amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta tahun 2017 sesuai DIPA sebesar Rp. 38.879.945.000,00 Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah).

Sasaran yang hendak dicapai selama tahun 2017 telah ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2015-2019, yaitu 3 sasaran dengan 17 indikator sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Memkuatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00 persen
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82.00 persen
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91.00 persen
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00 persen

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	89.10 persen
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,5
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 kabupaten / kota
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	A
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.400 sampel
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100 persen
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22.64persen
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	23.28 persen
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	15 perkara
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	2000 layanan
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	34 kelurahan / pasar
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90 persen
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 dokumen

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja tahun 2017

### 2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang telah disepakati merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara panorama amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis yang telah disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Kriteria keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Capaian	Kriteria
$100\% \leq x < 125\%$	Memuaskan
100%	Baik
$75\% \leq x < 100\%$	Cukup
$x < 75\%$	Kurang
$x > 125\%$	Tidak Dapat disimpulkan

Tabel 2.7. Kriteria Capaian

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**





# AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis	Kriteria Pencapaian
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Memuaskan dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 108.46%
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Memuaskan dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 100.03%
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan	Cukup dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 87.64%

Tabel 3.1. Realisasi Sasaran Strategis tahun 2017

Secara singkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai Besar POM di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Kriteria
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	107.05 %	Memuaskan
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	102.90 %	Memuaskan
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	108.49 %	Memuaskan
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	120.52 %	Memuaskan
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	103.33 %	Memuaskan
2	Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	100,06%	Memuaskan
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	100,00%	Baik
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan	Nilai SAKIP dari Badan POM	87.64%	Cukup

No	Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Kriteria
1	<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	100.03%	Memuaskan
			2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	92.25%	Cukup
		Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	120.05%	Memuaskan
		Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	89.78%	Cukup
		Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	106.67%	Memuaskan
2	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	119.50%	Memuaskan
			2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	100,00%	Baik
3	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	106,67%	Memuaskan
		Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	Baik

Tabel 3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2017

### Sasaran Strategis I

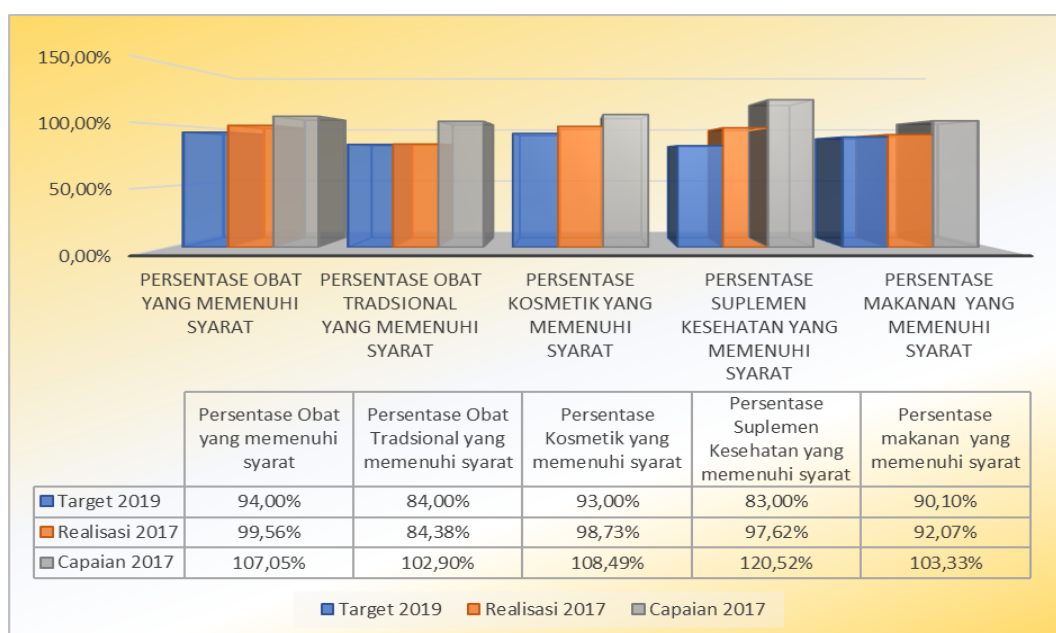
#### Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Strategis I mempunyai 5 (lima) indikator kinerja utama dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00%	99,56%	107,05%	Memuaskan
	2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00%	84,38%	102,90%	Memuaskan
	3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00%	98,73%	108,49%	Memuaskan
	4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00%	97,62%	120,52%	Memuaskan
	5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,10%	92,07%	103,33%	Memuaskan
<b>Rata - rata capaian</b>				108,46%	Memuaskan

Tabel 3.3. Sasaran Strategis I tahun 2017

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

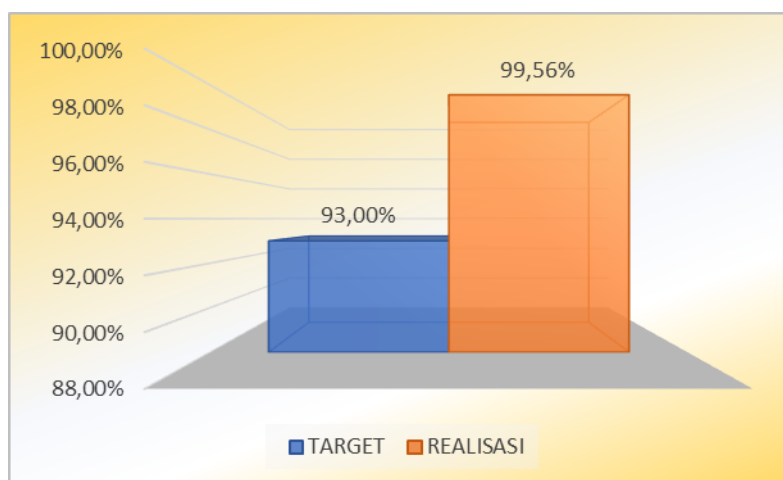


Gambar 3.1.. Perbandingan sasaran strategis I dengan target tahun 2019

Berikut dijabarkan untuk masing-masing Indikator pada Sasaran Strategi **Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan** :

### 1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase obat yang memenuhi syarat, capaiannya adalah 107.05% dengan kriteria memuaskan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.2. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 (Obat)

Target Persentase Obat yang memenuhi syarat sebanyak 93%, realisasi tahun 2017 99,56%. Dari persentase realisasi terlihat capaian persentase Obat yang Memenuhi syarat telah melebihi 100%. Sistem sampling acak telah diterapkan di tahun 2017. Dengan sistem sampling acak jumlah produk yang TMS kisarannya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan dengan sistem sampling acak temuan produk TMS tidak berbeda jauh dengan Sistem sampling Targeted. Yang berpengaruh terhadap sistem sampling acak adalah time line pengujian dan pengadaan reagensia. Time line pengujian menjadi lebih lama dan tidak bisa memperkirakan reagen yang akan digunakan secara tepat.

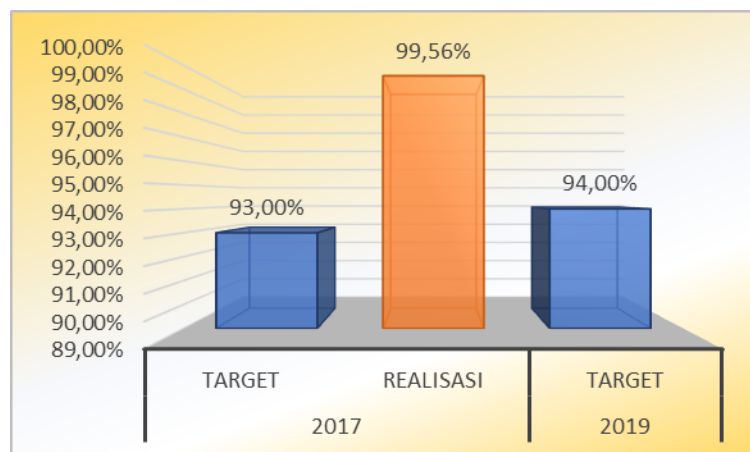
Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 3.3. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (Obat)

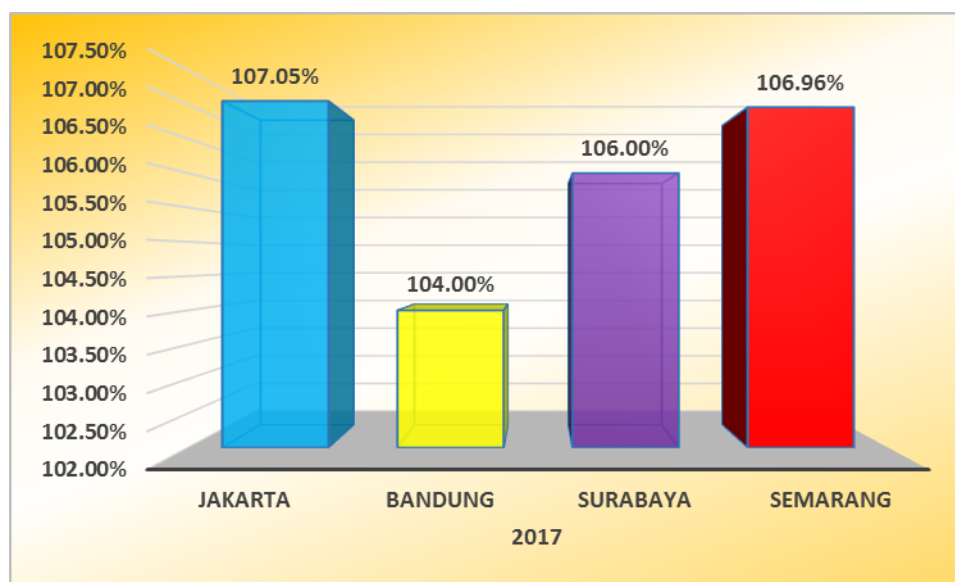
Dari gambar terlihat bahwa realisasi obat yang MS tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,88%, yang disebabkan antara lain semakin baiknya penerapan Cara Produksi Obat yang Baik di Industri Farmasi dan semakin ketatnya pengawasan obat substandard. Perubahan sistem sampling tidak berpengaruh jauh terhadap persentase obat yang memenuhi syarat, karena tahun 2015 dan tahun 2016 sistem sampling menggunakan sistem targeted dan tahun 2017 menggunakan sistem acak. Penurunan jumlah produk yang memenuhi syarat terjadi pada tahun 2016 yang menggunakan sistem sampling targeted.

Jika dibandingkan antara realisasi 2017 dengan target akhir RPJMN tahun 2019, terlihat bahwa capaian tahun 2017 sebesar 107.05% telah melampaui target akhir RPJMN akhir tahun 2019. Hal ini menggambarkan target untuk tahun 2019 telah tercapai sebelum akhir masa RPJMN. Hal ini memperlihatkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan penyesuaian dasar penetapan target untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat.



Gambar 3.4. Perbandingan realisasi tahun 2017 dengan target tahun 2019 (Obat)

Kinerja BBPOM di Jakarta jika dibandingkan dengan Balai Besar POM lain yang hampir sama kerjanya yaitu BBPOM di Bandung, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang untuk persentase obat yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian BBPOM di Jakarta lebih tinggi dari ketiga Balai Besar lainnya. Banyak hal yang menyebabkan hal ini diantaranya adalah jumlah dan jenis obat yang beredar di wilayah tersebut dan faktor sampling dari masing-masing Balai. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.5. Perbandingan capaian BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang (Obat)

Hal-hal yang mendukung pencapaian seperti diatas adalah :

#### 1. Sertifikasi sarana produksi Obat

Sertifikasi sarana produksi obat yang semakin baik dan semua sarana produksi telah berkomitmen terhadap mutu obat yang dihasilkan akan mempengaruhi jumlah obat yang MS. Kesadaran pelaku usaha untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan obatnya semakin meningkat.

#### 2. Pengawasan sarana produksi Obat

Pengawasan sarana produksi obat yang dilakukan tahun 2017 telah dilakukan secara intensif dan komprehensif dengan melibatkan investigasi awal dari seksi penyidikan dan temuan pemeriksaan rutin di jalur distribusi serta pelayanan. Pengawasan sarana produksi yang semakin baik akan menambah jumlah produk yang MS. Jika industri telah menerapkan Cara Produksi Obat yang Baik secara konsisten maka mutu dan keamanan obat akan terjaga baik. Sebaliknya, jika sarana produksi sudah baik tetapi ada produsen ilegal yang memalsukan obat dapat pula mempengaruhi hasil pengawasan.

#### 3. Pengawasan sarana distribusi Obat

Kewajiban untuk sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk PBF sebagai distributor obat mendorong PBF untuk melakukan persiapan sertifikasi. Beberapa sarana telah mulai sertifikasi CDOB. Jika sarana distribusi telah menerapkan CDOB, maka keamanan obat yang disimpan akan terjamin sampai ke tangan pasien dan meningkatkan jumlah obat yang memenuhi syarat. Semakin buruk penyimpanan dan transportasi produk sebelum sampai ke pasien semakin banyak produk yang TMS karena rusak selama penyimpanan dan transportasi.

Pengawasan sarana Pelayanan Obat yang semakin intensif apalagi dengan adanya sistem JKN telah membuat sarana pelayanan mulai berbenah diri kearah yang lebih baik. Jumlah sarana distribusi dan pelayanan ilegal telah mulai turun dengan adanya penutupan Apotek rakyat.

#### 4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat

Penutupan dan Penghentian Sementara Kegiatan bagi sarana yang melakukan pelanggaran berat memberikan efek jera. Telah dikenakan sanksi hukum untuk sarana yang ditemukan menjual produk ilegal. Peningkatan kinerja petugas BBPOM di Jakarta untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dapat memberikan efek jera

kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

#### 5. Pembinaan kepada pelaku usaha

Pembinaan kepada pelaku usaha yang telah dilakukan BBPOM di Jakarta memberikan efek positif dengan bertambahnya jumlah produk yang MS.

#### 6. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait

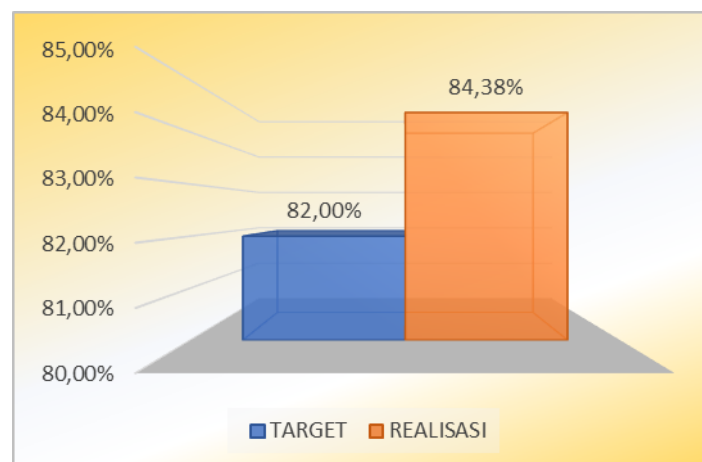
BBPOM di Jakarta telah melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara terus menerus. Apalagi semenjak kebijakan penutupan apotek rakyat dan adanya Inpres no 3 tahun 2017 tentang peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan. Diharapkan peran lintas sector terkait untuk mengawal keamanan mutu dan khasiat produk obat.

#### 7. KIE kepada masyarakat

Balai Besar POM di Jakarta semakin gencar melakukan KIE baik dalam kegiatan Penyebaran Informasi, pameran, kegiatan KIE pada HBKB. Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat akan mempengaruhi kepedulian masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Masyarakat akan semakin pintar dalam memilih produk yang dikonsumsi dan digunakan.

## 2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, capaiannya adalah 102.90% dengan kriteria Memuaskan



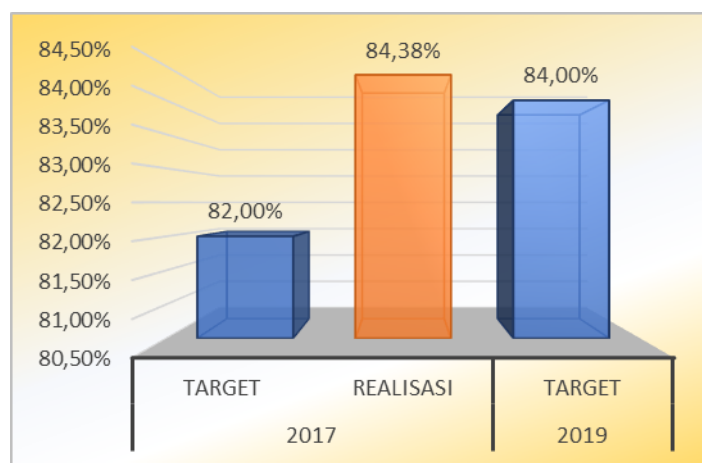
Gambar 3.6. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 (OT)

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 3.7. Perbandingan target dan realisasi 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (OT)

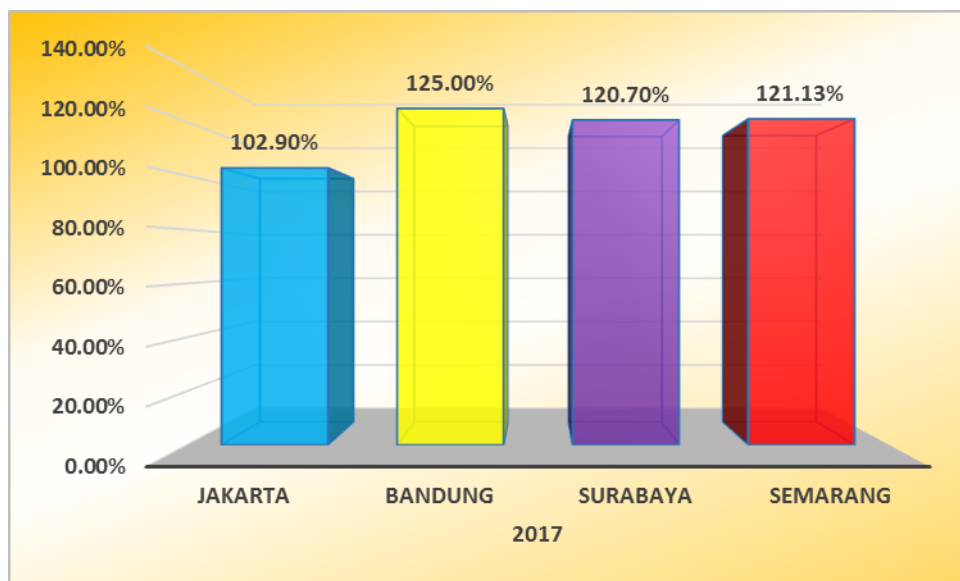
Dari gambar terlihat bahwa capaian tahun 2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016. Tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tidak mencapai target. Tetapi tahun 2017 melebihi target. Jumlah TMS Mikrobiologi berkurang diantaranya disebabkan faktor kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi yang baik dan menjaga Hygiene Sanitasi semakin meningkat.



Gambar 3.8. Perbandingan realisasi 2017 dengan target 2019 (OT)

Jika dibandingkan antara realisasi 2017 dengan target akhir RPJMN tahun 2019, terlihat bahwa capaian tahun 2017 sebesar 84.38% telah melampaui target akhir RPJMN akhir tahun 2019. Target 2019 sebesar 84 % telah tercapai ditahun 2017

Untuk melihat perbandingan jumlah Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah BBPOM di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.9. Perbandingan capaian BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang (OT)

Dari gambar terlihat capaian jumlah produk Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta lebih rendah jika dibandingkan dengan BBPOM di Bandung, Surabaya dan Semarang. Hal ini dapat disebabkan karena wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi. Hal ini merupakan pasar yang lebih besar untuk peredaran beragam jenis obat tradisional dengan jumlah yang lebih banyak. Besarnya rasio peredaran obat tradisional ini meningkatkan kemungkinan jumlah obat tradisional yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, kepekaan petugas sampling terhadap jenis obat tradisional dapat pula menyumbang persentase obat tradisional yang TMS. Penetapan target jumlah yang memenuhi syarat terlalu tinggi juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab lainnya.

Hal-hal yang bisa menyebabkan pencapaian seperti diatas adalah :

1. Sertifikasi sarana produksi Obat Tradisional

Pelaku usaha yang konsisten menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan penerapan Hygiene Sanitasi akan meningkatkan jumlah produk yang memenuhi syarat. Hal ini terbukti ditahun 2017 jumlah Obat Tradisional yang memenuhi syarat telah melebihi target. Sertifikasi sarana Produksi Obat Tradisional dalam hal ini Sertifikasi CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik) akan meningkatkan secara nyata jumlah produk yang MS. Konsistensi penerapatan CPOTB akan memperkecil jumlah produk yang TMS.

## 2. Pengawasan sarana produksi Obat Tradisional

Peningkatan jumlah pengawasan sarana produksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional hanya merupakan sampling berdasarkan resiko. Tetapi peningkatan jumlah pengawasan dan meningkatkan juga kepatuhan Pelaku Usaha

## 3. Pengawasan sarana distribusi Obat Tradisional

Sarana distribusi yang diawasi adalah berdasarkan sampling dengan kajian resiko sesuai dengan target pemeriksaan sarana.

## 4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat Tradisional

Pelanggaran di bidang Obat Tradisional yang diangkat sampai *projusticia* pada tahun 2017 adalah satu kasus, selebihnya diberikan sanksi administrasi berupa peringatan dan penghentian sementara kegiatan. Semakin gencar kegiatan penyidikan dan penyelidikan Obat Tradisional akan memberi dampak semakin meningkatnya produk yang memenuhi syarat.

## 5. Pembinaan kepada pelaku usaha

Pembinaan Pelaku Usaha melalui sertifikasi CPOTB akan meningkatkan mutu keamanan Obat Tradisional yang diproduksi

## 6. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait

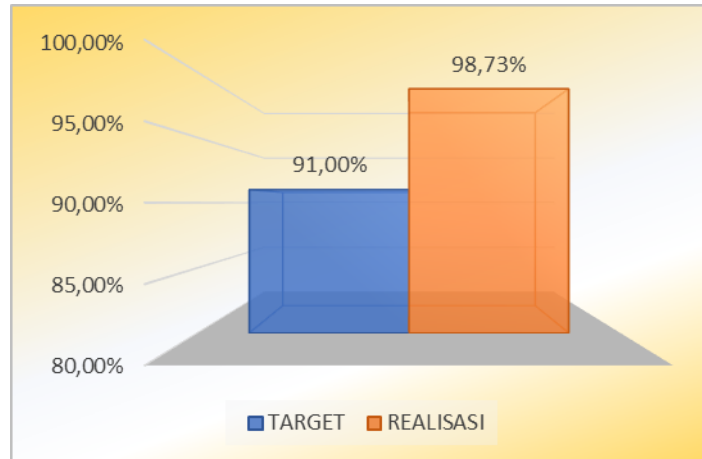
Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor semakin gencar dilakukan tahun 2017. Hal ini merupakan implementasi dari Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani tahun 2016. Pertemuan demi pertemuan terus dilakukan baik untuk membahas permasalahan yang ada maupun untuk membuat peraturan daerah terkait Instruksi atau Peraturan Gubernur

## 7. KIE kepada masyarakat

Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat semakin membuat masyarakat peduli terhadap produk yang dikonsumsi. BBPOM di Jakarta melalui Penyebaran Informasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha, Penyuluhan, Sosialisasi baik dengan anggaran dari internal BBPOM Jakarta maupun anggaran dari lintas sektor. Beberapa kegiatan pameran juga diikuti untuk penyebaran informasi baik berupa penyebaran informasi langsung maupun lewat media informasi seperti leaflet, brosur, booklet dan sebagainya.

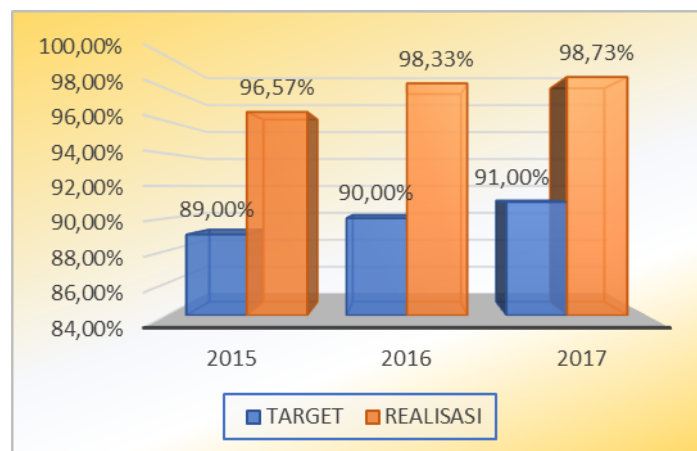
### 3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, capaiannya adalah 108.49% dengan kriteria memuaskan.



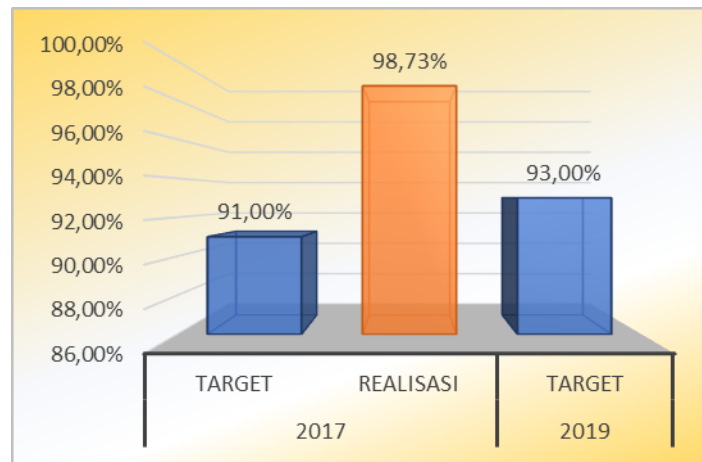
Gambar 3.10. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 (Kosmetik)

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 3.11. Perbandingan target dan realisasi 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (Kosmetik)

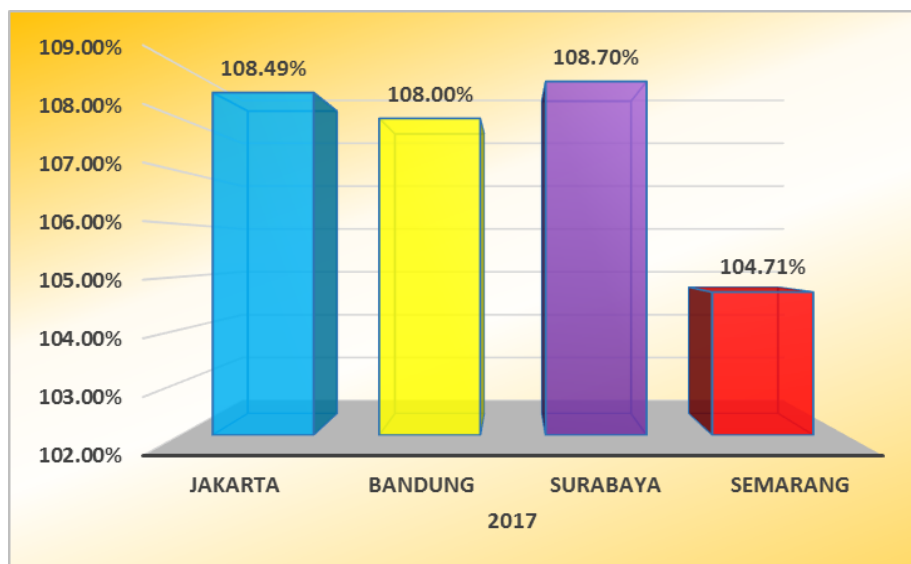
Dari gambar terlihat bahwa capaian tahun 2017 mengalami kenaikan yang terus meningkat dibandingkan tahun 2015 dan 2016.



Gambar 3.12. Perbandingan realisasi 2017 dengan target 2019 (Kosmetik)

Jika dibandingkan antara realisasi 2017 dengan target akhir RPJMN tahun 2019, terlihat bahwa capaian tahun 2017 sebesar 98.73% telah melampaui target akhir RPJMN akhir tahun 2019.

Capaian jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat jika dibandingkan antara BBPOM di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.13. Perbandingan capaian BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang (Kosmetik)

Dari gambar terlihat jumlah kosmetik yang memenuhi syarat di keempat Balai di atas 100% dan memuaskan. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya industri kosmetik yang kini telah

menerapkan Cara Produksi Kosmetik yang baik secara konsisten. Selain itu faktor kejelian petugas sampling juga mempengaruhi hasil produk yang disampling dan diuji. Banyaknya KIE yang diadakan petugas BBPOM juga akan mengakibatkan kesadaran pengguna kosmetik sehingga permintaan terhadap kosmetik yang tidak memenuhi syarat semakin rendah.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian di BBPOM di Jakarta adalah :

1. Sertifikasi sarana produksi Kosmetik

Sertifikasi CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) semakin banyak dilakukan seiring dengan peningkatan kesadaran pelaku usaha. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan jumlah produk yang Memenuhi Syarat

2. Pengawasan sarana produksi Kosmetik

Pengawasan sarana produksi kosmetik dilakukan secara kontinyu melalui pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap perbaikan mutu dan keamanan produk yang diproduksi karena pelaku usaha harus menerapkan Cara Produksi Kosmetik yang Baik secara konsisten. Maka persentase kosmetik yang tidak memenuhi syarat akan semakin menurun.

3. Pengawasan sarana distribusi Kosmetik

Sarana Distribusi Kosmetik diawasi melalui sistem sampling berdasarkan resiko. Semakin banyak sarana yang diawasi akan meningkatkan kepedulian pelaku usaha

4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Kosmetik

Pada tahun 2017 BBPOM di Jakarta tidak menemukan pelanggaran yang ditindaklanjuti dengan Projusticia. Hal ini belum tentu karena tidak beredarnya produk Tidak Memenuhi Syarat di wilayah DKI Jakarta. Bisa jadi hal ini disebabkan karena temuan yang ada tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti secara Projusticia. BBPOM di Jakarta terus melakukan investigasi terhadap pelanggaran sarana produksi dan distribusi kosmetik

5. Pembinaan kepada pelaku usaha

Pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan persentase jumlah produk yang memenuhi syarat

6. Advokasi dan Koordinasi dengan lintas sektor terkait

Sebagai Implementasi Perjanjian Kerja Sama, advokasi dan koordinasi lintas sektor

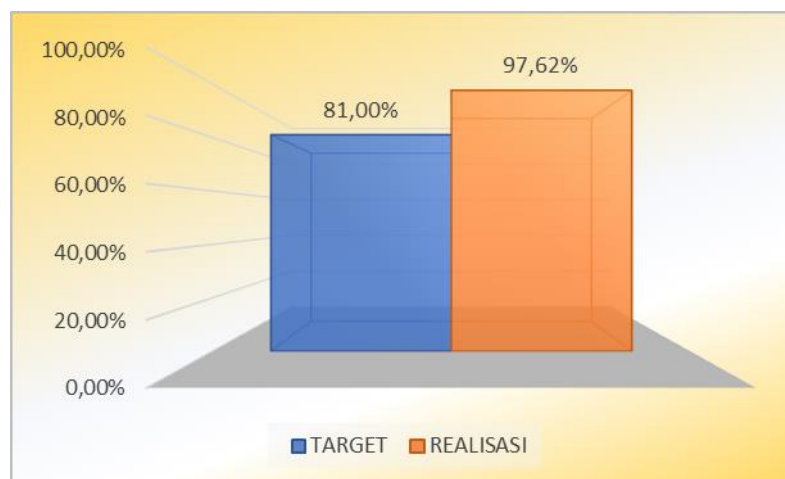
terus dilakukan secara berkesinambungan

#### 7. KIE kepada masyarakat

Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat memberikan dampak kepada kecerdasan konsumen dalam memilih produk sehingga akan terjadi penurunan dalam penggunaan terhadap produk yang Tidak Memenuhi Syarat

#### 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, capaiannya adalah 120.52% dengan kriteria memuaskan.



Gambar 3.14. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 (Suplemen Kesehatan)

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 3.15. Perbandingan target dan realisasi 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (Suplemen Kesehatan)

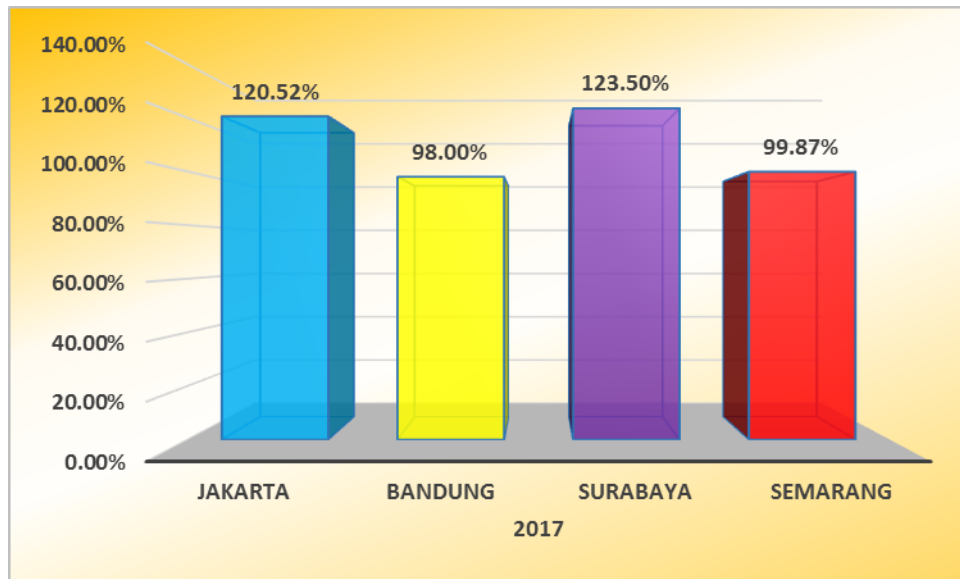
Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016, capaian tahun 2017 terlihat terjadi penurunan.



Gambar 3.16. Perbandingan realisasi 2017 dengan target 2019 (Suplemen Kesehatan)

Jika dibandingkan antara realisasi 2017 dengan target akhir RPJMN tahun 2019, terlihat bahwa capaian tahun 2017 sebesar 97.62% telah melampaui target akhir RPJMN akhir tahun 2019.

Jika dibandingkan jumlah suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat antara BBPOM Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.17. Perbandingan capaian BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang (Suplemen Kesehatan)

Dari gambar dapat dilihat bahwa jumlah Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat paling rendah di wilayah BBPOM di Bandung. Hal ini juga disebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor sampling dan faktor kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi dan distribusi yang baik.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian BBPOM di Jakarta seperti diatas adalah :

1) Sertifikasi sarana produksi Suplemen Kesehatan

Produksi Bersama Suplemen Kesehatan dengan Produksi Obat. Untuk produksi Suplemen Kesehatan menggunakan fasilitas produksi Obat.

2) Pengawasan sarana produksi Suplemen Kesehatan

Pengawasan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan telah dilakukan bersamaan dengan pengawasan sarana produksi obat.

3) Pengawasan sarana distribusi Suplemen Kesehatan

Pengawasan sarana distribusi Suplemen Kesehatan bersamaan dengan pengawasan sarana distribusi obat.

4) Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Suplemen Kesehatan

Untuk penegakan hukum suplemen Kesehatan belum bisa dilakukan. Selama ini dimasukkan kedalam kategori Pangan karena belum ada payung hukum untuk Suplemen Kesehatan.

#### 5) Pembinaan kepada pelaku usaha

Pembinaan pelaku usaha untuk pelaku usaha Suplemen Kesehatan bersamaan dengan pelaku usaha Obat karena Suplemen Kesehatan diproduksi bersama-sama obat dan biasanya distribusinya juga bersamaan kecuali distributor khusus

#### 6) Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait

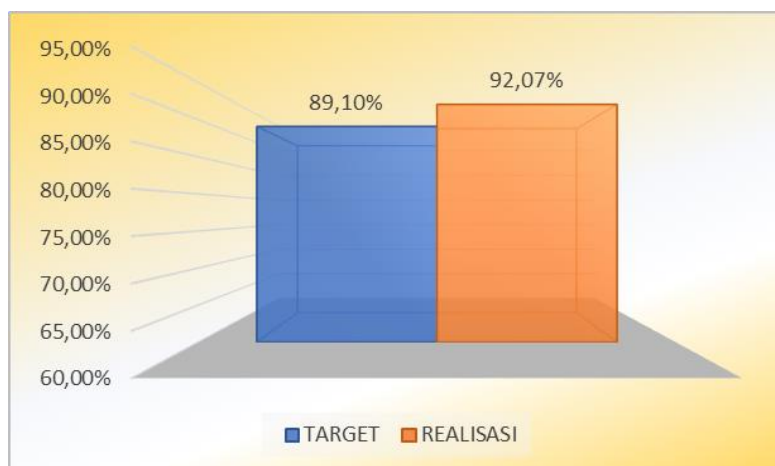
Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait Suplemen Kesehatan dilakukan bersamaan dengan komoditi obat.

#### 7) KIE kepada masyarakat

Komunikasi Informasi dan Edukasi terhadap masyarakat terkait Suplemen Kesehatan dilakukan agar masyarakat pintar dalam memilih produk sehingga mempengaruhi peningkatan jumlah produk yang memenuhi syarat

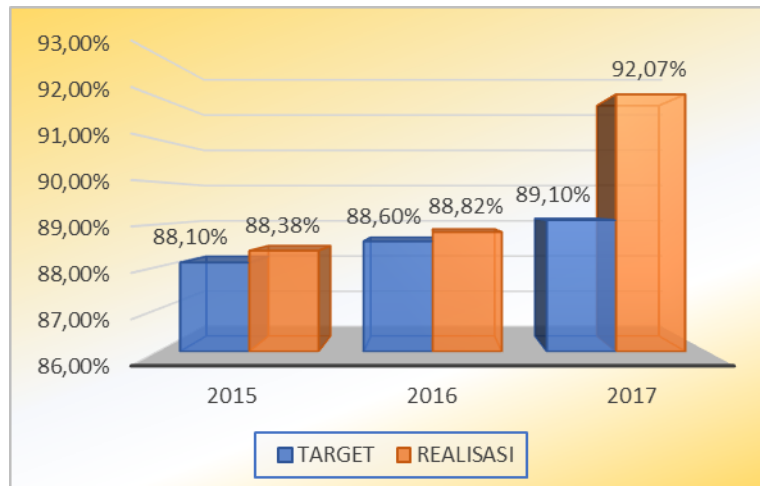
### 5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat, capaiannya adalah 103.33% dengan kriteria memuaskan.



Gambar 3.18. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 (Makanan)

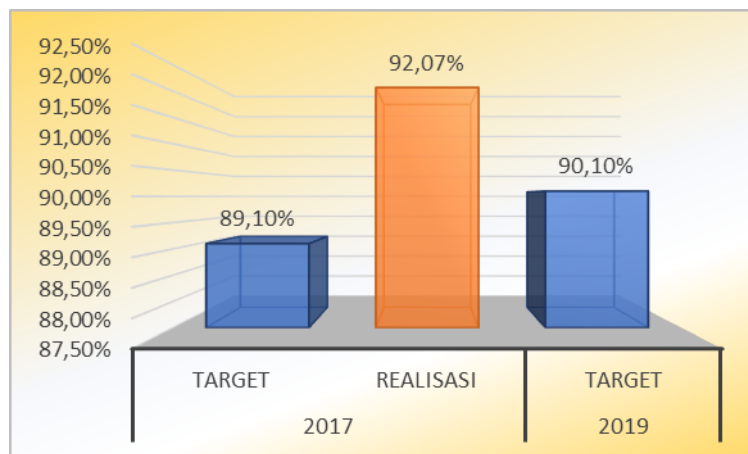
Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 3.19. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (Makanan)

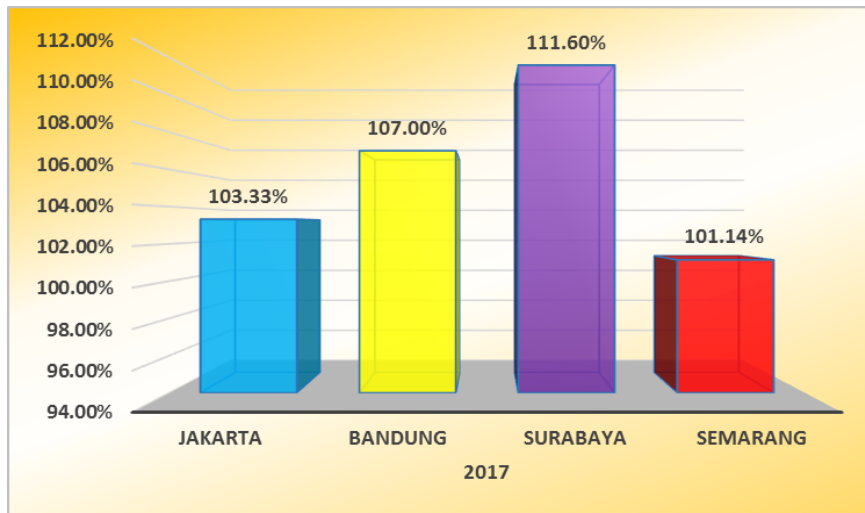
Dari gambar terlihat bahwa capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2017 terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 dan tahun 2016.

Jika dibandingkan antara realisasi 2017 dengan target akhir RPJMN tahun 2019, terlihat bahwa capaian tahun 2017 sebesar 103.33% telah melampaui target akhir RPJMN akhir tahun 2019.



Gambar 3.20. Perbandingan realisasi 2017 dengan target 2019 (Makanan)

Untuk membandingkan jumlah persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yang beredar di BBPOM Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.21. Perbandingan capaian BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang (makanan)

Dari gambar dapat dilihat bahwa jumlah makanan yang memenuhi syarat yang paling rendah adalah di wilayah BBPOM di Semarang. Hal ini bisa disebabkan karena faktor produk yang beredar, sistem sampling yang digunakan atau kasus tertentu yang ada di wilayah tersebut yang menyebabkan sampel banyak yang disampling untuk item tertentu. Faktor sampling dan kasus yang terjadi di suatu wilayah akan mempengaruhi jumlah persentase makanan yang memenuhi syarat.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian BBPOM di Jakarta seperti diatas adalah :

1. Sertifikasi sarana produksi Makanan

Sertifikasi terhadap sarana produksi makanan belum secara signifikan mempengaruhi jumlah produk yang memenuhi syarat. Sertifikasi untuk Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) belum diwajibkan. Akan tetapi penerapannya menjadi wajib untuk menjaga konsistensi penerapan CPPOB. Pemeriksaan Sarana dalam rangka untuk mendapat izin edar produk produksi dalam negeri dan impor memperlihatkan kepedulian para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya sebelum diedarkan di wilayah Indonesia. Selain itu, peningkatan persentase produk yang Memenuhi Syarat dapat disebabkan oleh meningkatnya Higiene Sanitasi sarana Produksi.

2. Pengawasan sarana produksi Makanan

Pengawasan sarana produksi semakin kontinyu dilakukan.

3. Pengawasan sarana distribusi Makanan

Pengawasan sarana distribusi makanan secara komprehensif semakin sering dilakukan. Apalagi menjelang hari raya keagamaan. BBPOM di Jakarta juga turun bersama

dengan lintas sektor

#### 4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Makanan

Pada tahun 2017 BBPOM di Jakarta melakukan penyidikan kasus sebanyak 9 kasus.

#### 5. Pembinaan kepada pelaku usaha

Pembinaan kepada pelaku usaha telah dilaksanakan terhadap pelaku usaha pangan. Mulai dari pembinaan terhadap piagam bintang keamanan pangan, pembinaan cara Produksi Pangan yang baik terhadap IRTP dan *grading* IRTP hingga mereka naik *grade* menjadi MD.

Kegiatan terpadu dengan lintas sektor juga telah dilaksanakan terutama untuk sarana produksi pangan. Hal ini diharapkan meningkatkan kontribusi terhadap produk yang Memenuhi Syarat.

#### 6. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait

Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor terkait pangan banyak dilakukan dengan pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai implementasi Perjanjian Kerjasa antara Badan POM dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini semakin meningkatkan kerjasama antara BBPOM di Jakarta dengan SKPD terkait dalam pengawasan makanan.

#### 7. KIE kepada masyarakat

Kegiatan Sosialisasi terhadap keamanan pangan telah dilakukan terhadap pelaku usaha di bidang makanan. Juga dilakukan sosialisasi keamanan pangan kepada pedagang kaki lima di wilayah binaan pemerintah daerah.

**Sasaran Kegiatan I**  
**Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**

Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan Pengawasan mencakup pengawasan pre dan post market. Adapun kegiatan untuk mewujudkan sasaran **Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan** adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3400	3401	100.03%
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	92.25%	92.25%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22.64%	27.18%	120.05%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	23.28%	20.90%	89.78%
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	5. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	15	16	106.67%

Tabel 3.4 Capaian Kegiatan untuk Mewujudkan Sasaran Strategis I

Berdasarkan tabel di atas, dari 5 (lima) indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja Balai Besar POM di Jakarta yang tidak memenuhi target yaitu pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) hanya mencapai 92.25% dan cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan hanya mencapai 89.78%.

1. Secara umum pemenuhan jumlah sampel yang diuji berdasarkan parameter kritis terpenuhi yaitu sejumlah 3401 sampel (100,03%). Sampel ini merupakan komoditas yang diuji oleh laboratorium Balai Besar POM di Jakarta dengan perincian sebagai berikut obat 680 sampel, obat tradisional 512 sampel, suplemen kesehatan 168 sampel, kosmetik 1020 sampel, dan pangan 1021 sampel.
2. Tingginya capaian cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan untuk menyaksikan pemusnahan produk **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan **kadaluarsa/rusak** untuk semua komoditas baik obat, NAPZA, kosmetik, dan obat tradisional serta pangan. Peningkatan jumlah permintaan sebagai saksi pemusnahan merupakan salah satu indikator keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta, karena pelaku usaha mempunyai itikad baik untuk memusnahkan produk tersebut sehingga mengurangi jumlah komoditas yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat di peredaran. Selain itu, dengan penyaksian pemusnahan ini dapat mengurangi resiko produk TMS dan kadaluarsa untuk disalahgunakan, antara lain untuk pembuatan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, mencegah terjadinya diversifikasi NPP maupun OOT. Selain itu kegiatan farmakovigilance ke sarana industri farmasi dengan Badan POM diluar kegiatan pengawasan sebanyak 9 sarana, kegiatan sertifikasi maupun resertifikasi CPOB termasuk verifikasi *on site* dan audit komprehensif dalam rangka diversifikasi obat. Hal tersebut menambah kegiatan pengawasan rutin dimana pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan waktu pemeriksaan sehari bahkan lebih.
3. Rendahnya capaian target sampling obat di sektor publik (IFK) sebesar 92,25% disebabkan karena IFK provinsi DKI Jakarta tidak lagi melakukan pengadaan obat (pengadaan obat dilakukan oleh Puskesmas secara swadana), beberapa Puskesmas yang dilakukan sampling oleh petugas produk yang ditemui jumlahnya terbatas dan dengan jenis maupun nomor bets yang umumnya sama serta dengan alasan proses pengadaan belum terlaksana sampai dengan triwulan keempat
4. Tidak tercapainya target indikator Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (89.77%) karena arah kebijakan baru yaitu lebih tingginya prioritas pemeriksaan importir di tahun 2017, keterbatasan jumlah petugas dengan kompetensi yang sesuai untuk pemeriksaan importir, dan fokus pemeriksaan sarana distribusi terhadap legalitas produk sehingga pada saat pemeriksaan sering ditindaklanjuti dengan pengamanan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan importir lebih lama jika dibandingkan dengan

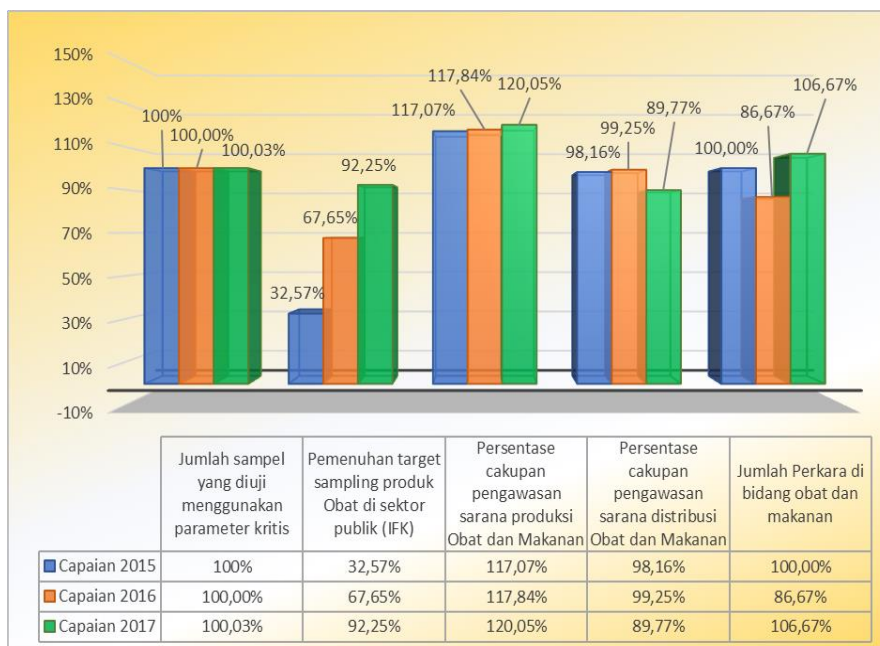
pemeriksaan sarana distribusi biasa, sehingga apabila target sehari 2 (dua) sarana hanya bisa dijalani 1 (satu) sarana. Tingginya komitmen Pemda terhadap keamanan produk pangan yang beredar termasuk produk pangan siap saji di wilayah provinsi DKI Jakarta berdampak pada meningkatnya pengawasan bersama melalui program mobil keliling.

5. Terpenuhinya Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan untuk tahun 2017 sebanyak 16 perkara (106,67%) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Jakarta mengindikasikan bahwa kejahatan di bidang obat dan makanan masih marak terjadi di provinsi DKI Jakarta, serta sebagai wujud respon cepat Balai Besar POM di Jakarta terhadap isu strategis yang berkembang khususnya dalam memerangi penyalahgunaan obat. Keberhasilan PPNS Balai Besar POM di Jakarta dalam mengungkap tindak pidana obat dan makanan di tahun 2017 menunjukkan komitmen yang tinggi dari Balai Besar POM di Jakarta untuk menjamin obat dan makanan yang beredar di wilayah provinsi DKI Jakarta aman dikonsumsi oleh masyarakat



Gambar 3.22. Capaian Kegiatan dalam sasaran strategis I

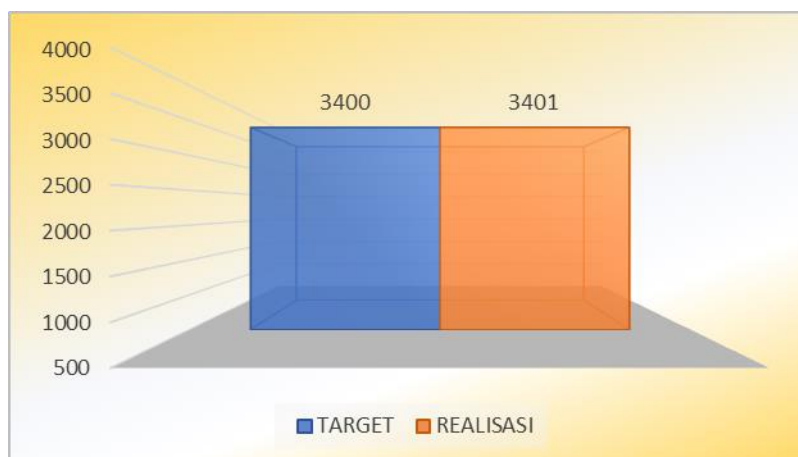
Untuk perbandingan Capaian Kegiatan Dalam Sasaran Strategis I tahun 2015-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 3.23. perbandingan Capaian Kegiatan Dalam Sasaran Strategis I tahun 2015-2017

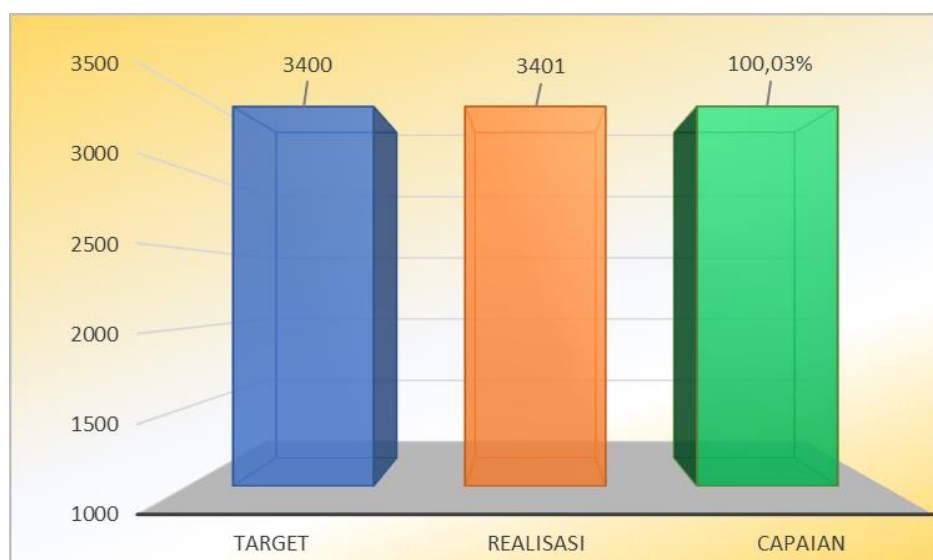
#### A. Jumlah Sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis

Secara umum pemenuhan jumlah sampel yang diuji berdasarkan parameter kritis terpenuhi yaitu sejumlah 3401 sampel (100,03%). Sampel ini merupakan komoditas yang diuji oleh laboratorium Balai Besar POM di Jakarta dengan perincian sebagai berikut obat 680 sampel, obat tradisional 512 sampel, suplemen kesehatan 168 sampel, kosmetik 1020 sampel, dan pangan 1021 sampel.



Gambar 3.24. Perbandingan target dan realisasi Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis tahun 2017

Untuk membandingkan dengan target jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis tahun 2019 didapat capaian 100.03% hal ini menggambarkan telah mencapai target tahun 2019. Dalam hal ini kami tidak melakukan revisi target karena penghitungan jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis sampai tahun 2019 telah memperhitungkan jumlah SDM dan kemampuan uji Balai Besar POM di Jakarta.



Gambar 3.25. Perbandingan realisasi jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis tahun 2017 dengan target 2019

Hal-hal yang terkait pencapaian indikator Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling  
Telah dapat mengikuti pedoman sampling tahun 2017
2. Kemampuan uji parameter uji kritis  
Semua parameter uji kritis yang dapat dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Jakarta
3. Sarana dan Prasarana Pengujian  
Balai Besar POM di Jakarta mempunyai keterbatasan luas laboratorium. Jakarta dengan kompleksitas masalah harus didukung dengan peralatan terkini dan standar minimal alat laboratorium cluster 1. Saat ini untuk standar minimal alat laboratorium BBPOM di Jakarta berada pada cluster 2.
4. Kuantitas dan Kualitas SDM terkait sampling dan pengujian  
Kuantitas SDM BBPOM di Jakarta belum memadai sesuai dengan Analisis Beban Kerja tahun 2017. Secara kualitas sudah memadai dalam melakukan pengujian menggunakan parameter uji kritis.

5. Faktor pendukung lain yang dianggap perlu

Faktor pendukung yang mendukung kinerja Pengujian BBPOM di Jakarta adalah kemudahan dalam mendapatkan reagen, suku cadang, baku pembandingan dan komunikasi dengan PPOMN lebih mudah dan lebih cepat. Pelayanan purna jual peralatan laboratory lebih baik karena pada umumnya distributor ada di Jakarta.

Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindaklanjut yang direncanakan tahun sebelumnya adalah :

- ✓ Melakukan peningkatan kompetensi terhadap kemampuan uji dan penerapan sistem mutu yang mendukung kinerja pengujian.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peningkatan kinerja pengujian BBPOM di Jakarta :

- ✓ Optimalisasi pelaksanaan Pedoman Sampling

Untuk membandingkan jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis di BBPOM Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3.26. Perbandingan Jumlah Sampel yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

Dari gambar terlihat BBPOM di Jakarta, Surabaya dan Semarang telah melakukan pengujian melebihi target, sedangkan BBPOM di Bandung memenuhi 100% target.

## B. Pemenuhan Target Sampling Produk Obat Di Sektor Publik

Target sampling produk obat di sektor publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar 30% dari jumlah sampel obat yang harus disampling BBPOM di Jakarta sesuai dengan prioritas sampling 2017 yaitu sebesar 204 (dua ratus empat) sampel dari total 680 (enam ratus delapan puluh) sampel.

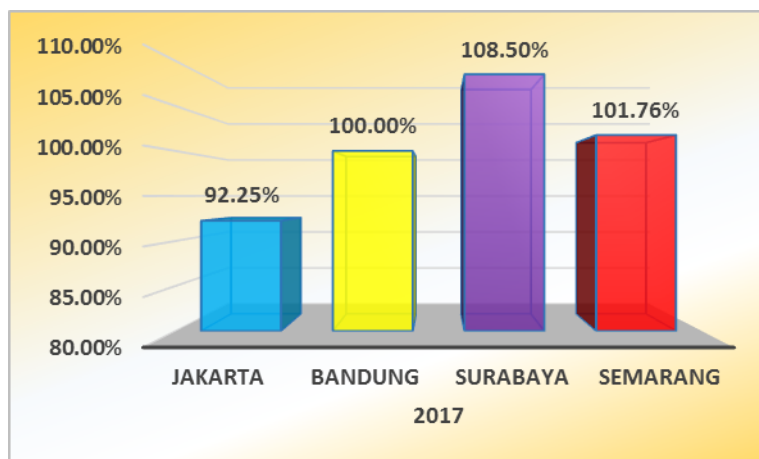
Sektor Publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta mencakup 6 (enam) Instalasi Farmasi Penyimpanan Pemerintah, 24 (dua puluh empat) Rumah Sakit Pemerintah, dan 345 (tiga ratus empat puluh lima) Pusat Kesehatan Masyarakat yang tersebar di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.



Gambar 3.27. Perbandingan pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik target dan realisasi tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016



Gambar 3.28. Perbandingan pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik target dan realisasi tahun 2017 dengan target tahun 2019



Gambar 3.29. Perbandingan Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik (IFK) BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

Dari grafik tersebut diatas :

1. Capaian sampling produk obat di sektor publik tahun 2017 sebanyak 92.25% dari 204 sampel, jauh meningkat dari tahun 2015 dan 2016.
2. Capaian target sampling produk obat di sektor publik tahun 2017 apabila dibandingkan dengan capaian target BBPOM di Bandung, Surabaya dan Semarang maka capaian BBPOM di Jakarta lebih rendah, belum mencapai 100%. Besarnya *catchment area* BBPOM di Bandung dan BBPOM di Surabaya diimbangi dengan jumlah sarana pelayanan publik yang banyak terutama jumlah Instalasi Farmasi Penyimpanan Kabupaten/ Kota serta jumlah penduduk yang besar sehingga ketersediaan juga tinggi sehingga mampu mengakomodir kebutuhan sampling produk obat di sarana publik.

Sebaran sarana sektor publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :



Gambar 3.30. Persebaran sarana sektor publik di Provinsi DKI Jakarta

Perencanaan pelaksanaan sampling produk obat di sektor publik telah ditetapkan dalam Rapat Prioritas Sampling antara Balai / Balai Besar POM dengan Badan POM dengan pertimbangan profil obat beredar di masing-masing wilayah Balai / Balai Besar POM, ketersediaan reagensia, baku pembanding, serta metode analisa yang dimiliki.

Penentuan jumlah sampel produk obat yang disampling di tahun berjalan ditentukan pada Rapat Perencanaan Sampling yang dilakukan di awal tahun antara Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan dengan Bidang Pengujian Teranokoko dengan mempertimbangkan jumlah pengujian, peralatan, dan beban kerja di laboratorium terkait.

Kendala dalam sampling produk obat di sektor publik adalah bahwa sampling dilakukan bersamaan dengan saat pemeriksaan sarana sehingga menjadi tidak fokus dan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kesediaan dari SKPD karena pada umumnya lokasi gudang penyimpanan obat berada di tempat lain di luar suku dinas kesehatan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian target sampling produk obat di sektor publik adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait antara lain dengan memberikan informasi sebelum dilaksanakannya sampling serta menyampaikan hasil pengujian dari sampel tersebut. Selain itu dengan adanya koordinasi, SKPD terkait juga memberikan informasi terkait ketersediaan obat yang ada di sektor publik yang akan disampling. Keberhasilan koordinasi tersebut tercermin dari peningkatan capaian target sampling produk obat di sektor publik tahun 2017 dibandingkan dengan capaian tahun 2016 dan 2015.

Instalasi Farmasi Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengadaan obat di awal tahun berjalan namun karena penerimaan obat tersebut umumnya terjadi di akhir tahun sehingga selama tahun berjalan ketersediaan obat di sarana tersebut terbatas. Untuk PKM dan Rumah Sakit Pemerintah memenuhi kebutuhan obat untuk tahun berjalan melalui *e-catalog* dengan menggunakan dana BLUD sehingga sarana tersebut dapat menentukan sendiri obat yang diperlukan dengan meminimalkan resiko obat rusak. Pengadaan yang menggunakan dana BLUD disesuaikan dengan kebutuhan pasien tanpa mempertimbangkan adanya kebutuhan sampling dari BBPOM di Jakarta sehingga hal tersebut mempengaruhi ketersediaan obat untuk disampling. Selain itu ketersediaan jenis produk obat sama sehingga variasi tidak banyak yang dapat disampling terutama IFP dan PKM / RSUD.

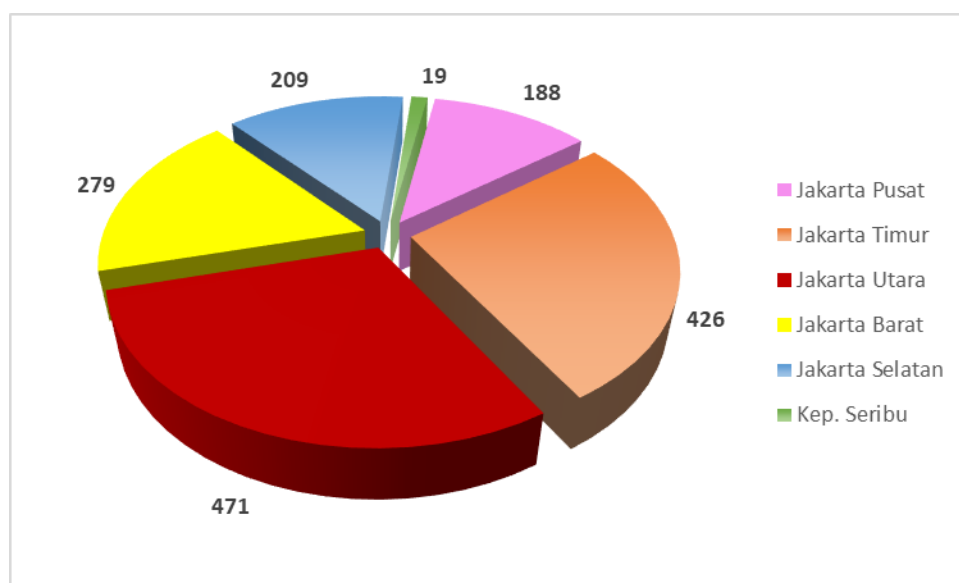
Dari riwayat capaian pemenuhan target sampling obat di sektor publik selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang tidak tercapai, maka dapat dipertimbangkan untuk

menurunkan target sampling obat di sektor publik pada Rapat Prioritas Sampling tahun 2018.

### C. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat Dan Makanan

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan pada tahun 2017 adalah sebesar 27.18% (dua puluh tujuh koma delapan belas persen) yaitu sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) sarana dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang ada sebesar 1144 (seribu seratus empat puluh empat) sarana.

Adapun sebaran sarana produksi di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :



Gambar 3.31. Sebaran sarana produksi di wilayah Provinsi DKI Jakarta

Dari grafik tersebut diatas sarana produksi terbanyak berada di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Lokasi kantor BBPOM di Jakarta yang berada di *Remote Area* Kota Administrasi Jakarta Timur serta kondisi lalu lintas di DKI Jakarta yang tidak dapat diprediksi membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam hanya untuk tiba di lokasi sarana.

Berdasarkan jumlah sarana produksi dibandingkan dengan jumlah SDM yang tersedia maka diperlukan waktu antara 3-5 tahun agar dapat dilakukan pemeriksaan ulang terhadap 1 (satu) sarana produksi, sehingga dibutuhkan perencanaan dengan prioritas guna tercapainya pemerataan pengawasan. Perencanaan pengawasan sarana produksi di wilayah BBPOM di Jakarta didasarkan pada analisis resiko dengan mempertimbangkan sarana yang tidak memenuhi ketentuan di tahun

sebelumnya baik temuan kritikal maupun major serta sarana yang belum pernah dilakukan pengawasan sebelumnya.

Dari ketersediaan jumlah dan kompetensi SDM di Seksi Pemeriksaan BBPOM di Jakarta sebanyak 12 (dua belas) orang dengan kompetensi yang bervariasi, sedangkan sarana produksi yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi mulai dari Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sampai dengan Industri Farmasi (IF) tingkat resiko tinggi. IF tingkat resiko tinggi diperlukan pengawas atau inspektur dengan kompetensi sesuai, saat ini baru tersedia 1 (satu) orang *Lead Inspektur* untuk pengawasan tersebut.

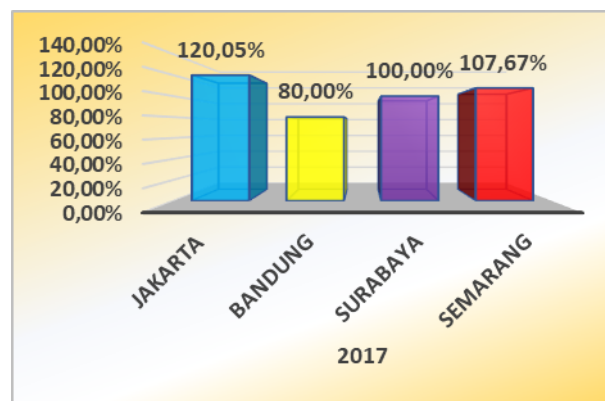
Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan POM dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 September 2016 memberikan panduan yang jelas terhadap pengawasan sediaan farmasi dan pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta dan SKPD terkait sehingga diharapkan cakupan pengawasan lebih luas.



Gambar 3.32. Perbandingan target dan realisasi persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016



Gambar 3.33. Perbandingan realisasi persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan tahun 2017 dengan target tahun 2019



Gambar 3.34. Perbandingan persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

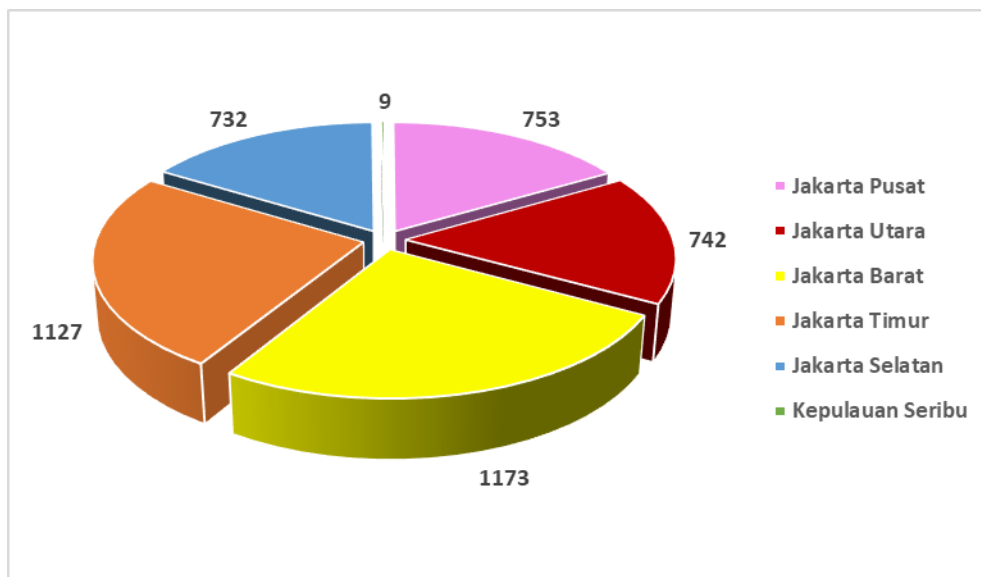
Dari grafik tersebut diatas :

1. Capaian cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan tahun 2017 sebanyak 311 sarana (27.18%) sudah melebihi target tahun 2017 sebesar 22.64%.
2. Capaian cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan tahun 2017 sebesar 27.18% apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (22,73%)
3. Capaian cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan tahun 2017 sebesar 27.18% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (26,40%) dan 2016 (26.68%) mengalami kenaikan.
4. Capaian cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan apabila dibandingkan dengan capaian cakupan pengawasan BBPOM di Surabaya (100%), BBPOM di Bandung (80%), BBPOM di Semarang (107.67%) maka capaian cakupan pengawasan BBPOM di Jakarta (120.05%) paling tinggi.

#### D. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat Dan Makanan

Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan pada tahun 2017 adalah sebesar 20,90% (dua puluh koma sembilan puluh persen) yaitu sebanyak 1.298 (seribu dua ratus sembilan puluh delapan) sarana dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi sebesar 6.211 (enam ribu dua ratus sebelas) sarana yang tersebar di 5 (lima) Kota Administrasi di wilayah DKI Jakarta. Selisih jumlah sarana distribusi antara baseline dengan jumlah sarana saat ini disebabkan angka baseline 3.721 tidak memperhitungkan sarana retail dan sarana yang tutup.

Adapun sebaran sarana distribusi di wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :



Gambar 3.35. Sebaran sarana distribusi obat di wilayah Provinsi DKI Jakarta

Dari grafik tersebut diatas sarana distribusi terbanyak berada di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur sedangkan letak Kantor BBPOM di Jakarta berada di *Remote Area* Kota Administrasi Jakarta Timur serta kondisi lalu lintas di DKI Jakarta yang tidak dapat diprediksi sehingga untuk mencapai lokasi sarana dibutuhkan waktu sekitar 2-3 jam.

Jumlah sarana distribusi yang tidak sebanding dengan jumlah SDM yang tersedia di Seksi Pemeriksaan BBPOM di Jakarta sebanyak 12 (dua belas) orang dengan kompetensi yang bervariasi, sehingga dibutuhkan perencanaan pengawasan sarana distribusi di wilayah BBPOM di Jakarta didasarkan pada analisis resiko dengan mempertimbangkan sarana yang tidak memenuhi ketentuan di tahun sebelumnya baik

temuan kritikal maupun major serta sarana yang belum pernah dilakukan pengawasan sebelumnya.



Gambar 3.36. Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016



Gambar 3.37. Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan tahun 2017 dengan Target tahun 2019



Gambar 3.38. Perbandingan capaian cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

Dari grafik tersebut diatas :

1. Capaian cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2017 sebanyak 1.298 sarana (20.90%) tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 23.28%.
2. Capaian cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan tahun 2017 sebesar 20.90% apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (24,23%) terdapat kekurangan capaian yang cukup besar yaitu 3.33%
3. Capaian cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan tahun 2017 sebesar 20.90% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan
4. Capaian cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan apabila dibandingkan dengan capaian cakupan pengawasan BBPOM di Surabaya (100,0%), Bandung (118%) dan Semarang (103.52%) maka cakupan pengawasan BBPOM di Jakarta paling rendah . Capaian yang rendah ini disebabkan oleh tingginya jumlah sarana distribusi importir produk kosmetik dan pangan di *cathment area* BBPOM di Jakarta. Selain itu, waktu pemeriksaan untuk sarana distribusi importir lebih lama dibandingkan dengan sarana distribusi ritel dan kurangnya jumlah SDM di Seksi Pemeriksaan BBPOM di Jakarta dibandingkan dengan BBPOM di Surabaya, Bandung, dan Semarang.

Kurangnya capaian cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan dipengaruhi oleh ketidaksesuaian data alamat di website Badan POM dengan database sarana BBPOM di Jakarta; waktu pengawasan yang dibutuhkan untuk sarana distributor jenis importir lebih lama karena seringnya melakukan pelanggaran sehingga petugas harus melakukan pendataan dalam rangka pengamanan produk maupun sarana; permintaan pendampingan oleh Badan POM dalam rangka sertifikasi CDOB dan surveilan CDOB; keterlibatan petugas dalam kegiatan Mobil Lab Keliling; serta permintaan pendampingan dari SKPD perihal pengawasan bahan berbahaya di sarana produksi.

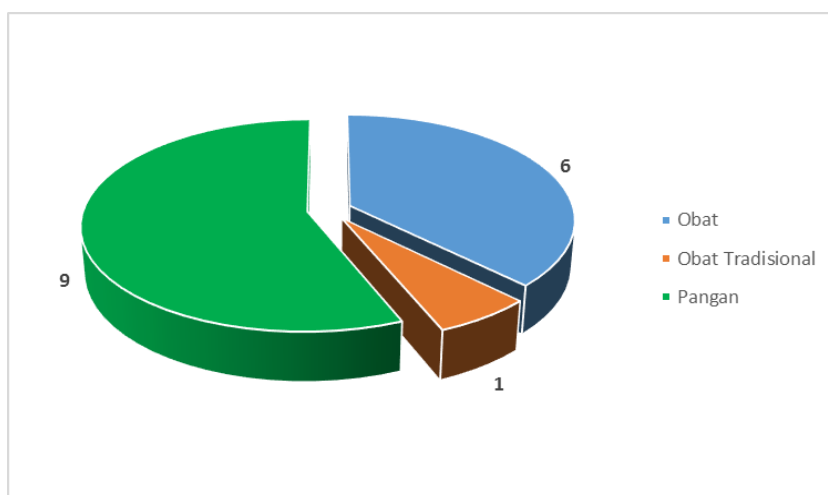
Selain itu, perencanaan pengawasan terhadap sarana distribusi obat dan makanan telah dilakukan di awal tahun namun selama tahun berjalan terdapat kasus antara lain penutupan apotek rakyat di Pasar Pramuka.

Dari riwayat capaian cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan selama 3 (tahun) tahun berturut-turut yang tidak memenuhi target RPJMN yang disebabkan

oleh hal-hal tersebut diatas maka BBPOM di Jakarta perlu meningkatkan cakupan pengawasan sarana distribusi dengan cara berkoordinasi dengan SKPD terkait sebagai wujud dari pelaksanaan PKS, meningkatkan kompetensi petugas, serta diperlukan pembagian cakupan pengawasan di wilayah Provinsi DKI Jakarta bersama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen.

### E. Jumlah Perkara Di Bidang Obat Dan Makanan

Tindak pidana obat dan makanan yang ditindaklanjuti secara “*pro justicia*” oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta selama tahun 2017 sebanyak 16 (enam belas) perkara atau sebesar 106.67% (seratus enam koma enam puluh tujuh persen). Dengan rincian perkara sebagai berikut :



Gambar 3.39. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan



Gambar 3.40. Perbandingan target dan realisasi jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017 dengan tahun 2015 dan 2016



Gambar 3.41. Perbandingan target dan realisasi jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017 dengan target tahun 2019



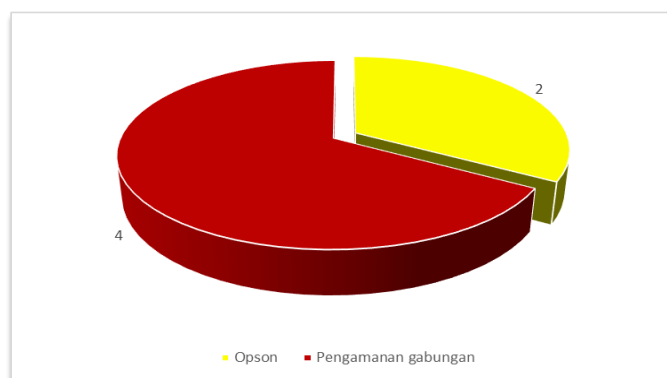
Gambar 3.42. Perbandingan capaian jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017 BBPOM Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

Dari grafik tersebut diatas :

1. Capaian jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017 sebanyak 16 (enam belas) perkara (106.67) melebihi target tahun 2017 sebesar 15 perkara. Capaian jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017 sebanyak 16 perkara apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (15 perkara) terdapat kelebihan capaian sebesar 1 (satu) perkara.
2. Capaian jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017 sebesar 16 perkara apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (13 perkara) mengalami kenaikan sebesar 23.08% (3 perkara).
3. Capaian jumlah perkara di bidang obat dan makanan BBPOM di Jakarta lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian jumlah perkara BBPOM di Bandung, Surabaya maupun di Semarang.

Perencanaan penyidikan terhadap obat dan makanan dilakukan diawal tahun dengan target perkara telah ditetapkan yaitu sebanyak 15 (lima belas) perkara yang direncanakan dicapai mulai dari bulan Februari sampai dengan November dalam tahun berjalan.

Selama tahun 2017, operasi khusus yang dilaksanakan oleh Seksi Penyidikan BBPOM di Jakarta adalah sebagai berikut :



Gambar 3.43. Capaian perkara dari Operasi Khusus Tahun 2017

Jumlah Penyidik PNS di BBPOM di Jakarta sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, namun yang aktif melakukan penyidikan sebanyak 8 (delapan) orang.

Dalam rangka peningkatan kompetensi PPNS yang dilaksanakan selama tahun 2017 antara lain Forum Peningkatan Kompetensi PPNS; Pertemuan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; Pelatihan Intelijen; serta untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan perdagangan internasional diselenggarakan pula *Coaching Clinic* yang membahas secara lebih khusus dan mendalam terkait isu pengawasan obat dan makanan di *post border*.

Kegiatan koordinasi dengan *Criminal Justice Sistem* (CJS) yang dilaksanakan oleh PPNS BBPOM di Jakarta selama tahun 2017 meliputi kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dilaksanakan 1 (satu) kali yang diikuti oleh Penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta yang mengundang Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, Petugas dari Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta, Petugas dari LIDPAM POMDAM JAYA, Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, serta Petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi DKI Jakarta. Forum ini sebagai inisiasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan Obat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta,

dengan meningkatkan koordinasi antara Penyidik PNS bersama lintas sektor tersebut diatas.

Pertemuan ini menghasilkan rekomendasi bahwa seluruh lintas sektor terkait siap mendukung dan siap melaksanakan operasi bersama dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan obat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

**Sasaran Sategis II**  
**Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat**

Sasaran Strategis II mempunyai 2 (dua) indikator kinerja utama dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
SS 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82.50%	82.55%	100.06%	Memuaskan
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 kabupaten / kota	6 kabupaten / kota	100.00%	Baik
<b>Rata - rata capaian</b>					<b>100.03%</b>	Memuaskan	

Tabel 3.5. Sasaran Strategis II tahun 2017

**A. Tingkat Kepuasan Masyarakat**

Pada tahun 2017, capaian tingkat kepuasan masyarakat sebesar 100.06%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan publik menjadi komitmen dari seluruh jajaran Balai Besar POM di Jakarta yang akan senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.



Gambar 3.44. Perbandingan realisasi 2017 dengan target 2019 (Tingkat Kepuasan Masyarakat)

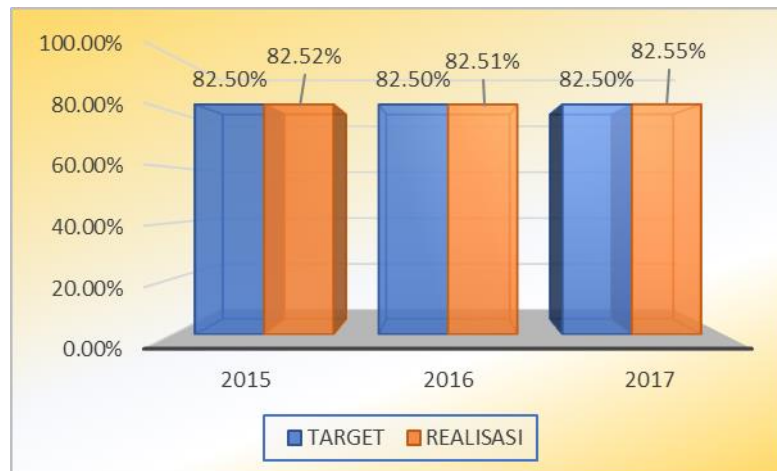
Tingkat kepuasan masyarakat jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMN tahun 2019, capaian yang diperoleh sebesar 99.94%. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.



Gambar 3.45. Perbandingan capaian tingkat kepuasan masyarakat BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

Berdasarkan perbandingan capaian tingkat Kepuasan Masyarakat dengan Balai Besar POM di Bandung, Surabaya dan Semarang, persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Balai Besar POM di Jakarta yaitu 100.06% masih berada di bawah persentase capaian ke 3 Balai Besar POM tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta harus senantiasa melakukan upaya peningkatan terhadap seluruh unsur pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Sedangkan perbandingan capaian Tingkat Kepuasan Masyarakat tahun 2017 terhadap capaian tahun 2016 dan 2015, sebagai berikut :



Gambar 3.46. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 dengan target dan realisasi tahun 2015 dan 2016 (Tingkat kepuasan masyarakat)

Perbandingan capaian tingkat kepuasan masyarakat untuk tahun 2017 dengan tahun 2016 menunjukkan peningkatan 0.04 %. Hal ini menunjukkan unsur pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan penilaian oleh pelanggan/masyarakat menunjukkan adanya peningkatan/perbaikan.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (Tingkat Kepuasan Masyarakat) yang mengacu SOP Pengukuran Kepuasan Pelanggan, POM - 15.05.CFM.01.SOP.01 dengan unsur pelayanan yang dinilai terdiri dari 12 unsur IKM yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan saran dan masukan, kenyamanan, kedisiplinan dan teknologi informasi.

Faktor pendukung pencapaian kinerja tersebut di atas, antara lain :

- a. Peningkatan sarana prasarana layanan konsultasi
- b. Peningkatan fasilitas pendukung layanan publik antara lain toilet tamu, ruang laktasi, fasilitas disabilitas, area bermain anak dan lain-lain.
- c. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia terkait layanan publik
- d. Memiliki tata laksana proses perizinan yang jelas dan terukur.

Balai Besar POM di Jakarta akan senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

*governance*) melalui peningkatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat serta profesionalisme aparatur.

## **B. Jumlah kabupaten/Kota yang memberikan Komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan**

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 100 %.

Hal yang sama jika capaian tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMN tahun 2019, menunjukkan capaian sebesar 100%.

Untuk perbandingan capaian tahun 2017 terhadap tahun 2016 menunjukkan hasil sebesar 100 %

Dengan grafik sebagai berikut :



Gambar 3.47. Perbandingan realisasi 2017 dengan target 2019 (Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan)



Gambar 3.48. Perbandingan target dan realisasi 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan)



Gambar 3.49. Perbandingan capaian jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

Berdasarkan perbandingan capaian jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan Obat dan Makanan dengan Balai Besar POM di Bandung, Surabaya dan Semarang menunjukkan bahwa seluruh Pemerintah Daerah telah memiliki komitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Dari data diatas, menunjukkan Komitmen Pemerintah Daerah semakin nyata dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan baik dilakukan secara mandiri dan atau terpadu, dengan mengalokasikan anggaran terkait pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Beberapa faktor pendukung pencapaian indikator kinerja di atas antara lain :

1. Tersedianya produk hukum yang disusun/diinisiasi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dengan Pemerintah Provinsi / Kota Kabupaten

Administrasi DKI Jakarta dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan, antara lain :

- Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor HK.08.1.23.02.15.0835 dan Nomor 7 tahun 2015 tentang pengawasan Obat dan Makanan secara Terpadu di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
  - Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor. HK.08.93.08.15.5662 dan Nomor 95 tahun 2015 tentang Pengawasan Pangan Olahan secara Terpadu di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
  - Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar POM di Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor HK.08.92.09.16.6210 dan Nomor 28 tahun 2016 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
3. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 157 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, yang mengatur kewenangan masing-masing SKPD dalam pengawasan Obat dan Makanan. Instruksi Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan
  4. Audiensi dan Koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Obat dan Makanan serta monitoring dan evaluasi hasil pengawasan Obat dan Makanan

Untuk selanjutnya, Balai Besar POM di Jakarta akan terus meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di provinsi DKI Jakarta, antara lain melalui upaya pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan secara terpadu, jejaring keamanan pangan terpadu, bimbingan teknis Obat dan Makanan ke pelaku usaha dan petugas, pemberian komunikasi, informasi dan edukasi, pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, pengawasan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) termasuk program Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKP-KS), *e-learning* Fasilitator Keamanan Pangan Sekolah, pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada industri rumah tangga pangan (IRTP) dan pangan siap saji (PKL) termasuk program stickerisasi pada PKL bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

## SASARAN PROGRAM II

### A. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat, pengawasan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Jakarta mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan kerjasama dengan lintas sektor. kegiatan untuk mewujudkan sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>						
	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	2000 layanan	2390	119.50 %	Memuaskan
		2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	34 kelurahan / pasar	34	100.00%	Baik
<b>Rata - rata capaian</b>					<b>109.75%</b>	<b>Memuaskan</b>	

Tabel 3.6. capaian kegiatan untuk mewujudkan sasaran Strategis II

#### 1. Jumlah Layanan Publik

Capaian jumlah layanan publik pada tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 119.50%. Tingginya capaian jumlah layanan publik disebabkan karena semakin tingginya kebutuhan informasi mengenai Obat dan Makanan dari masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (telepon, email, fax dan lain-lain) dan pameran. Pemenuhan layanan desk CAPA yang cukup tinggi, dimana layanan dimaksud merupakan media untuk mengakomodir kebutuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Cara Produksi yang Baik (GMP) dan Cara distribusi yang Baik (GDP) dalam proses sertifikasi (penerbitan rekomendasi produk dan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan) turut pula menjadi faktor peningkatan layanan publik di Balai Besar POM di Jakarta. Disamping itu penerimaan sampel pengujian pihak

ketiga dan permintaan narasumber dari lintas sektor/stakeholder yang meningkat secara signifikan, mengakibatkan jumlah layanan publik menjadi meningkat. Peningkatan ini disebabkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat/stakeholder terhadap Balai Besar POM di Jakarta dalam hal pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Persentase capaian tahun 2017 dibandingkan dengan target akhir RPJMN tahun 2019, menunjukkan capaian sebesar 113.81 %.



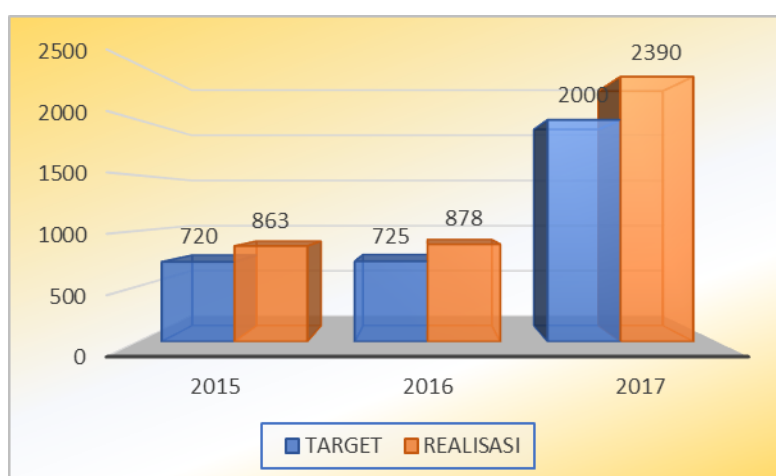
Gambar 3.50. Perbandingan realisasi tahun 2017 dengan target tahun 2019 (Jumlah layanan publik)

Capaian tersebut melebihi target akhir RPJMN disebabkan adanya peningkatan terhadap kebutuhan informasi Obat dan Makanan dari masyarakat yang cukup signifikan, adanya review terhadap ketentuan di bidang Obat dan Makanan sehingga menyebabkan pelaku usaha memiliki kewajiban melakukan sertifikasi/ pendaftaran obat dan makanan, penerimaan pengujian sampel pihak ketiga, permintaan narasumber dari lintas sektor / stakeholder yang kendali terhadap aspek tersebut diluar kendali Balai Besar POM di Jakarta. Peningkatan jumlah layanan yang terjadi tidak dapat diprediksi (fluktuatif) sehingga melebihi target akhir RPJMN tahun 2019.



Gambar 3.51. Perbandingan capaian jumlah layanan publik BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

Berdasarkan perbandingan capaian jumlah layanan publik dengan Balai Besar POM di Surabaya dan Balai Besar POM di Bandung, menunjukkan bahwa ke-4 Balai Besar tersebut telah mencapai persentase jumlah layanan publik yang melebihi melebihi target. Hal ini menunjukkan komitmen Badan POM (Balai Besar POM) tidak terkecuali Balai Besar POM di Jakarta untuk senantiasa meningkatkan layanan publik yang berkualitas.



Gambar 3.52. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017 dengan target dan realisasi tahun 2015 dan 2016 (Jumlah layanan publik)

Capaian layanan publik tahun 2017 terhadap capaian tahun 2016 dan 2015 tidak dapat dibandingkan, mengingat bahwa pada tahun 2017 terjadi penyesuaian terhadap target jumlah layanan publik dan review Renstra. Hal ini didasarkan pada data jumlah layanan publik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan adanya peningkatan dalam jumlah proses sertifikasi/penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta serta tingginya permintaan informasi Obat dan Makanan.

Faktor pendukung capaian indikator antara lain :

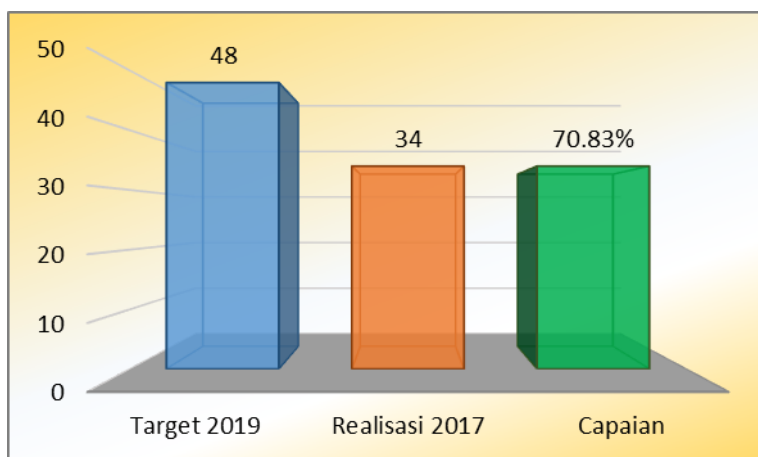
- a. Peningkatan jumlah layanan sertifikasi/rekomendasi hasil pemeriksaan sarana Balai dalam rangka perizinan, antara lain disebabkan meningkatnya kesadaran /kepatuhan pelaku usaha sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan dengan ketentuan yang berlaku, perubahan lingkungan strategis sehingga terdapat review terhadap peraturan yang menyebabkan pelaku usaha harus melakukan penyesuaian perizinan
- b. Peningkatan permintaan informasi dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (telepon, fax, email, media sosial seperti twitter, facebook). Permintaan informasi saat pameran, turut pula memberikan kontribusi terhadap peningkatan dimaksud. Operasional Mobil Laboratorium Keliling yang mencakup pula pemberian Komunikasi, Informasi dan /edukasi (KIE) akan meningkatkan jumlah layanan publik.
- c. Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor yang semakin intensif tidak hanya dari sisi pengawasan namun juga pembinaan seperti Penyuluhan / Bimbingan Teknis Obat dan Makanan, kegiatan KIE dengan SKPD terkait antara lain KIE dengan Tim Penggerak PKK, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW).
- d. Peningkatan jumlah target kegiatan pemberdayaan komunitas masyarakat seperti Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan (GKPD), Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dimana tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah memberdayakan komunitas desa/kelurahan dan komunitas pasar dalam melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan,
- e. Peningkatan jumlah penerimaan pengujian sampel pihak ketiga

Dalam hal ini, Balai Besar POM di Jakarta akan senantiasa berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, sebagai bentuk memberikan jaminan Keamanan Obat dan Makanan kepada masyarakat. Perbaikan terus diupayakan antara lain melengkapi sarana prasarana konsultasi layanan / ULPK seperti pengadaan komputer dan fasilitas internet di ruang pelayanan konsultasi, pengadaan media komunikasi informasi seperti leaflet Obat dan Makanan sehingga dapat semakin meningkatkan penyebaran informasi.

## **2. Jumlah Komunitas yang Diberdayakan**

Capaian jumlah komunitas yang diberdayakan pada tahun 2017 sebesar 100%, mencakup pelaksanaan pada kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa/Kelurahan sejumlah 27 (dua

puluh tujuh) kelurahan dan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya sejumlah 7 (tujuh) pasar.



Gambar 3.53. Perbandingan realisasi tahun 2017 dengan target tahun 2019 (Jumlah komunitas yang diberdayakan)

Persentase capaian tahun 2017 terhadap target akhir RPJMN tahun 2019, sebesar 73.91 % (belum mencapai target akhir RPJMN). Hal ini disebabkan penambahan target kelurahan pada kegiatan GKPD dan pasar percontohan pada kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya setiap tahunnya untuk setiap Balai Besar/Balai POM didasarkan pada target yang telah ditetapkan oleh Badan POM (*mandatory* dari Badan POM) dimana capaian akan mencapai 100% pada akhir RPJMN.

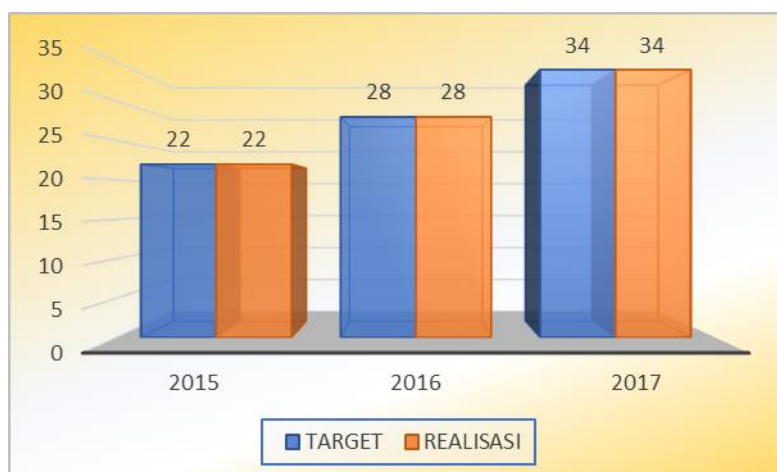


Gambar 3.54. Perbandingan capaian jumlah komunitas yang diberdayakan BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

Berdasarkan perbandingan capaian jumlah komunitas yang diberdayakan dengan Balai Besar POM Bandung, Surabaya dan Semarang menunjukkan bahwa ke-4 Balai Besar POM telah mencapai target.

Peningkatan jumlah komunitas dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Badan POM (Balai Besar POM), khususnya Balai Besar POM di Jakarta senantiasa melakukan pemberdayaan masyarakat, dimana komunitas yang diberdayakan jumlahnya meningkat setiap tahunnya, sehingga diharapkan masyarakat dapat melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Berdasarkan perbandingan capaian jumlah komunitas yang diberdayakan pada tahun 2017 terhadap capaian tahun 2015 dan 2016, sebagai berikut :



Gambar 3.55. Perbandingan target dan realisasi tahun 2016 dengan target dan realisasi tahun 2015 dan 2016 (Jumlah Komunitas yang diberdayakan)

Hasil tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan jumlah komunitas yang diberdayakan sejumlah 6 komunitas, meliputi penambahan komunitas untuk kegiatan GKPD yaitu Kelurahan Tengah Jakarta Timur, Kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan, Kelurahan Karang Anyar Jakarta Pusat, Kelurahan Kalideres Jakarta Barat dan Kelurahan Untung Jawa Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya terdapat penambahan 1 komunitas Pasar yaitu Pasar Mayestik Jakarta Selatan. Dalam hal penetapan Kelurahan dan Pasar tersebut merupakan masukan/usulan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Pada tahun 2017, Balai Besar POM di Jakarta melakukan sinergi terhadap ke-2 program tersebut, yaitu program GKPD dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Sinergi Program dilakukan di Kepulauan Seribu tepatnya di kelurahan Untung Jawa mengingat kepulauan Seribu sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Diharapkan dengan intervensi yang dilakukan, maka masyarakat yang berada di pulau Untung Jawa dan sekitarnya dapat memahami tentang bagaimana mempraktekkan keamanan pangan dengan baik, sehingga diharapkan membawa dampak

positif untuk masyarakat dengan meningkatnya perekonomian masyarakat melalui produk unggulan daerah yang berkualitas dan pangan yang aman dari UKM/IRTP setempat, juga akan memberikan citra yang positif untuk pariwisata di DKI Jakarta.

Faktor pendukung pencapaian indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dan kontinu dengan SKPD terkait di jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, PD Pasar Jaya, Kecamatan dan Kelurahan terkait, Tim Keamanan Pangan Kelurahan, Kader Keamanan Pangan Kelurahan
- b. Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan tahun sebelumnya untuk meminimalkan kendala atau permasalahan terhadap pelaksanaan kegiatan tahun berjalan
- c. Peran aktif Kader Keamanan Pangan Kelurahan dan Petugas Pengawas Pasar

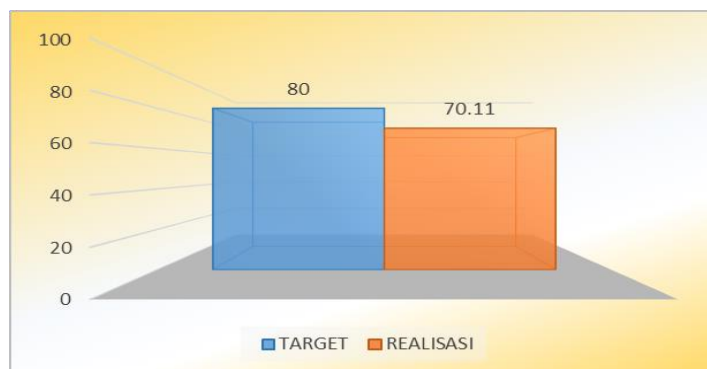
**Sasaran Strategis III**  
**Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan**

Sasaran Strategis III mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
SS 3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1.	Nilai SAKIP dari BPOM	A (80%)	BB (70.11)	87.64%	Cukup

Tabel 3.7. Sasaran Strategis III tahun 2017

Hasil penilaian laporan SAKIP 2017 Balai Besar POM di Jakarta dari Badan POM (Inspektorat) adalah BB, hasil ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2017 yaitu A.



Gambar 3.56. Perbandingan Target dan capaian Hasil Penilaian laporan SAKIP tahun 2017 Balai Besar POM di Jakarta

Tidak tercapainya indikator kinerja di atas karena pada komponen penilaian pengukuran kinerja belum menggunakan elektronik sistem secara otomatis dan ada beberapa indikator yang capaiannya jauh dari target yang telah ditentukan.

Apabila dibandingkan hasil tersebut dengan target tahun 2019 (akhir periode Renstra), maka capaian Realisasi Nilai SAKIP BBPOM di Jakarta baru mencapai 87.64%



Gambar 3.57 Perbandingan Capaian Hasil Penilaian SAKIP tahun 2017 BBPOM di Jakarta dengan target tahun 2019



Gambar 3.58 Perbandingan capaian hasil penilaian SAKIP 2017 BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu pada awal RPJMN, capaian Tahun 2017 ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.59. Perbandingan target dan realisasi Hasil Penilaian laporan SAKIP tahun 2017 Balai Besar POM di Jakarta dengan target tahun 2015 dan 2016

Hasil Penilaian SAKIP BBPOM di Jakarta Tahun 2017 telah memenuhi target yang ditetapkan, dan ada peningkatan capaian nilai dibandingkan dengan Tahun 2016.

### **SASARAN KEGIATAN III**

#### **Strategis Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Jakarta**

Sebagai satuan kerja di daerah Balai Besar POM di Jakarta tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis, namun juga tugas terkait dengan manajemen perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung sasaran strategis meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan. Balai mempunyai peranan dalam mencapai indikator terkait dengan kualitas RB, SAKIP, serta opini BPK terhadap laporan keuangan dan BMN. Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator:

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
<b>SP 3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>						
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90,0%	96,0%	106,67%	Memuaskan
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100%	Baik
<b>Rata - rata capaian</b>					<b>103,33%</b>	<b>Memuaskan</b>	

Tabel 3.8. Capaian kegiatan untuk mewujudkan sasaran Strategis III

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar telah memenuhi target yaitu sebesar 106,67%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada pasal 3 -5 dinyatakan bahwa :

- a. Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas standar untuk : Ruang Kantor, Ruang Penunjang, Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas, dan Kendaraan Dinas.
- b. Ruang Penunjang terdiri atas : Ruang Rapat, Ruang arsip aktif/inaktif/pelayanan publik, Toilet, Ruang Ibadah, Ruang Lobi, Ruang Pusat Data/ Server/ sistem informasi, Ruang perpustakaan, Ruang penyimpanan barang, Ruang Pusat CCTV, Ruang Poliklinik, Ruang Sentral telepon, Ruang pos penjagaan keamanan, ruang kantin, ruang Genset, Ruang LPSE, Ruang Dapur/pantry, Ruang Media Center, Ruang Istirahat, Ruang Panel listrik, Ruang Rokok dan Ruang Menyusui.
- c. Adapun dari 5 (lima) Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dapat terpenuhi sebanyak 4 (empat) macam

kecuali Rumah Dinas. Namun keterbatasan fasilitas sarana rumah dinas dapat dipenuhi dengan adanya anggaran sewa rumah dinas untuk Kepala Balai Besar POM di Jakarta.

- d. Pada tahun 2017 dari 21 (dua puluh satu) Ruang Penunjang yang dapat terpenuhi sebanyak 16 (enam belas) ruang. Sebanyak 5 (lima) ruang yaitu : ruang kantin , Ruang Media Center, Ruang LPSE, Ruang Istirahat dan Ruang Rokok tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan lahan dan bangunan.
- e. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor :HK.04.01.1.354.09.17.4333 tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Badan POM, maka Ruang Rokok tidak wajib untuk diadakan.
- f. Dari analisa tersebut di atas maka dapat disimpulkan :

No	Sarana Dan Prasana	Bobot	Persentase
1	Ruang Kantor	20%	20%
2	Ruang Penunjang (16 dari 21 )	20%	16%
3	Perlengkapan Kantor	20%	20%
4	Rumah Dinas (tidak ada)	20%	20%
5	Kendaraan Dinas	20%	20%
Persentase Standar Sarana dan Prasarana Kantor yang dapat terpenuhi			96,0%

Tabel 3.9 Analisa Persentase Standar Sarana dan Prasarana Kantor yang dapat terpenuhi

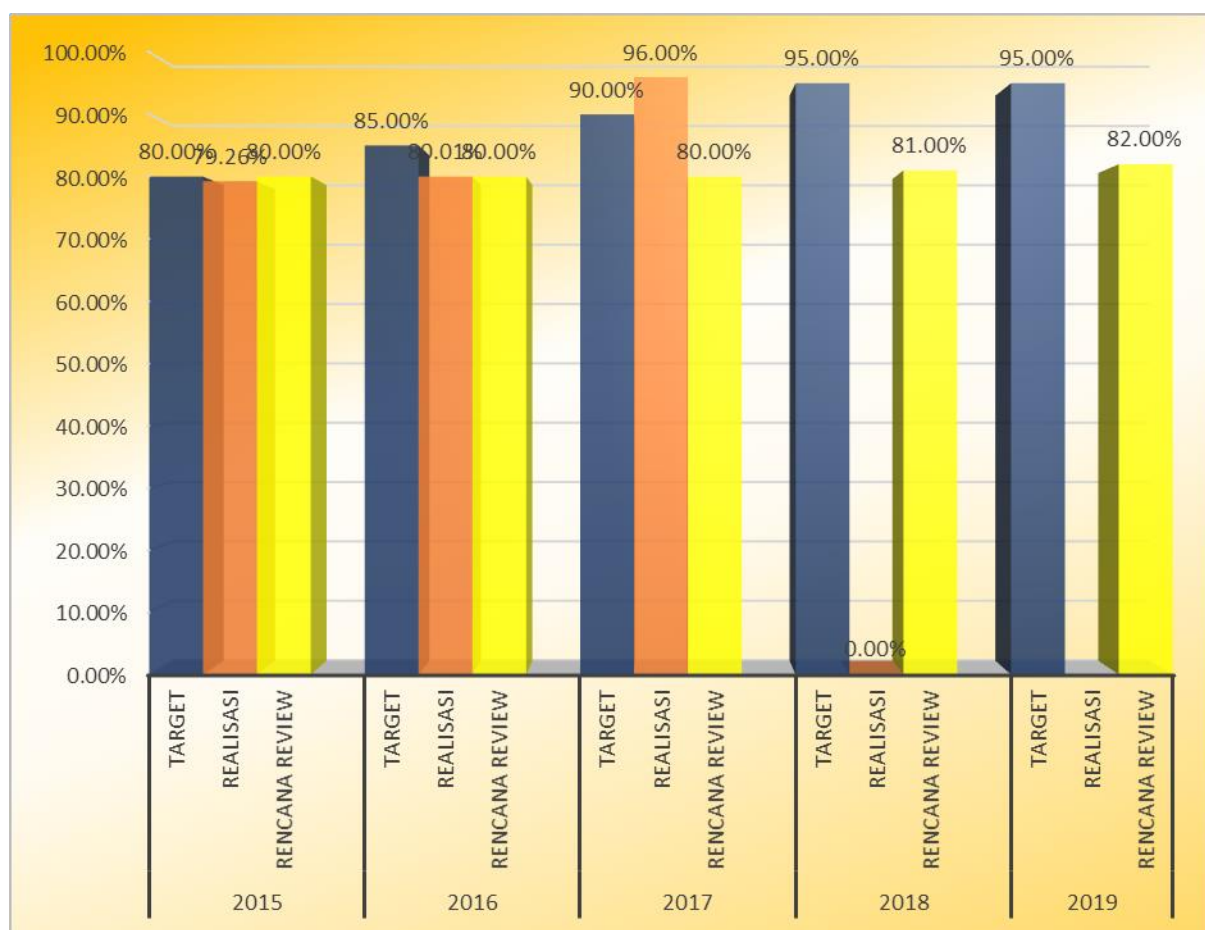
Sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di BBPOM di Jakarta adalah ruang penunjang yaitu : ruang kantin , Ruang Media Center, Ruang LPSE, dan Ruang Istirahat. Tidak tercapainya target tersebut karena luas area kantor di Balai Besar POM di Jakarta yang terbatas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengembangan perluasan ruangan dan fasilitas.

Perbandingan Kegiatan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2015-2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 3.60. Perbandingan persentase target dan realisasi tahun 2017 dengan target dan realisasi tahun 2015 dan 2016 (pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar)

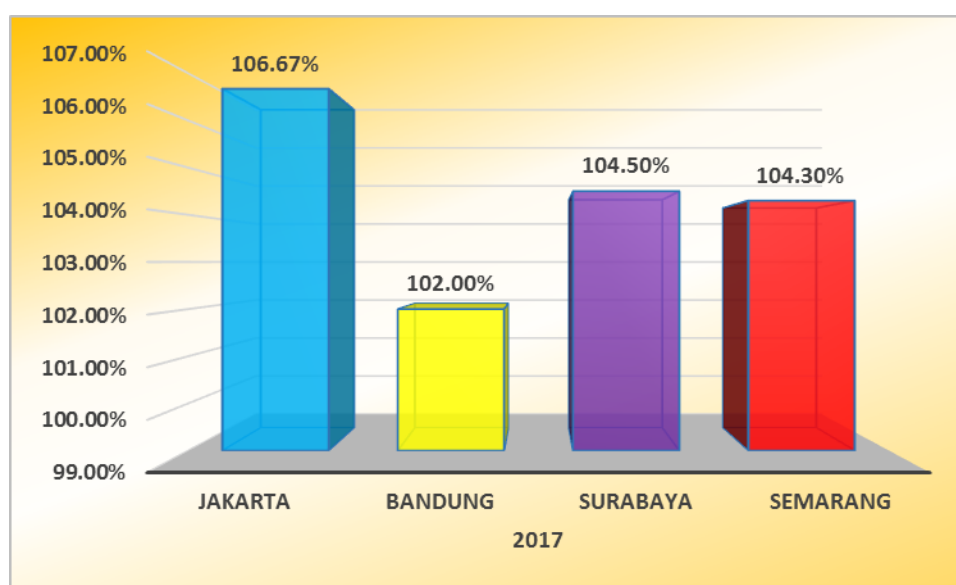
Sebagai perbandingan antara target dan capaian sepanjang RPJMN adalah sebagai berikut:



Gambar 3.61. Perbandingan Persentase capaian tahun 2017 dengan target renstra (pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar)

Pada saat target renstra ditetapkan, Peraturan Kepala Badan POM mengenai Standar Sarana Prasarana Kantor belum ditetapkan. Sehingga setelah dilihat *trend* capaian terhadap target, dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi target pemenuhan sarana dan prasarana tersebut diperlukan anggaran yang cukup besar, dilakukan secara bertahap, serta memerlukan lokasi perkantoran yang memungkinkan untuk pengembangan.

Fasilitas yang belum dapat dipenuhi oleh BBPOM di Jakarta sesuai standar yang ditetapkan antara lain: ruang merokok; ruang menyusui, ruang LPSE, luas ruang kerja aktif per pegawai, dan lain lain.



Gambar 3.62. Perbandingan capaian pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

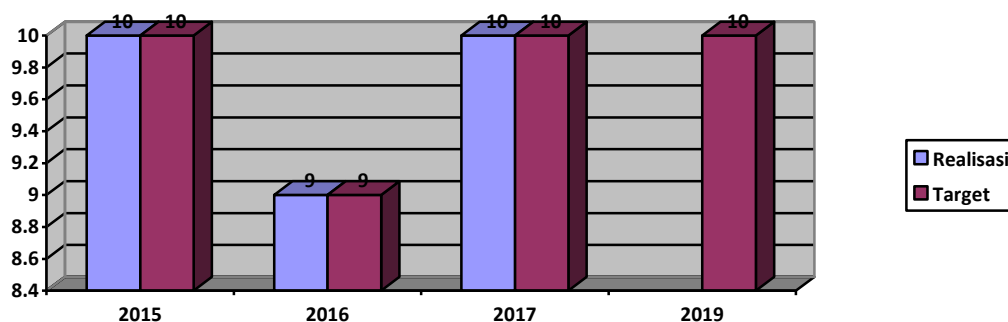
Perbedaan pencapaian pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di BBPOM Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang disebabkan oleh perbedaan sarana prasarana yang dimiliki masing-masing unit kerja serta faktor perbedaan luas dan status tanah dan bangunan.

SP. 3.2.1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Dalam upaya peningkatan Kualitas Kapasitas Kelembagaan, Balai mempunyai peranan dalam mencapai indikator terkait dengan kualitas RB, SAKIP, serta opini BPK terhadap laporan keuangan dan BMN. Pelaporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaksanakan tepat waktu menjadi poin penting dalam penilaian kapasitas kelembagaan Badan POM secara keseluruhan.

Untuk tahun 2017 Target 10 dokumen dapat terpenuhi 100% (baik), terdiri dari dokumen sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan (2017)
2. RKAKL/DIPA tahun n+1 (tahun 2018)
3. Laporan Kinerja tahun n-1 (tahun 2016)
4. Laporan Triwulanan I
5. Laporan triwulanan II
6. Laporan Triwulanan III
7. Laporan Tahunan tahun n-1 (tahun 2016)
8. Laporan keuangan tahun n-1 (tahun 2016)
9. Laporan Keuangan Semester 1 tahun n (tahun 2017)
10. Review Renstra



Gambar 3.63. Perbandingan target dan capaian 2017 dengan tahun 2015 dan 2016 (dokumen tepat waktu)

Untuk capaian dan target tahun 2015, terdapat tambahan target dokumen yaitu berupa Renstra 2015-2019 dan di tahun 2017 dan Tahun 2019 terdapat tambahan dokumen berupa review Renstra.

Tercapainya indikator kinerja tersebut diatas tidak terlepas komitmen penuh dari pimpinan serta seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta, dalam melaksanakan Perencanaan program dan kegiatan; dukungan data dan informasi serta kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang memadai.



Gambar 3.64. Perbandingan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu BBPOM di Jakarta-Bandung-Surabaya-Semarang

Untuk capaian ini, Balai Besar POM di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang telah mencapai target sesuai dengan apa yang direncanakan, terkait juga dengan siklus penganggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## 3.2. Realisasi anggaran

### 1. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta secara umum

#### Pagu Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar POM di Jakarta tahun anggaran 2017 menerima anggaran belanja sebesar Rp. 38,879,945,000.00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di Balai Besar POM di Jakarta.

No	Jenis Pengeluaran	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Belanja Pegawai	7,530,166,000.00	7,022,034,451.00	93,25%
2.	Belanja Barang	16,965,995,000.00	15,926,118,525.00	93,87%
3.	Belanja Modal	14,383,784,000.00	14,106,067,422.00	98,07%
	TOTAL	38,879,945,000.00	37,054,220,398.00	95,30%

Tabel 3.10. DIPA Balai Besar POM di Jakarta tahun 2017

## 2. Realisasi anggaran Balai Besar/Balai POM per Sasaran Strategis

KEGIATAN		DIPA	REALISASI	%
<b>Sasaran Strategis 1</b>				
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>				
1	Sampling dan Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	1.733.929.000	1.683.761.394	97,11%
2	Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	195.073.000	171.032.660	87,67%
3	Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	780.662.000	710.123.687	90,96%
4	Penyelidikan dan Penyidikan Obat dan Makanan	771.945.000	636.968.903	82,51%
<b>Sasaran Strategis 2</b>				
<b>Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat</b>				
1	Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	2.499.017.000	2.451.628.328	98,10%
2	Komunitas yang diberdayakan Balai besar POM di Jakarta	1.558.709.000	1.415.326.915	90,80%
<b>Sasaran Strategis 3</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana	14.438.917.000	14.150.361.522	98,00%
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi	3.275.085.000	3.086.653.281	94,24%

Tabel 3.11. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per sasaran strategis

### **3. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan anggaran di Balai Besar/Balai POM (internal dan eksternal).**

A. Output Penyelidikan dan Penyidikan Obat dan Makanan serapan 84,29% disebabkan oleh

a. Faktor Internal

1. Pada tahun 2017 sewa kendaraan roda 6 banyak yang tidak terserap karena barang bukti tidak membutuhkan kendaraan roda 6 untuk mobilitasnya
2. Tidak terserap anggaran pertemuan lintas sector yang direncanakan diadakan di Bogor
3. Belanja bahan seperti dokumentasi tidak dibutuhkan sebanyak yang dianggarkan

b. Faktor Eksternal

1. Temuan penyidikan tahun ini meningkat menjadi 16 perkara tetapi jumlah barang buktinya tidak terlalu besar
2. Adanya perubahan acara di unit pusat yaitu pertemuan lintas sector sehingga anggaran tidak terserap

B. Output Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan disebabkan oleh :

a. Faktor Internal :

1. Banyaknya perjalanan yang direncanakan lebih dari 8 jam tetapi realisasinya hanya dibawah 8 jam sehingga uang harian lebih dari 8 jam banyak yang tidak terserap
2. Ada beberapa pelatihan yang tidak jadi dilakukan

b. Faktor Eksternal :

Pengawasan sarana Produksi banyak tahun 2017 karena permintaan penyaksian pemusnahan produk

### **4. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut.**

1. Inventarisasi kegiatan yang bersumber dana RM dan dilakukan secepatnya diawal tahun, karena kegiatan yang bersumber dana PNBP biasanya cair sekitar April. Sehingga anggaran yang bersumber RM harus diutamakan pelaksanaannya

2. Mempercepat perencanaan dan pengadaan barang dan jasa baik yang menggunakan sistem lelang maupun yang pengadaan langsung serta menggunakan e-catalog
3. Konsultasi dan koordinasi serta refreshing tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP
4. Merubah sistem pengelolaan keuangan dengan mengganti petugas pengelola keuangan yang tadinya berada pada unit teknis menjadi petugas yang ada di Tata Usaha

### C. Analisis Efisiensi Kegiatan

Disajikan informasi mengenai pengukuran efisiensi kegiatan Balai Besar POM. Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

- Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien
- Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Untuk kegiatan yang sangat efisien, dijelaskan faktor-faktor pendukungnya, sedangkan untuk komponen kegiatan yang tingkat efisiensinya negatif (tidak efisien), dijelaskan faktor penyebab dan upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	KATEGORI
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian Terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Sampling dan Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Efisien
2	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Efisien
		Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	Tidak Efisien
		Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Penyelidikan dan Penyidikan Obat dan Makanan	Efisien
		Meningkatnya kerjasama komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan Publik Balai Besar POM	Efisien
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Jakarta	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Efisien
		Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi	Efisien

Tabel 3.12. Efisiensi kegiatan Balai Besar POM di Jakarta

Dari Tabel di atas terlihat bahwa semua kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta Efisien kecuali untuk kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.

Secara persentase pencapaian apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyerapan anggarannya besar untuk output Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi karena pada trisemester keempat terjadi revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target yaitu peningkatan evaluasi pengawasan dengan koordinasi lintas sector serta peningkatan kompetensi petugas. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan belum efisien dan capaian target Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan belum mencapai target 100% Hal ini disebabkan karena :

1. Perubahan arah kebijakan pemeriksaan sarana distribusi yang lebih mengutamakan pemeriksaan importir.
2. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan satu sarana importir sebanding dengan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dua sampai tiga sarana distribusi biasa.



# **BAB IV**

# **PENUTUP**

# P E N U T U P

## 4.1 Kesimpulan

Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil mencapai target Sasaran Strategis yaitu 3 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian Sasaran Strategis yang ditunjukkan oleh Balai Besar POM di Jakarta pada tahun anggaran 2017 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis kriteria pencapaiannya Memuaskan kecuali Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dengan kriteria pencapaian Cukup.
2. Pencapaian 8 Indikator Utama dengan rata-rata 103,75 % dengan kriteria 6 Indikator Memuaskan, 1 indikator baik dan 1 indikator Cukup. Indikator yang Cukup adalah Nilai SAKIP dari Badan POM.
3. Dari 9 kegiatan utama dalam mendukung Sasaran, ada satu kegiatan yang tidak efisien yaitu Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan. Hal ini terjadi karena serapan anggarannya besar sementara pencapaian outputnya lebih kecil dari Serapan anggaran.

Namun dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut masih terdapat kekurangan yang harus menjadi petunjuk bagi arah kebijakan di masa yang akan datang antara lain rendahnya Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di sektor publik 92,25% dan Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yaitu sebesar 89,78%.

## 4.2. Saran

Rencana Tindak lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja yang akan dilakukan adalah :

1. Usulan untuk system Pelaporan dan Pengukuran Kinerja yang Terintegrasi secara Elektronik sehingga tidak banyak system Pelaporan dan Pengukuran Kinerja yang menambah penggunaan Sumber Daya. Hal ini untuk Efisiensi Sumber Daya.
2. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Badan POM dan Pengembangan Parameter Uji Kritis serta Optimalisasi penggunaan sumber daya laboratorium serta pemanfaatan Uji Cepat dalam mendukung Percepatan Kinerja Laboratorium
3. Melakukan usulan pengadaan tanah dan bangunan untuk pengembangan gedung laboratorium dan pelayanan publik Balai Besar POM di Jakarta. Mengingat berbagai kendala dalam pencapaian Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang akar masalahnya Karena posisi kantor yang di *remote area* dan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pengembangan ruangan sehingga standar minimal ruangan dan pemenuhan standar minimal alat laboratorium tidak tercapai
4. Penambahan Peningkatan Kompetensi Petugas baik *Soft Competency* dan *Hard Competency* dalam rangka peningkatan Kinerja BBPOM di Jakarta
5. Hilirisasi hasil penelitian dari para peneliti yang mendukung Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta dengan meningkatkan Kerjasama dengan Universitas
6. Peningkatan Layanan Publik dengan renovasi ruang Pelayanan dan melakukan Inovasi dalam Pelayanan sehingga nilai Pelayanan Publik sangat Baik
7. Penguatan tindak lanjut pemeriksaan bersama lintas sektor terkait

8. Meningkatkan penyelidikan dan penyidikan ke hulu dan mengungkap actor intelektual serta meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum
9. Memperkuat kerjasama pengawasan *post border* bersama Kanwil Bea dan Cukai Jakarta dalam kerangka *joint border inspection* dan tindak lanjut penyidikan melalui pendekatan *multi-door system*
10. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor dan melakukan evaluasi Perjanjian Kerjasama serta penguatan penerapan Perjanjian Kerjasama.
11. Melakukan Pengkajian beberapa Perjanjian Kerjasama disesuaikan dengan arah dan kebijakan Badan POM serta isu strategis pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta
12. Melakukan review anggaran secara periodic dan untuk revisi anggaran disesuaikan dengan capaian Output. Anggaran yang direvisi untuk kegiatan yang mendukung target output disesuaikan dengan persentase capaian output.



# LAMPIRAN

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Jakarta

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
			2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta													
	SS 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					2749312	3029353	3509645	4226574	4980855	BBPOM di Jakarta	Badan POM RI
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	92,5	93	93,5	94							
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	81	82	83	84							
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90	91	92	93							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
			2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80	81	82	83							
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,6	89,1	89,6	90,1							
	SS 2	<b>Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan</b>					1922339	1952587	2601083	2991300	3011300		
	2,1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,5	82,5	82,6	82,6							
	2,2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan	6	6	6	6							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
			2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
		Makanan											
	SS 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM					5856208	4928222	5028222	5507801	5607801		
	3,1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	B	A	A	A							
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>													
	SP 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					2749312	3029353	3509645	4226574	4980855		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
			2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	92,5	93	93,5	94							
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	81	82	83	84							
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90	91	92	93							
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80	81	82	83							
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,6	89,1	89,6	90,1						BBPOM di Jakarta	Badan POM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
			2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	SP 2	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan					1922339	1952587	2601083	2991300	3011300		
	2,1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,5	82,5	82,6	82,6							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
			2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	2,2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6	6	6	6							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
			2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	SP 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM					5856208	4928222	5028222	5507801	5607801		
	3,1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	B	A	A	A							
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jakarta</b>							10.527.859	9.910.162	11.138.950	12.725.675	13.599.956		
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia												
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.400	3.400	3.400	3.400	1.823.040	1.823.040	2.248.152	2.697.782	3.237.339		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
			2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
J	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) (dalam persen)	100	100	100	100							
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22,64	22,64	22,73	22,73	197.750	205.675	254.305	305.166	305.166		
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	22,8	23,28	23,75	24,23	616.022	888.138	894.688	1.073.625	1.288.350		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
			2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	15	15	15	15	112.500	112.500	112.500	150.000	150.000		
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	725	730	735	740	1.151.095	1.216.903	1.851.083	2.221.300	2.221.300		
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	28	34	40	46	771.244	735.684	750.000	770.000	790.000		
	8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	85	90	95	95	1.897.896	1.897.896	1.897.896	2.277.475	2.277.475		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target				Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
			2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	10	9	10	3.958.312	3.030.326	3.130.326	3.230.326	3.330.326		I
Noted : Baseline sarana produksi : 258, sarana distribusi : 1414													

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Jakarta tahun 2017

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93.00%
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82.00%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhisyarat	91.00%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81.00%
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	89.10%
2	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82.50%
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 kabupaten / kota
3	<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>	1. Nilai SAKIP dari BPOM	A
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3400
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	1. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22.64%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	1. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	23.28%
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	1. Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	15
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	2000
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	34 kelurahan / pasar

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90.00%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Jakarta, 6 Januari 2017

Kepala Balai Besar POM di Jakarta

Dra Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes

NIP. 19620209 198703 2 001

Lampiran 3. Perjanjian Kerja Balai Besar POM di Jakarta

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
BALAI BESAR POM DI JAKARTA**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00 persen
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,00 persen
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,00 persen
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	81,00 persen
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,10 persen
2	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,5
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 kabupaten / kota
3	<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b>	Nilai SAKIP dari BPOM	A
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.400 sampel
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100 persen
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22,64 persen
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	23,28 persen
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	15 perkara
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	2000 layanan
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	34 kelurahan / pasar
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	90 persen
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10 dokumen

**Kegiatan**

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jakarta

**Anggaran**

Rp 38.483.891.000,00

Jakarta, 6 Januari 2017

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Dra Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes  
NIP. 19620209/198703 2 001

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

**PENGUKURAN KINERJA**

**BALAI BESAR POM DI JAKARTA TAHUN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>							
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	%	93,00	99,56	107,05	Memuaskan
		1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	82,00	84,38	102,90	Memuaskan
		1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	91,00	98,73	108,49	Memuaskan
		1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	81,00	97,62	120,52	Memuaskan
		1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	89,10	92,07	103,33	Memuaskan
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	82.5	82.55	100,06	Memuaskan
		2,2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/Kota	6	6	100,00	Baik
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM		80 (A)	70.11 (BB)	87,63	Cukup
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jakarta</b>							
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>							
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	3.400	3.401	100,03	Memuaskan
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) (dalam persen)	%	100,00	92,25	92,25	Cukup
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	%	22,64	27,18	120,05	Memuaskan
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	%	23,28	20,90	89,78	Cukup
3	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Perkara	15	16	106,67	Memuaskan
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan,</b>							
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BB/BPOM	Layanan Publik	2000	2.390	119,50	Memuaskan
		2 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Komunitas	34	34	100,00	Baik
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM</b>							
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	%	90	96	106,67	Memuaskan
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	2 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	10	10	100,00	Baik

Lampiran 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BBPOM di Jakarta

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		TARGET				REALISASI				KETERANGAN	
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12		
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12		
			1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	%	93,00	93,00	93,00	93,00	97,67	98,74	98,94	99,56
			1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	82,00	82,00	82,00	82,00	80,00	78,15	76,96	84,38
			1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	91,00	91,00	91,00	91,00	100,00	98,02	98,78	98,73
			1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	81,00	81,00	81,00	81,00	100,00	100,00	97,35	97,62
			1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	89,10	89,10	89,10	89,10	87,72	92,95	92,21	92,07
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	2,1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	0,00	0,00	82,5	82,5	0,00	82,17	82,55	82,55	
	2,2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/Kota	6	6	6	6	6	6	6	6	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3,1	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM		A	A	A	A	BB	BB	BB	BB	
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>												
	SP 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan										
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	%	93,00	93,00	93,00	93,00	97,67	98,74	98,94	99,56	
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	82,00	82,00	82,00	82,00	95,00	96,69	97,39	84,38	
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	91,00	91,00	91,00	91,00	100,00	98,27	98,94	98,73	
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	81,00	81,00	81,00	81,00	100,00	100,00	97,35	97,62	
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	89,10	89,10	89,10	89,10	87,72	92,95	92,21	92,07	
	SP 2	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan										
	2,1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	0,00	0,00	82,5	82,5	0,00	82,17	82,55	82,55	
	2,2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/Kota	6	6	6	6	6	6	6	6	
	SP 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM										
	3,1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM		A	A	A	A	BB	BB	BB	BB	
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jakarta</b>												
	1	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di										
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	960	1.832	2.907	3.400	282	1.246	1.987	3.401	
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) (dalam persen)	%	20,00	50,00	75,00	100,00	6,18	43,31	75,70	92,25	
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	%	6,65	13,30	19,95	22,64	5,84	12,50	18,27	27,18	
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	%	5,36	10,73	16,73	23,28	2,92	11,46	15,36	20,90	
	5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Perkara	2	7	13	15	1	2	2	16	
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Layanan Publik	500	1000	1500	2000	707	1.157	1.842	2.390	
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Komunitas	28	34	34	34	28	34	34	34	
	8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	%	90	90	90	90	96,00	96,00	96,00	96,00	
	9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen	3	7	7	10	3	7	7	10	

Badan POM RI

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KRITERIA
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Sampling dan Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	<b>Input :</b> Dana	1,733,929,000	1,683,761,394	97.11%	Cukup
			<b>Output :</b> Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3400	3401	100.03%	Memuaskan
		2 Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	<b>Input :</b> Dana	195,073,000	171,032,660	87.67%	Cukup
			<b>Output :</b> Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22.64%	27.18%	120.05%	Memuaskan
		3 Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	<b>Input :</b> Dana	780,662,000	710,123,687	90.96%	Cukup
			<b>Output :</b> Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	23.28%	20.9%	89.78%	Cukup
		4 Penyelidikan dan Penyidikan Obat dan Makanan	<b>Input :</b> Dana	771,945,000	636,968,903	82.51%	Cukup
			<b>Output :</b> Jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP	15	16	106.67%	Memuaskan
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan	1 Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	<b>Input :</b> Dana	2,499,017,000	2,451,628,328	98.10%	Cukup
			<b>Output :</b> Jumlah layanan publik	2000	2390	119.5%	Memuaskan

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KRITERIA	
	partisipasi masyarakat		BB/BPOM					
		2	Komunitas yang diberdayakan Balai besar POM di Jakarta	<b>Input :</b> Dana	1,558,709,000	1,415,326,915	90.80%	Cukup
				<b>Output :</b> Jumlah komunitas yang diberdayakan	34	34	100.00%	Baik
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana	<b>Input :</b> Dana	14,438,917,000	14,150,361,522	98.00%	Cukup
				<b>Output :</b> Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	90.00%	96.00%	106.67%	Memuaskan
		2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi	<b>Input :</b> Dana	3,275,085,000	3,086,653,281	94.24%	Cukup
				<b>Output :</b> Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100.00%	Baik

Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS		KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
				INPUT	OUTPUT				
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian Terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Sampling dan Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	97.11%	100.03%	1.03	1	Efisien	0.03
2.	Meningkatnya jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	87.67%	114.27%	1.30	1	Efisien	0.30
		Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	90.96%	89.78%	0.98	1	Tidak Efisien	-0.01
		Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Penyelidikan dan Penyidikan Obat dan Makanan	82.51%	106.67%	1.29	1	Efisien	0.29
		Meningkatnya kerjasama komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan Publik Balai Besar POM	98.10%	119.5%	1.22	1	Efisien	0.22
		Komunitas yang diberdayakan Balai besar POM di Jakarta	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	90.80%	100.00%	1.09	1	Efisien	0.09
3.	Meningkatnya	Pengadaan	Pengadaan	98.00%	106.67%	1.10	1	Efisien	0.10

NO	SASARAN STRATEGIS		KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
				INPUT	OUTPUT				
	kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Jakarta	Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana dan Prasarana						
		Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi	94.24%	100.00%	1.06	1	Efisien	0.06

Lampiran 8. Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat

Tabel 11. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Pelayanan U1 s.d. U6 pada 24 Balai Besar/Balai POM

No.	Nama Balai Besar/ Balai POM	U1		U2		U3		U4		U5		U6	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	BBPOM Banda Aceh*	87,52	75,00	87,66	77,61	84,29	80,22	86,70	81,82	86,55	82,40	86,17	80,27
2	BBPOM Medan	77,13	80,44	81,55	81,69	79,69	79,17	83,45	84,18	81,70	77,94	82,78	79,32
3	BBPOM Padang	78,34	83,33	77,37	83,34	72,95	83,76	76,19	84,47	77,09	85,42	75,77	84,31
4	BPOM Bengkulu	86,12	84,17	87,12	88,06	87,90	84,22	87,89	82,78	86,27	85,00	86,70	90,62
5	BPOM Jambi	79,64	74,61	78,24	74,80	77,99	75,43	78,14	76,58	78,34	74,23	74,80	73,48
6	BPOM Batam*	N/A	90,90	N/A	87,31	N/A	86,70	N/A	83,90	N/A	85,91	N/A	84,22
7	BBPOM Bandar Lampung	83,24	87,51	84,95	88,61	78,62	85,43	83,66	88,08	83,18	86,27	78,54	87,12
8	BBPOM Pekanbaru	100,00	95,84	100,00	95,02	100,00	94,18	100,00	96,40	96,89	95,42	99,28	92,23
9	BPOM Pangkalpinang	78,75	87,53	76,71	89,21	77,30	85,87	75,61	85,63	75,92	87,13	75,98	86,00
10	BBPOM Jakarta*	79,64	77,50	81,34	80,00	76,38	79,55	81,97	80,00	79,18	80,00	78,61	78,35
11	BBPOM Semarang*	84,63	84,66	85,33	83,36	81,83	84,11	85,62	86,75	85,46	84,09	83,16	83,37
12	BBPOM Yogyakarta	77,54	82,09	78,90	82,84	77,38	83,13	77,79	91,44	77,14	80,87	76,53	81,87
13	BBPOM Surabaya	91,27	88,75	89,20	88,12	87,71	86,27	92,52	91,67	88,75	83,77	83,53	83,50
14	BBPOM Pontianak	77,09	80,44	83,48	80,57	78,57	82,71	83,89	84,50	79,59	81,25	76,40	80,02
15	BBPOM Samarinda*	79,01	83,86	79,64	82,35	79,13	83,11	75,14	76,17	76,74	80,22	79,13	80,92
16	BBPOM Banjarmasin	81,70	90,83	80,33	88,06	80,21	90,00	81,71	89,37	80,87	88,75	81,02	88,35
17	BBPOM Mataram*	81,02	80,29	81,91	79,49	76,56	79,58	77,94	79,51	75,46	80,78	77,92	79,90
18	BBPOM Manado	82,24	75,83	82,45	75,83	79,95	75,83	77,18	72,60	81,13	75,83	83,88	75,83
19	BPOM Gorontalo	81,70	82,10	84,25	80,85	85,29	80,67	85,74	80,84	83,50	78,75	84,69	79,33
20	BPOM Kendari*	87,10	82,16	89,09	87,56	86,22	85,61	87,12	83,29	85,38	87,30	85,82	86,61
21	BPOM Palu*	79,86	75,92	77,12	73,41	75,46	73,44	74,71	72,29	73,91	68,00	74,66	71,48
22	BBPOM Makassar	81,45	89,20	84,18	89,49	79,05	89,82	81,77	89,45	80,40	86,27	79,75	88,68
23	BPOM Ambon*	88,33	95,00	89,72	96,11	87,82	96,04	87,94	93,06	89,59	95,00	87,93	95,70
24	BPOM Manokwari	82,63	90,00	78,13	88,33	83,66	88,96	79,84	90,01	82,69	89,17	77,60	89,06


Tabel 12. Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Pelayanan U7 s.d. U12 pada 24 Balai Besar/Balai POM


No.	Nama Balai Besar/ Balai POM	U7		U8		U9		U10		U11		U12	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	BBPOM Banda Aceh*	80,31	77,35	83,48	77,11	88,67	81,30	84,72	75,00	86,12	73,23	85,19	79,69
2	BBPOM Medan	72,59	78,93	78,27	82,90	84,59	84,20	81,67	80,84	82,39	84,21	80,83	81,67
3	BBPOM Padang	80,22	86,27	79,45	86,40	80,32	85,43	79,46	84,59	78,61	85,34	82,50	86,67
4	BPOM Bengkulu	67,33	79,18	76,31	84,73	88,72	82,92	85,76	85,84	88,64	87,02	90,52	86,67
5	BPOM Jambi	73,94	77,75	78,28	78,16	80,45	77,54	76,75	72,73	78,67	75,64	79,31	77,34
6	BPOM Batam*	N/A	78,33	N/A	83,40	N/A	90,02	N/A	88,33	N/A	88,71	N/A	90,00
7	BBPOM Bandar Lampung	84,20	87,92	84,30	86,39	86,36	88,14	84,63	87,97	84,64	88,53	86,54	86,67
8	BBPOM Pekanbaru	96,89	94,60	98,62	95,28	100,00	95,00	98,97	94,59	99,18	95,67	97,92	95,00
9	BPOM Pangkalpinang	79,02	89,24	78,91	89,46	80,45	91,26	77,10	84,17	77,04	86,75	78,33	87,50
10	BBPOM Jakarta*	76,31	78,77	82,61	85,15	82,36	87,54	78,41	87,50	82,80	88,55	80,83	82,50
11	BBPOM Semarang*	84,26	86,38	87,94	85,61	88,26	87,51	86,31	84,09	92,88	84,57	85,34	85,23
12	BBPOM Yogyakarta	76,53	84,17	78,94	85,02	79,60	85,45	77,50	81,25	78,50	84,18	81,67	83,33
13	BBPOM Surabaya	85,58	84,68	88,08	85,83	88,97	89,22	87,51	82,09	88,79	86,92	90,83	91,67
14	BBPOM Pontianak	77,94	82,53	73,63	86,40	76,67	86,47	85,42	82,09	76,01	84,25	76,67	84,17
15	BBPOM Samarinda*	76,66	83,88	81,83	85,43	82,58	86,99	79,50	80,73	80,96	83,88	83,00	84,38
16	BBPOM Banjarmasin	81,25	89,24	84,45	90,30	83,79	88,35	80,87	87,92	83,38	88,02	85,83	88,33
17	BBPOM Mataram*	76,81	81,83	82,00	84,64	94,84	83,66	81,81	78,85	84,24	83,69	82,14	84,62
18	BBPOM Manado	80,77	75,83	86,44	75,83	88,66	76,04	82,50	75,83	85,99	75,50	87,50	75,83
19	BPOM Gorontalo	91,97	86,67	90,18	87,22	88,40	87,55	85,27	82,50	83,76	84,04	84,82	83,33
20	BPOM Kendari*	85,09	83,33	88,15	84,79	89,97	91,32	84,56	84,24	87,30	91,84	84,48	91,30
21	BPOM Palu*	77,22	72,02	78,74	76,89	80,22	79,65	77,19	71,25	80,02	80,11	76,72	80,00
22	BBPOM Makassar	75,61	91,67	79,65	91,95	84,54	91,27	80,73	90,84	81,36	90,87	79,76	91,67
23	BPOM Ambon*	89,40	96,25	91,12	98,08	90,64	98,13	86,62	97,50	88,21	97,84	86,21	96,67
24	BPOM Manokwari	74,47	91,67	76,38	95,32	79,64	95,83	77,58	94,17	78,83	92,67	80,36	98,33


**Keterangan:**


\* : Jumlah responden kurang dari 30 responden

N/A : Data tidak tersedia

 : Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 81,26 – 100)

 : Mutu Pelayanan B (Baik; 62,51 - 81,25)

 : Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 43,76 - 62,50)

 : Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25 - 43,75)

## Lampiran 9. Jenis Permohonan Sertifikasi

Jenis Permohonan	PBF	PBBBF	Produksi Pangan	Distribusi Pangan	Produksi Obat Tradisional	Importir Obat Tradisional	Produksi Kosmetik	Importir Kosmetik	Importir Suplemen Makanan	TOTAL
Permohonan Izin ( Baru ) / NIE Baru	22	3	35	94	4	1	10	0	1	170
Penyesuaian Izin	2	1	0	0	1	0	1	0	0	5
Pengakuan Cabang	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Perpanjangan Izin Sarana /NIE	28	8	2	0	3	0	11	0	0	52
Perpindahan Alamat	11	6	1	4	0	0	1	0	0	23
Perubahan Layout	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Penambahan Gudang	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pencantuman tulisan Halal	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>20</b>	<b>49</b>	<b>98</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>278</b>

Lampiran 10. Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan / Pertanyaann

No.	Sarana Yang Digunakan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1.	Email	3	4	1	0	0	4	0	0	5	5	0	0	22
2.	Langsung	164	128	154	70	122	75	159	128	136	127	140	89	1492
3.	Telepon	43	32	39	9	16	4	38	22	14	17	17	25	276
4.	Fax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Surat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	SMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Medsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>210</b>	<b>164</b>	<b>194</b>	<b>79</b>	<b>138</b>	<b>83</b>	<b>197</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>149</b>	<b>157</b>	<b>114</b>	<b>1790</b>

Lampiran 11. Tindak Lanjut Kasus Pro-Justitia Di Bidang Obat dan Makanan

No.	Jenis Produk	Jumlah Perkara	Tindak Lanjut									
			SPDP		P18 / P19		P21		Proses / Putusan Pengadilan		Dilimpahkan ke POLRI	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Obat	6	6	37,50	0	0	1	6,25	0	0	0	0
2	Obat Tradisional	1	1	6,25	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Suplemen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pangan	9	8	50,00	3 *)	18,75	0	0	1	6,25	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>15</b>	<b>93,75</b>	<b>3</b>	<b>18,75</b>	<b>1</b>	<b>6,25</b>	<b>1</b>	<b>6,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan \*) :

1. Tahap I : 1 (LK Tahun 2014); 1 (LK Tahun 2015); dan 1 (LK Tahun 2016)
2. P-18 / 19 : 2 (LK Tahun 2015); dan 1 (LK Tahun 2016)
3. P-21 : 1 (LK Tahun 2015)
4. Tahap II : 1 (LK Tahun 2013)
5. Sidang Pengadilan : 1 (LK Tahun 2016)
6. Putusan Pengadilan : 1 (LK Tahun 2016)
7. Dilimpahkan : -
8. Mohon DPO : 1 (LK Tahun 2014)

Lampiran 12. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan menurut Kabupaten / Kota Tahun 2017

No	Sarana Produksi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
					Baik	Temuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Ind. Farmasi	Jak Pus	1	20	0	1
		Jak Tim	32		7	25
		Jak Ut	2		0	2
		Jak Bar	1		1	0
		Jak Sel	2		0	2
		Total	38		8	30
2	Ind. Farmasi (NAPZA)	Jak Pus	0	10	0	0
		Jak Tim	26		26	0
		Jak Ut	0		0	0
		Jak Bar	1		1	0
		Jak Sel	3		3	0
		Total	30		30	0
3	Ind. OT (IOT)	Jak Pus	0	9	0	0
		Jak Tim	10		3	7
		Jak Ut	0		0	0
		Jak Bar	1		0	1
		Jak Sel	4		1	3
		Total	15		4	11
4	IKOT	Jak Pus	2	55	0	2
		Jak Tim	12		0	12
		Jak Ut	10		0	10
		Jak Bar	18		0	18
		Jak Sel	4		0	4
		Total	46		0	46
5	Ind. Kosmetika	Jak Pus	6	57	0	6
		Jak Tim	13		0	13
		Jak Ut	11		1	10
		Jak Bar	28		1	27
		Jak Sel	0		0	0
		Total	58		2	56
6	Ind. Alkes	Jak Pus	-	-	-	-
		Jak Tim	-	-	-	-
		Jak Ut	-	-	-	-
		Jak Bar	-	-	-	-
		Jak Sel	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-
7	Ind. PKRT	Jak Pus	-	-	-	-
		Jak Tim	-	-	-	-
		Jak Ut	-	-	-	-
		Jak Bar	-	-	-	-
		Jak Sel	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-
8	Ind. Pangan	Jak Pus	2	68	1	1
		Jak Tim	23		16	7
		Jak Ut	17		12	5
		Jak Bar	24		16	8
		Jak Sel	10		8	2
		Total	76		53	23
9	Ind. RT Pangan	Jak Pus	2	38	1	1
		Jak Tim	8		4	4
		Jak Ut	6		2	4
		Jak Bar	12		5	7
		Jak Sel	2		1	1
		Kep. Seribu	16		1	15
Total	46	14	32			
10	Ind. Miras	Jak Pus	0	2	0	0
		Jak Tim	0		0	0
		Jak Ut	0		0	0
		Jak Bar	2		0	2
		Jak Sel	0		0	0
		Total	2		0	2
	Total	Jak Pus	13	259	2	11
		Jak Tim	124		56	68
		Jak Ut	46		15	31
		Jak Bar	87		24	63
		Jak Sel	25		13	12
		Kep. Seribu	16		1	15
		Total	311		111	200

Lampiran 13. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan menurut Kabupaten / Kota tahun 2017

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
					Baik	Temuan
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>OBAT</b>					
1	PBF	Jak Pus	28	106	2	26
		Jak Tim	46		1	45
		Jak Ut	7		0	7
		Jak Bar	26		2	24
		Jak Sel	17		0	17
		<b>Total</b>	<b>124</b>		<b>5</b>	<b>119</b>
2	Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas	Jak Pus	16	430	1	15
		Jak Tim	31		0	31
		Jak Ut	20		1	19
		Jak Bar	20		1	19
		Jak Sel	21		1	20
		<b>Total</b>	<b>108</b>		<b>4</b>	<b>104</b>
3	Toko Obat Berizin	Jak Pus	6	100	0	6
		Jak Tim	8		2	6
		Jak Ut	6		0	6
		Jak Bar	3		1	2
		Jak Sel	8		1	7
		Kep. Seribu	5		0	5
		<b>Total</b>	<b>36</b>		<b>4</b>	<b>32</b>
4	GFK	Jak Pus	3	5	0	3
		Jak Tim	1		0	1
		Jak Ut	1		0	1
		Jak Bar	0		0	0
		Jak Sel	0		0	0
		Propinsi DKI Jakarta	1		1	0
		<b>Total</b>	<b>6</b>		<b>1</b>	<b>5</b>
6	Sarana Kesehatan Pelayanan	Jak Pus	7	63	0	7
		Jak Tim	6		0	6
		Jak Ut	5		0	5
		Jak Bar	8		0	8
		Jak Sel	9		0	9
		Kepulauan Seribu	5		0	5
		<b>Total</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>40</b>

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
					Baik	Temuan
1	2	3	4	5	6	7
II	<b>SARANA PENGELOLA NAPZA</b>					
1	PBF	Jak Pus	8	25	3	5
		Jak Tim	12		3	9
		Jak Ut	4		1	3
		Jak Bar	11		5	6
		Jak Sel	9		1	8
		Total	44		13	31
2	Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas	Jak Pus	8	40	0	8
		Jak Tim	14		2	12
		Jak Ut	8		0	8
		Jak Bar	21		3	18
		Jak Sel	11		2	9
		Kep. Seribu	1		1	
		Total	63		8	55
	GFK	Jak Pus	0	5	0	0
		Jak Tim	0		0	0
		Jak Ut	1		0	1
		Jak Bar	0		0	0
		Jak Sel	0		0	0
		Propinsi DKI Jakarta	1		1	0
III	<b>OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN</b>	Jak Pus	44	154	30	14
		Jak Tim	34		33	1
		Jak Ut	41		34	7
		Jak Bar	32		29	3
		Jak Sel	45		36	9
		Kep. Seribu	5		3	2
		Total	201		165	36
IV	<b>KOSMETIKA</b>	Jak Pus	46	134	29	17
		Jak Tim	35		31	4
		Jak Ut	51		37	14
		Jak Bar	55		43	12
		Jak Sel	64		51	13
		Kep. Seribu	10		5	5
		Total	261		196	65
V	<b>ALAT KESEHATAN</b>	Jak Pus	-	-	-	-
		Jak Tim	-		-	-
		Jak Ut	-		-	-
		Jak Bar	-		-	-
		Jak Sel	-		-	-
		Total	-		-	-

No	Sarana Distribusi	Kab/Kota	Jumlah Sarana	Jumlah Target Sarana Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
					Baik	Temuan
1	2	3	4	5	6	7
VI	PANGAN terdiri dari : - Toko,supermarket,dll	Jak Pus	51	380	32	19
		Jak Tim	72		49	23
		Jak Ut	77		50	27
		Jak Bar	73		52	21
		Jak Sel	77		40	37
		Kep. Seribu	10		9	1
		Total	360		232	128
VII	PENJUAL PARSEL	Jak Pus	17	25	16	1
		Jak Tim	1		1	0
		Jak Ut	10		9	1
		Jak Bar	8		8	0
		Jak Sel	5		3	2
		Total	41		37	4
VII	BAHAN BERBAHAYA	Jak Pus	3	12	0	3
		Jak Tim	6		1	5
		Jak Ut	4		2	2
		Jak Bar	1		0	1
		Jak Sel	0		0	0
		Total	14		3	11
	TOTAL	Jak Pus	237	1489	113	124
		Jak Tim	266		123	143
		Jak Ut	234		134	100
		Jak Bar	258		144	114
		Jak Sel	266		135	131
		Kep Seribu	36		18	18
		Propinsi DKI Jakarta	1		0	1
		Total	1298		667	631

Lampiran 14. Hasil sampling dan pengujian produk sediaan farmasi dan makanan

No	Jenis Produk	Jumlah Sampel		Selesai Diuji		Hasil Pengujian		Jumlah dan Jenis TMS	
		DIPA	LAIN - LAIN	Jumlah	%	TMS	%	TMS Label	TMS Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Obat	621	22	643	100	3	0.46	0	3
	- DTL	27		27	100	0	0		
	- DKL	117		117	100	0	0		
	- DKI	11		11	100	0	0		
	- GBL	28		28	100	0	0		
	- GKL	399		399	100	3	0.76	0	
	- GTL	18		18	100	0	0		
	- DBL	10		10	100	0	0		
	- DKX	11		11	100	0	0		
2	Obat Tradisional	512	14	526	100	81	15.4	0	81
	- TR	373		379	100	79	20.8		
	- TL	0							
	- QL	4		5	100	0	0		
	- QD	23		23	100	1	4.3		
	- TI	101		101	100	1	1.1		
	- QI	4		2	100	0	0		
	- HT	7		9	100	0	0		
3	Suplemen Kesehatan	168	1	169	100	4	2.37	0	4
	- SI	50		51	100	1	1.96		
	- SD	109		108	100	3	2.78		
	- SL	9		9	100	0	0		
	- FF	0							
4	Kosmetika	1020	2	1022	100	15	1.47	0	15
	- CL	0							
	- CA	0							
	- CD	0							
	- NA	891		891	100	15	16.7		
	- CC	0							
	- NC	95		95	100	0	0		
	-Tidak ada Reg	0							
	- Notifikasi	0							
	- NE	28		28	100	0	0		
	- CE	0							
	- NB	3		3	100	0	0		
	- ND	3		3	100	0	0		

No	Jenis Produk	Jumlah Sampel		Selesai Diuji		Hasil Pengujian		Jumlah dan Jenis TMS	
		DIPA	LAIN - LAIN	Jumlah	%	TMS	%	TMS Label	TMS Mutu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Alat Kesehatan (+ Kondom)	5	715	720	100	1	0.1	0	1
6	PKRT								
7	Pangan	1021	0	1021	100	93	9.1		93
	• MD	583	0	583	100	20	3.4		
	• ML	134	0	134	100	2	1.5		
	• SP/SPP-IRT	158	0	158	100	24	15.2		
	• Tidak terdaftar	5	0	5	100	5	80		
8	Kemasan Pangan	25	0	25	100	0	0		
9	PJAS	16	0	16	100	5	31.3		
10	Garam	100	0	100	100	37	37		
11	Narkotika	0	0	0	0	0	0		
12	Psikotropika	50	0	50	100	0	0	0	0
13	Rokok	3	0						
	<b>TOTAL</b>	<b>3400</b>	<b>758</b>	<b>4151</b>	<b>100</b>	<b>197</b>	<b>28.90</b>	<b>9</b>	<b>207</b>